



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN ESELON I
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 13 (tiga belas)
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, Tanggal : Senin, 5 September 2022
Waktu : 10.37 WIB s.d. 19.30 WIB
Tempat : Hotel Intercontinental, Jakarta
Ketua Rapat : Dony Maryadi Oekon (F-PDI Perjuangan / Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : Pembahasan RKAKL & RKP 2023
Hadir : 47 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F.P-Nasdem/Ketua Komisi VII DPR RI
2. Dony Maryadi Oekon/F.PDI Perjuangan/ Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Maman Abdurrahman, S.T./F.P-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
4. Bambang Haryadi, S.E./F.P-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

8 orang anggota dari 11 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.

4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Adian Yunus Yusak Napitupulu.
6. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
7. Ismail Thomas, S.H, M.Si
8. Bambang DH.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

7 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam.
2. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
3. Drs. Mukhtarudin.
4. Ir. Lamhot Sinaga.
5. Bambang Hermanto, S.E.
6. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A, M.Sc.
7. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

6 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprpto.
2. R. Wulansari.
3. Ramson Siagian
4. Katherine A. Oendoen .
5. Iwan Kurniawan, S.H.
6. H. Nurzahedi, S.E.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.
3. Rian Firmansyah, S.Pd.
4. Rico Sia.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc, M.Sosio
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
4. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir
3. Zulfikar Hamonangan, S.H.
4. Rusda Mahmud.
5. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring.
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Dr. H. Mulyanto, M. Eng.
4. H. Nurhasan Zaidi, S. Sos.I.
5. Dipl. Ing Hj. Diah Nurwitasari, MI.Pol.

8. FRAKSI PARTAI Amanat Nasional:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
3. H. Nasril bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan:

1 orang anggota dari 1 anggota:

1. Drs. H. Anwar Idris

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Eselon I Kementerian Perindustrian

JALANNYA RAPAT :

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI, hadir di sini Pak Bambang dan Pak Ketua Pak Sugeng hadir di Zoom, selamat pagi Pak Ketua. Beliau hadir secara Zoom karena tadi pagi kami mendapat informasi beliau kena positif covid Pak.

F-NASDEM/ KETUA KOMISI VII DPR RI (SUGENG SUPARWOTO):

Iya pagi, saya istirahat di rumah sejenak karena flu-flu, ternyata jebol juga kena positif ini.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Siap Pak Ketua, saya lanjut ya Ketua.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.



Yang kami hormati jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Dirjen Industri Agro, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika diwakili, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat secara protokol kesehatan guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPR RI untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat pada hari ini sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda, pembahasan detail RKAKL tahun 2023.

Berdasarkan data dari Sekretariat Anggota Komisi VII DPR RI yang telah hadir berjumlah 20 Anggota dari 7 fraksi, dari 52 Anggota Komisi VII yang terdiri atas 9 fraksi yang ada. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi.

Dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup", oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat tertutup, apakah dapat disetujui? atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.

(RAPAT:SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.37 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai maksimal pada pukul 15.00 WIB, apakah dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Iya ini maksimal kalau kita bisa kelar setengah jam, setengah jam lah, yang penting jelas.

Bapak/Ibu yang saya hormati.



Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Komisi VII DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan pengantar RKAKL tahun 2023. Pada hari ini kita akan mendalami hal tersebut bersama jajaran Eselon Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang hadir pada pagi hari ini yaitu Sekjen, Irjen, Dirjen Industri Agro, Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil dan Dirjen Ilmate serta hadirin yang berbahagia.

Komisi VII Komisi VII DPR RI akan melanjutkan pendalaman dengan Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang lainnya pada sore hari nanti. Dalam nota keuangan RAPBN tahun 2023 disebut anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah sebesar Rp2.917.008.351.000.

Selanjutnya berdasarkan rincian belanja pemerintah pusat dan pembiayaan anggaran dalam RAPBN tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Presiden, maka dapat disampaikan alokasi anggaran masing-masing Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal 308.658.419.000.
2. Irjen 43.989.630.000.
3. Dirjen Industri Agro 76.677.570.000.
4. Dirjen IKFT 88.980.782.000.
5. Dirjen Ilmate Rp. 97.969.780.000

Sesuai dengan agenda rapat maka Komisi VII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan detail mengenai rencana kerja anggaran masing-masing Eselon I Kementerian Perindustrian yang mengacu pada tahun anggaran 2023.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya untuk efektifnya waktu pembahasan kami persilakan Sekjen dan dilanjutkan oleh Pak Irjen, kemudian Dirjen Agro, kemudian Dirjen IKFT dan diakhiri dengan Dirjen Ilmate untuk menyampaikan pemaparan detail terkait program masing-masing.

Kami persilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.

Di sini tadi seperti Bapak Ketua sampaikan Pak Sugeng hadir di tadi lalu Pak Bambang Haryadi hadir fisik dan memimpin hadir rapat secara fisik di



Intercontinental, Bapak Dony Oekon dan Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang tidak saya sebut satu-persatu.

Kami hari ini didampingi oleh Bapak Irjen Bapak Masrokan ...(suara tidak jelas 09.09), lalu mohon izin Bapak Dirjen Ilmate karena jam 10.00 tadi harus berangkat ke Amerika bersama rombongan, Pak Menteri besok pagi lalu sama Bapak...(suara tidak jelas 09.23), lalu ada Bapak Dirjen Agro Pak Putu Dwi, lalu ada Pak Plt. Dirjen IKFT Bapak Warsito Ignatius ...(suara tidak jelas 09.34), dan Dirjen Ilmate tadi seperti saya sampaikan diwakili oleh Bapak Sedirjen yang akan menjelaskan. Sedangkan yang belum hadir Bapak Aris Gunawan nanti jadwalnya jam siang, lalu Ibu Reni Yanita ...(suara tidak jelas 09.52), juga siang tapi secara sepintas nanti kami jelaskan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak/Ibu semua pada hari ini.

Bapak/Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk pembahasan RKAKL dan RKP tahun 2023.

Bapak/Ibu yang terhormat.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Pembangunan Nasional Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S617MK702/2022 dan B577M.PPN/...(suara tidak jelas 10.39), 2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal pagu anggaran kementerian/Lembaga dan penyesuaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2023.

Pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2023 adalah sebesar 2,91 triliun, pagu anggaran tersebut bersumber dari rupiah murni sebesar 2,49 triliun, PNPB sebesar 150,08 miliar yaitu sebesar 112,8 miliar dan SBSN sebesar Rp158,56 miliar. Rincian alokasi belanja sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar 811,6 miliar.
2. Belanja operasional sebesar 383,5 miliar.
3. Belanja non operasional sebesar 1,272 triliun.

Dalam keseluruhan anggaran tersebut terdapat alokasi anggaran Pendidikan sebesar 983,59 miliar.

Pagu anggaran Kementerian Perindustrian mengalami kenaikan sebesar 287 miliar bila dibandingkan dengan alokasi pagu indikatif. Alokasi tambahan tersebut dipergunakan untuk kegiatan prioritas yaitu:

1. Partisipasi Indonesia sebagai *partner country* Hannover Messe.
2. Pertumbuhan dan perkembangan wirausaha baru berbasis daerah potensial.
3. Pembangunan Indonesia manufaktur *center*.
4. Fasilitasi sertifikasi produk Indonesia dalam negeri.
5. Fasilitasi sertifikasi halal produk industri.



6. Restrukturisasi mesin/peralatan industri.
7. Penyusunan neraca komoditas.
8. Fasilitasi sertifikasi industri hijau.

Alokasi pagu anggaran Kementerian Perindustrian berdasarkan program, sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen sebesar 1,51 triliun.
2. program nilai tambah dan daya saing industri sebesar 914,59 miliar
3. program pendidikan dan vokasi sebesar 491,81 miliar.

Sedangkan alokasi pagu anggaran Kementerian Perindustrian berdasarkan unit Eselon 1 adalah sebesar:

- Sekretaris Jenderal sebesar. **...(suara tidak jelas 13.21)**, miliar.
- Dirjen Agro sebesar **...(suara tidak jelas 13.26)** miliar.
- Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil sebesar Rp. 88,98 miliar.
- Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika sebesar 97,96 miliar.
- Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka sebesar 400,41 miliar .

Nanti saya bisa jelaskan lebih detail ini sesuai dengan kesepakatan sebelum rapat, baik itu konsinyering maupun pembahasan saya hadir, di sini termasuk anggaran 200 miliar untuk **...(suara tidak jelas 14.06)**.

6. Inspektorat Jenderal sebesar 43,98 miliar
7. Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar Rp. 687,74 miliar
8. Dirjen Ketahanan Kewilayahan dan Akses Industri Internasional sebesar 216,93 miliar.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar **...(suara tidak jelas 14.27)**,

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Pak Sekjen sebentar, ini dari paparan Eselon I ini yang banyak program melekat di Dapil yang mana.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Yang industri kecil tadi yang saya bilang.

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

IKM ini ya Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Iya IKM yang 401 itu.



F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Coba yang tadi karena ini begini Pak Sekjen, karena kita kan tahun depan ini teman-teman menjelang pemilu kita berharap sih kita utamakan Dirjen Industri Kecil Menengah, Agro juga, Agro mungkin ada sosialisasi juga ngga ke Dapil?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

IKMA.

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

IKMA ya, oke mungkin itu yang akan kita **...(suara tidak jelas 15.14)**

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Sesuai dengan konsinyering kita sepakati 200 miliar masuk kesini **...(suara tidak jelas 15.20)**

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Kalau begini Pak Sekjen, mohon maaf nih. Kalau yang 900 ini belanja pegawai?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Nggak, jadi yang **...(suara tidak jelas 15.27)...** jadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 994,64 miliar, 200 miliar nya ini sudah kita sepakati untuk Diklat 3 in 1 yang waktu konsinyering dan Pak Menteri arahkan.

F-GERINDRA/ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (BAMBANG HARYADI, S.E.):

Jadi total untuk anggaran teman-teman di Komisi VII ini sudah teralokasi

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

400 miliar firm, 200 miliar IKMA, 200 miliar di BPSJI.

Selanjutnya pagu anggaran Sekretariat Jenderal tahun anggaran 2023 sebesar 308,65 miliar dengan rincian anggaran sebesar 66,02 miliar untuk



belanja pegawai, 55,10 miliar untuk belanja operasional, belanja non operasional sebesar 187,52 miliar. Dari belanja non operasional tersebut terdapat anggaran kegiatan prioritas nasional sebesar 106,51 miliar dan kegiatan regular sebesar 81,01 miliar.

Bila kita sandingkan antara Sekretariat Jenderal pada pagu anggaran tahun 2023 sebesar 308,65 miliar sedangkan DIPA tahun 2022 sebesar 250,76 miliar. Anggaran Sekretariat Jenderal dilaksanakan ...(suara tidak jelas 16.53), terdiri dari 2 program yaitu program nilai tambah dan daya saing industri sebesar 73,48 miliar dan 2. program dukungan manajemen sebesar 235 ...(suara tidak jelas 17.09) miliar

Untuk sekretariat jenderal sendiri juga melaksanakan program prioritas nasional diantaranya layanan ...(suara tidak jelas 17.16), Indonesia sebesar 1 miliar, sertifikat produk dalam rangka ...(suara tidak jelas 17.21), sebesar 40 miliar, bisnis ...(suara tidak jelas 17.25), produk dalam negeri 10 miliar, fasilitasi dan pembinaan industri halal sebesar 10,51 miliar dan fasilitasi infrastruktur Indonesia manufaktur center sebesar 45 miliar.

Rencana kerja ...(suara tidak jelas 17.38), sekretariat jenderal tahun 2023 terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- Program dukungan manajemen sebesar 235,17 miliar yaitu untuk, layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, layanan manajemen SDM internal, layanan manajemen kinerja internal, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dan fasilitasi dan pembinaan industri.
- Sedangkan pada program nilai tambah daya saing sebesar 73,48 miliar untuk kebijakan bidang tenaga ...(suara tidak jelas 18.11), kerja industri dan UMKM, koordinasi, promosi, fasilitasi dan pembinaan industri, pengawasan dan pengendalian produk, data dan informasi publik, sertifikasi produk dan kerjasama.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Demikian paparan yang dapat kami sebagai sebagai pengantar pada rapat penjelasan rapat hari ini, selanjutnya kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2023.

Atas perhatian Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, kami sampaikan terima kasih banyak.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Dilanjutkan Pak Irjen silakan, kita lanjut aja nanti pendalamannya langsung semua aja nanti ya, bagaimana Bapak/Bapak. Iya nanti poin-poinnya aja dibahas supaya *clear*, dilanjut aja nanti kita pendalaman secara bersama-sama aja nanti, diselesaikan aja dulu paparannya.

Silakan Pak Irjen.

INSPEKTUR JENDERAL KEMENPERIN RI (MASROKHAN):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Bapak-Bapak Pimpinan Komisi VII ~~...(suara tidak jelas 19.41)~~, Pak Sugeng dan yang lain.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali saat ini dan tentu saya selaku Irjen akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rencana kerja dan anggaran, langsung halaman 3.

Dapat kami sampaikan di sini bahwa total ~~...(suara tidak jelas 20.12)~~, Anggaran Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 adalah sebesar 43,9 miliar dan postur anggaran sebagai berikut:

1. Belanja pegawai sebesar 18,6 miliar atau 42%.
2. Belanja barang sebesar 22,9 miliar atau 52% dan
3. Belanja modal sebesar 2,5 miliar atau 6 %.

Dapat kami sampaikan di sini bahwa **dibandingkan dengan besarnya kegiatan yang harus diawasi** ~~...(suara tidak jelas 20.36)~~, serta kegiatan pengawasan yang harus dilaksanakan dengan bersifat *mandatory* ataupun penugasan ~~...(suara tidak jelas 20.46)~~, postur anggaran ini masih jauh dari kondisi ideal, hal ini dikarenakan dari total 43,9 miliar sebesar 25,8 miliar diantaranya ~~...(suara tidak jelas 21.02)~~, anggaran gaji serta operasional.

Hal ini mengakibatkan besaran anggaran yang diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan maupun dukungan pengawasan ~~...(suara tidak jelas 21.13)~~ atau 41,2%.

Dan dari besaran anggaran non operasional ini Bapak/Ibu sekalian, porsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengawasan adalah sebesar Rp9,2 miliar atau 20,91% dari total anggaran Irjen.

Walaupun demikian **inspektorat** jenderal ~~...(suara tidak jelas 21.37)~~, dapat melaksanakan kegiatan pengawasan semaksimal mungkin serta mengawal ~~...(suara tidak jelas 21.44)~~, kinerja Kementerian Perindustrian **secara tertib, transparan dan akuntable** ~~...(suara tidak jelas 21.49)~~.

Slide berikutnya, anggaran tersebut selanjutnya **didistribusikan** untuk masing-masing **Eselon Dua** ~~...(suara tidak jelas 21.55)~~, untuk Inspektorat 1 sebesar 2,2 miliar 350 juta, kemudian Inspektorat 2 sebesar 2 miliar 250 juta, Inspektorat 3 sebesar Rp2 miliar 350 juta, kemudian Inspektorat 4 sebesar Rp. 2 miliar 250 juta ~~...(suara tidak jelas 22.24)~~.

Bapak/Ibu sekalian.

Khusus anggaran pengawasan sebesar 92 miliar akan di gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pengawasan, seperti audit, review, monitoring dan evaluasi ~~(suara tidak jelas 22.44)~~, penganggaran dan perencanaan, pemantauan serta evaluasi internal.

Sedangkan anggaran dukungan manajemen sebesar 8,9 miliar akan diperuntukan untuk membiayai ~~...(suara tidak jelas 22.57)~~, kegiatan pengawasan seperti layanan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, kemudian penyediaan sarana prasarana dukungan pengawasan, kegiatan-kegiatan koordinasi yang bersifat **lintas inspektorat** ~~...(suara tidak jelas 23.11)~~, dan **lain** sebagainya.

Adapun anggaran gaji dan operasional sebesar ~~...(suara tidak jelas 23.14)~~.

Untuk membayar gaji pegawai....

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

Izin **Pak** Pimpinan

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Silakan

INSPEKTUR JENDERAL KEMENPERIN RI (MASROKHAN):

Adapun anggaran gaji dan operasional sebesar ~~...(suara tidak jelas 24.14)~~, dibutuhkan bagi belanja pegawai serta kebutuhan-kebutuhan operasional ~~...(suara tidak jelas 24.18)~~ serta kebutuhan lainnya.

Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

APIP dalam rangka mengawal ~~...(suara tidak jelas 24.23)~~ tahun 2023, selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan pengawasan **yang secara garis besar dapat dibagi**, ~~...(suara tidak jelas 24.30)~~, yaitu pertama review terdiri atas review rencana kerja dan anggaran satker, review laporan keuangan, barang milik negara, review penyerapan, anggaran dan pengadaan barang dan jasa.



Kemudian audit, terdiri atas audit kepatuhan, audit kinerja dan audit tujuan tertentu...(suara tidak jelas 24.52).

Kemudian yang ketiga adalah, monev terdiri atas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja atau evaluasi SAKIP serta evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas.

...(suara tidak jelas 25.08) kegiatan sampling dan pendampingan terdiri dari pengawalan kegiatan prioritas nasional dan kementerian. Kedua, pengawalan dan pendampingan kegiatan berisiko tinggi.

Ketiga, bimbingan teknis dan manajemen risiko ...(suara tidak jelas 25.25) kegiatan anti korupsi yang dilaksanakan oleh ...(suara tidak jelas 25.30) kedua, pengelolaan aplikasi LAPOR terkait dengan pengaduan masyarakat. Ketiga, adalah pengelolaan strategi nasional ...(suara tidak jelas 25.45)

Demikian rencana kerja anggaran dari Inspektorat Jenderal 2023, kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Irjen.

Lanjut Pak Direktur Agro.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih Bapak.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII dan para Anggota Komisi VII, baik yang hadir fisik maupun *online*.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom.

Om swastyastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Perkenalkan kami menyampaikan Pimpinan, ada 2...(suara tidak jelas 26.55) Didepan kami sudah ...(suara tidak jelas 27.00), yang didepan itu adalah



ringkasannya dan yang di lampiran itu adalah detail kegiatannya Pak. Jadi satuan 3 ini yang **...(suara tidak jelas 27.15)**

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sampai kepada satuan 3 ini nggak usah **dipaparin** **...(suara tidak jelas 27.25)**

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap Pak, mohon izin melanjutkan.

Jadi seperti tadi disampaikan anggaran program kegiatan Dirjen Agro tahun anggaran 2023 itu berjumlah 76.677.577.000, jadi anggaran ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar 6.739.000.000. Dari pagu ini Bapak/Ibu yang saya hormati, ini ada 36,44% itu adalah kegiatan prioritas atau sebesar 27,9 miliar dan sisanya itu adalah gaji, operasional, prioritas KL dan kegiatan regular yaitu sebesar 63,56% atau sebesar 48,7 miliar di halaman 3.

Dari anggaran ini terbagi yaitu di Sesdirjen itu 52% yang di **...(suara tidak jelas 28.52)** 52% **...(suara tidak jelas 28.56)** 20%, Direktorat Industri Makanan Hasil Perikanan, Hasil Laut dan Perikanan itu 16% dan Dirjen **...(suara tidak jelas 29.12)** itu 12%. Dari anggaran ini itu masuk dalam program nilai tambah dan daya saing itu 33,5 miliar atau 43,76% dan program pendukung 43,1 miliar atau 56,23%. Nah kalo di Agro Pimpinan, dan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Itu belanja pegawai itu 21,3 miliar atau 27,79 miliar, belanja operasional itu 6 miliar atau 7,82% dan yang lainnya adalah belanja non operasional yaitu 49,4 miliar atau dalam prosentase 64,38%.

Jadi dana operasional kalau kita lihat di Direktorat Ilmate itu 15,1 miliar, di Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan itu 12,2 miliar, Dirjen **...(suara tidak jelas 30.37)** 9,1 miliar dan Sesdirjen 12,86 miliar **...(suara tidak jelas 30.47)**

Selanjutnya di halaman 4, ini kegiatan prioritas nasional itu di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah neraca komoditas sektor industri hasil hutan dan perkebunan. Ini adalah untuk neraca komoditas kertas bekas untuk bahan baku industri yaitu sebesar 1,3 miliar.

Yang kedua adalah pusat logistik industri *furniture* ini adalah dalam bentuk bantuan mesin peralatan 1 miliar dan yang ketiga adalah realisasi industri *furniture* dan pengolahan kayu sebesar 9,9 miliar. Itu Direktorat Industri Minuman hasil tembakau dan bahan penyegar ini ada 2 kegiatan program prioritas nasional yaitu untuk perbaikan rantai pasar industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar **...(suara tidak jelas 31.58)**



Selanjutnya di Direktorat Industri Hasil Laut dan Perikanan ini...(suara tidak jelas 32.19) Ini untuk komoditas gula, daging, ikan, jagung dan beras pecah untuk ...(suara tidak jelas 32.35) kebutuhan industri dibutuhkan 5,7 miliar.

Suatu kewenangan pangan fungsional yang difasilitasi untuk pengembangannya yaitu lahan ...(suara tidak jelas 32.47) 1,7 miliar. Selanjutnya ini partisipasi untuk pameran terutama di...(suara tidak jelas 33.01) itu sekitar 700 juta dan pendampingan penguatan industri ...(suara tidak jelas 33.09) makanan hasil laut dan perikanan sebesar 2 jadi total prioritas nasional ini 27,9 miliar.

Selanjutnya dari semuanya nanti hasil utamanya yaitu kebijakan pengawasan pengendalian dan pembinaan sektor industri dan pengamanan pasok bahan baku dan minyak mentah sawit dan juga berupa ...(suara tidak jelas 33.42) berupa gaji, operasional serta dukungan layanan manajemen ...(suara tidak jelas 33.47)

Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Dirjen Agro.

Dilanjutkan Pak Dirjen IKFT silakan.

DIRJEN IKFT KEMENPERIN RI:

Yang kita hormati rekan-rekan semua Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi semua.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan 3 pokok yang kami sampaikan pagu anggaran Direktorat Jenderal IKFT prioritas nasional Direktorat Jenderal IKFT dan rencana kerja Direktorat Jenderal IKFT tahun 2023.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, Direktorat Jenderal IKFT mendapat alokasi anggaran Rp88.980.782.000 dan kami alokasikan anggaran tersebut untuk belanja pegawai sebesar 23,800 juta, kemudian

belanja operasional Rp. 6...(suara tidak jelas 35.34), kemudian belanja non operasional...(suara tidak jelas 35.49).

Sedangkan alokasi kegiatan prioritas nasional disini sebesar 47 miliar 411 juta atau sekitar ...(suara tidak jelas 36.07) dan ...(suara tidak jelas 36.12) sebesar Rp. 11....miliar ...(suara tidak jelas 36.19).

Kemudian selanjutnya berdasarkan nota ...(suara tidak jelas 36.22) Direktorat Jenderal IKFT mendapatkan tambahan anggaran sebesar 4,7 miliar, dengan rincian pertama untuk tambahan restrukturisasi mesin peralatan industri tekstil ...(suara tidak jelas 36.45) sebesar 2,2 miliar.

Kemudian untuk penyusunan neraca komoditi sektor industri kimia hulu sebesar 2,5 miliar. Jadi kami mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar 4,7 miliar.

Kemudian kalau kita sandingkan anggaran Direktorat Jenderal IKFT ini pada tahun anggaran 2022 ini dengan 2023, kami melihat bahwasanya dari total pagu anggaran yang saat ini kami mendapat alokasi sebesar 114 miliar dengan belanja pegawai 21 miliar dan seterusnya berdasarkan anggaran prioritas nasional dan non prioritas nasional kita bisa ...(suara tidak jelas 37.47) mengalami penurunan sebesar 20%.

Selanjutnya kalau kita melihat secara struktur organisasi kita alokasikan anggaran tahun 2023 dengan 2022 ini di sekretariat di tahun 2022 ini sebesar 40 miliar, sementara di pagu indikatif 2023 ini sebesar 37 miliar sehingga ada selisih minus 3 miliar dan selanjutnya juga terhadap Direktorat Industri Kimia Hulu. Kita ~~...(suara tidak jelas 38.34)~~ pada tahun berjalan ini ada 14.700.000.000 kemudian di tahun 2023 kita mendapat alokasi ...(suara tidak jelas 38.54), jadi ada selisih minus 101,6 miliar dan juga di Direktorat Industri Kimia Hilir di sini di tahun berjalan 19 miliar 200 juta, di tahun 2023 kita alokasikan 12 miliar 50 juta, sehingga ada selisih minus 7 miliar 150 juta.

Dan selanjutnya di Direktorat Industri ...(suara tidak jelas 39.40) saat ini mendapatkan alokasi anggaran ...(suara tidak jelas 39.45) di tahun 2023 kita alokasikan sebesar 5 miliar 500 juta ...(suara tidak jelas 40.02).

Jadi dari rincian-rincian kegiatan di 2023 itu Bapak, kita harapkan bisa mendukung peningkatan kinerja daya saing sektor industry kimia tekstil dan farmasi.

Bapak/Ibu sekalian.

Kalau kita lihat program prioritas ini kita melakukan rencana kerja di tahun 2023 terhadap beberapa program unggulan yang di Direktorat Jenderal IKFT ini melalui peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi industri kimia farmasi dan tekstil.

Dan di sini dalam program nilai tambah dan daya saing industri mengalokasikan anggaran sebesar Rp48.761.000.000 dan selanjutnya kami lakukan pelaksanaan kegiatan atau rencana kerja dari tahun 2023 ini melalui pengembangan standar industri kimia farmasi tekstil, peningkatan penggunaan produk dalam negeri sektor IKFT, kemudian juga peningkatan kerjasama investasi bidang industri kimia farmasi dan tekstil.

Kemudian selanjutnya kita bisa menjelaskan di sini Bapak/Ibu sekalian, kami juga melakukan rencana pemetaan daripada revolusi industri 4.0 industri kimia, farmasi dan tekstil dari 7 sektor yang di...(suara tidak jelas 43.49) dan penyediaan fasilitas fiskal Industri kimia, farmasi dan tekstil melalui beberapa rekomendasi kebijakan yang kita harapkan di sektor kimia farmasi tekstil dapat meningkat saat setelah terjadi dari Covid ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rencana kerja terkait dengan pengembangan sistem informasi industri kimia farmasi dan tekstil. Di sini melalui penyusunan neraca komoditi yang sudah berjalan di sektor garam, kemudian juga sektor pupuk dan bahan baku plastik dan juga beberapa sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk kebijakan...(suara tidak jelas 44.55).

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan beberapa program terkait dengan rencana kerja kami di tahun 2023 terkait dengan pengelolaan bahan kimia dan penanggulangan daya dampak di sektor industri. Ini menjadi penting karena selama ini kita mempunyai ...(suara tidak jelas 45.24) prioritas nasional...(suara tidak jelas 45.27) untuk meningkatkan, baik inventarisasi, database, otoritas nasional tersebut...(suara tidak jelas 45.41) prioritas nasional tersebut.

Untuk mendukung semua itu kami di ...(suara tidak jelas 45.52) kami mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp40.219.785.000 ...(suara tidak jelas 46.05) dukungan manajemen internal, Layanan sarana prasarana internal, layanan manajemen SDM internal dan...(suara tidak jelas 46.16) ini semua kami mengharapkan dukungan dari Bapak pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat pada kinerja di tahun 2023.

Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.



Selanjutnya dari Dirjen Ilmate, silakan.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Yang kami hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak Ketua, ini Dirjennya setiap kita pembahasan konsinyering nggak ada, nggak usah kita bahas dulu. Inikan kalau kita nanya, katanya dampingin Menteri terus **...(suara tidak jelas 47.21)** kalau nggak, nggak usah paparan dulu, ngapain.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tadi kami sudah sepakat **...(suara tidak jelas 47.30)**

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya tapi inikan Sесdirjen **...(suara tidak jelas 47.36)** kemarin, pembahasan kemarin dia nggak ada juga, nggak mungkin dong masa spesial sekali dirjen yang satu ini. Ini semua ada Pak Dirjen, ini ada Pak Sekjen dampingin Pak Menteri harusnya gitu karena lebih penting Pak Sekjen ini gitu.

Izin pimpinan supaya kalau bisa dihadirkan karena kita banyak hal yang mau kita pertanyakan juga di sini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf Pak Nasir, tadi kami juga sudah bahas di **...(suara tidak jelas 48.14)** Pak Dirjen memang sudah *confirm* Pak Dirjen ada di luar kota. Itu tadi kami sudah putuskan silakan hadir dengan Pak Sесdirjen **...(suara tidak jelas 45.26)** Tadi pagi itu sudah disampaikan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya kan alasannya harus, kan ini jadwal juga jauh hari sudah disusun Ketua. Harusnya dia belajar dari kejadian yang kemarin gitu, harusnya ada dong di sini, kan semua juga sini dirjen, kan nggak ada yang spesial dirjen ini gitu.



Kalau nggak kita tunda aja Pimpinan yang saat ini, nggak usah kita bahas dan nggak usah kita setuju gitu, tunggu dia datang ke sini, biar *clear* gitu. Iya karena banyak hal yang teman-teman juga kerepotan dengan programnya dia gitu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, sekarang gimana teman-teman? Tadi pagi memang kita sudah putuskan, kan tadi pagi rapat **...(suara tidak jelas 49.20).**

F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Pimpinan, terima kasih.

Kalau menurut saya kalau Cuma satu dirjen dari sekian yang tidak hadir, satu ya Pak, mungkin untuk pembacaan pertama, paparan pertama bisa kita lanjutkan saja dulu nanti makan siang Pak Ketua, pimpinan juga Pak Nasir, sebentar.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nggak begini, izin pimpinan.

Saya nggak punya kepentingan di sini tapi saya meluruskan regulasi bahwa setiap pembahasan konsinyering itu hak untuk **...(suara tidak jelas 50.18)** itu ada di dirjen, bukan sesdirjen. Kalau nggak hari ini minta aja Pak menteri angkat dia jadi dirjen gitu, kan lebih bagus gitu karena dia harus bertanggung jawab atas anggaran yang dia keluarkan gitu.

Ini teman-teman kan kerepotan beberapa hal yang ada **...(suara tidak jelas 50.39)** lah, ada begini, ada begini, itu apa gitu kan mau kita pertanyakan atas pertanggungjawaban anggaran yang dia kelola barusan kita tunda nanti biar dia jelaskan di forum gitu.

Izin pimpinan, supaya transparan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nanti supaya keputusannya supaya *clear* ya Pak Nasir ya, saya pikir akomodir Pak Nasir untuk ini kita, tidak kita ketok dulu di sini. Kalau kita **...(suara tidak jelas 51.07)** nanti kita di skors dan nanti kita kondisikan seperti apa, tapi biar dia selesaikan dulu presentasi supaya *clear* dulu, presentasi saja. Untuk selanjutnya nanti saya akan kondisikan lagi Pak, gitu ya teman-teman ya.

Ya Pak Sesdirjen dilanjut dulu, supaya kami paham.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:



Baik, terima kasih Pak Ketua.

Sedikit kami mungkin kami sekali lagi Pak menyampaikan izinkan Bapak Ketua dan Wakil Ketua dan tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa kami mewakili Bapak Dirjen Ilmate karena Pak Dirjen saat ini sedang ke Amerika.

Pagi ini dia ke Amerika untuk mendampingi Bapak Menteri berkunjung tugas ke luar negeri. Untuk itu sekali lagi mohon izin kami dari Sesdirjen Ilmate menyampaikan rencana kerja anggaran Dirjen Ilmate tahun anggaran 2023.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan dilanjut.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Baik, Bapak/Ibu Pimpinan, Anggota Komisi VII yang kami bahagiakan.

Kami masuk ke *slide* 8 saja Pak, pagu awal Direktorat Jenderal Ilmate itu sejatinya 99 miliar dan kemudian sedikit mengalami perubahan pagu indikatif ini adanya pergeseran anggaran sebesar 3,5 miliar untuk kegiatan wirausaha baru di daerah potensial pada Direktorat Jenderal IKMA. Sehingga pagu indikatif di Ilmate ini di tahun 2023 menjadi 95 miliar.

Kemudian Rapat Kerja Komisi VII terakhir kemudian menyetujui penambahan anggaran di Kementerian Perindustrian sebesar 287 miliar, sehingga pagu yang sebelumnya itu adalah 95 miliar bertambah menjadi 2,5 miliar yang dialokasikan untuk anggaran neraca komoditas di sektor industri logam.

Jadi penambahan anggaran tersebut mengakibatkan pagu anggaran Direktorat Jenderal Industri Logam...(suara tidak jelas 53.39) tersebut menjadi 97,9 miliar dari semula 95,469 miliar.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Kita masuk di *slide* nomor 9 saja, postur pagu anggaran Ilmate tersebut 97,96 miliar tersebut dapat kami sampaikan juga sebetulnya turun sebesar 90.594.000.000 atau turun sebesar 47,35% dibandingkan pagu anggaran tahun 2022.

Dan pagu anggaran Ditjen Ilmate tersebut dapat kami sampaikan juga terdistribusi berdasarkan belanja pegawai itu sebesar 28 miliar 884 juta atau sebesar 29,64% dari total pagu anggaran.

Kemudian juga terdistribusi berdasarkan belanja operasional sebesar 6 miliar 829 juta atau sebesar 6,97%. Kemudian juga ...(suara tidak jelas 54.54)



berdasarkan belanja major proyek dan prioritas nasional sebesar 43 miliar 159 juta atau sebesar 44,05% dan belanja non prioritas sebesar 19 miliar 97 juta atau sebesar 19,49%.

Di *slide* 10, alokasi yang didapatkan oleh Dirjen Ilmate tahun 2023 tersebut dapat kami sampaikan berdasarkan program sebagai berikut:

Untuk dukungan manajemen itu sebesar 54 miliar 81 juta dan untuk program ini ada nilai tambah daya saing industri sebesar 43 miliar 195 juta.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pak, ini datanya mana ya.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Di *slide* 10 Pak, izin Pak, Kami lanjut.

Sedangkan alokasi pagu anggaran untuk Eselon 2 masing-masingnya dapat kami sampaikan tadi **...(suara tidak jelas 56.17)** pertama adalah ini *slide* 10 ya Pak.

Pertama adalah Direktorat Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan sebesar 10 miliar dan untuk Eselon 2 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika sebesar 12,9 miliar dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Direktorat Industri Logam sebesar 11,85 miliar dan untuk Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin dan Alat Transportasi sebesar 50,81 miliar.

Bapak/Ibu Pimpinan, Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Adapun anggaran yang teralokasi di Ditjen Ilmate tersebut dapat pula kami sampaikan, untuk program prioritas, ada beberapa prioritas yang bisa kami sampaikan.

Pertama adalah terkait dengan implementasi industri 4.0 yang bertujuan untuk memfasilitasi industri di daerah binaan Dirjen Ilmate dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem produksi berbasis industri 4.0 dengan alokasi anggaran total sebesar 7,9 miliar dengan target 30 industri pada 3 unit Eselon 2 di lingkungan Direktorat Ditjen Ilmate, dengan lingkungannya terkait dengan, baik terkait dengan pertama adalah fasilitas *asessment* dan verifikasi di titik 4.0 industri.

Kemudian juga fasilitas pendampingan manajemen transformasi industri 4.0, kemudian fasilitas *banchmark* industri 4.0 juga fasilitasi kolaborasi pengembangan ekosistem Indonesia 4.0, juga bimbingan teknis atau pendampingan pilot proyek implementasi industri 4.0, pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi industri 4.0.

Prioritas kedua adalah terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung program **...(suara tidak jelas 58.31)**

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Interupsi Bapak Pimpinan.

Pak saya mau sekaligus Bapak ketika mempresentasikan menjelaskan pengertian fasilitasi itu apa ya Pak, Bapak ngapain ketika menyebut kata fasilitasi karena ada uang ya di situ, ada anggaran.

Mungkin banyak juga di direktorat jenderal lain, ketika bicara fasilitasi walaupun saya tahu ya Pak, fasilitasi apa tapi saya ingin denger dari pihak Bapak. Ketika saya menjadi Anggota DPR 2004 selalu saya pengen tahu fasilitasi di mata Bapak/Bapak birokrat itu apa ya. Oke

Terima kasih.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Baik, izin Bu, bisa kami jawab fasilitasi ini karena memang ini adalah termasuk salah satu prioritas nasional dalam tugas kami.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Bukan Pak, Bapak kalau fasilitasi itu ngapain Pak, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak perlu sekian anggaran, Bapak tuh ngapain gitu loh.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Baik, izin Ibu dari **...(suara tidak jelas 59.31)** Ini adalah penilaian terbaik industri 4.0 Bu yang kami mencoba melakukan verifikasi terhadap kesiapan industri di dalam mendukung industri 4.0 ini jadi ini memang kami menggunakan pihak ketiga dengan *surveyor*, dengan pihak independent.....

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Ketua,

Pak maksudnya gini, anggaran yang Bapak gunakan ini, kita Anggota Komisi VII ini ada nggak manfaatnya buat Anggota Komisi VII dari anggaran yang Bapak jalankan itu? Kalau nggak, kita potong saja Ketua, dimana yang ada manfaatnya kita pindahkan kesitu, ini nggak ada manfaatnya gitu loh, ditanya tadi sama Pak Zul, Bapak harusnya jelasin, eh *Sorry*, Ibu Andi.

Jadi Bapak jelasin program yang Bapak jalankan itu adanya dimana, bentuknya seperti apa, kita sepakat tidak, konsinyering itu seperti itu Pak, kalau kita tidak sepakat, programnya tidak ada manfaatnya, Bapak cuma bentuk EO, konsultan, terus ini kan anggaran ini harusnya merenovasi mesin-mesin



umpamanya, terus membuat produksi baru mesin yang lebih diperbaiki teknologinya gitu, tapi adanya dimana, terus manfaatnya buat kita apa?

Bapak jelasin itu dulu gitu, ini lokasi yang Bapak bilang tadi 30 industri ini ada dimana lokasinya? Bapak jelaskan dulu industrinya mana-mana saja, tolong dijelasin gitu, supaya disini konsinyering itu minta penjelasan Pak, kemana anggaran yang akan Bapak gunakan itu.

Apakah ada di Dapil Pak Gandung, apakah ada di Dapilnya Pak Adian, apakah ada di Dapil saya kan gitu, nah kalau nggak ya nggak ada manfaatnya Pak, percuma, Bapak bagus jual sertifikat saja ke industri-industri yang sudah ada gitu loh, dapat duit itu, daripada Bapak nanti dikasih uang tidak tahu kemana arahnya.

Tolong jelasin gitu dulu Pak, biar kita sama-sama memahami ini gitu. Yah Pak Ses, jadi biar kita *clear* dulu gitu, kita ditanya tadi sama Bu Andi tadi arahnya kesana Pak, nah gitu, terima kasih.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Kami paham Pak Nasir, dan memang belum ada kami sebutkan industrinya, kami siap untuk berkolaborasi dengan Bapak-Bapak dan Ibu, industri mana yang akan kita ...(suara tidak jelas 01.03.03) karena memang kita belum ...(suara tidak jelas 01.03.06).

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Ses bisa menjelaskan secara jelas tidak? ...(suara tidak jelas 01.03.14), terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya mungkin Pak Ses, poinnya disini yang ditanya oleh rekan-rekan ini dapat kepada kita untuk mana yang bisa kita lakukan di Dapil kita juga gitu, apa yang bisa kita bawa kira-kira dari program ini, apakah sosialisasinya atau apa, jelas begitu Pak, mungkin itu Pak Ses.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Baik Pak, kami bisa sampaikan Pak, ada 5 kegiatan Pak yang bisa kita kolaborasikan Pak dengan teman-teman di DPR, pertama adalah ...(suara tidak jelas 01.03.52), sosialisasi kemanfaatan, dan itu tempatnya adalah di Kalimantan. Itu kita bisa kita sampaikan Pak.

Kemudian juga terkait dengan bisnis ...(suara tidak jelas 01.04.08) logam dengan pengguna logam, dan itu juga lokasinya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah, dan itu bisa kita kolaborasikan Pak. Kemudian juga ada Bimbingan Teknis seperti Bapak sampaikan tadi



kemampuan industri pendukung terkait kemiskinan Pak, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian juga ada lagi festival **...(suara tidak jelas 01.04.37)** dan Jakarta, ini bisa kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Interupsi Pak Ketua, baiknya bahasanya sinergi saja jangan kolaborasi Pak.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Siap Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terus yang kedua, **...(suara tidak jelas 01.04.51)** tolong langsung dicatat kalau ada Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan, terima kasih Pak Ketua.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Jadi Pak Ses, izin Pimpinan. Jadi daerah Sumatera, daerah Sulawesi, Papua, Bapak harusnya Direktornya sudah keliling, tanyain dulu, Dapilnya mana, ini Jogja tadi Bapak nggak sebut?

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Mohon izin Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Padahal ini kerajinannya, keterampilannya paling bagus, Bapak melecehkan ini. Coba itu dicatat dulu Pak, izin terima kasih Pimpinan.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Oke Pak kami catat.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya jadi ini maksud dari rekan-rekan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, manfaatnya, jadi nanti di Dapil kita juga jelas ini Pak, Dapil kita masing-masing ini juga jelas mudah-mudahan ada yang kita bisa kondisikan di Dapil sinergi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini Dirjen ILMATE Pak.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Oke siap Pak.



KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, jadi nyambung buat kita-kita semua, silahkan Pak dilanjut Pak, jelas yah Pak, jadi tolong nanti disampaikan buat ke kita, silahkan Pak.

SESDIRJEN ILMATE KEMENPERIN RI:

Baik Pak, izin Pak, kami lanjutkan Pak, Bapak/Ibu semuanya.

Jadi kami lanjutkan Pak, beberapa kegiatan prioritas yang juga menjadi kegiatan di tempat kami adalah terkait dengan penguatan struktur industri komponen elektronika, guna meningkatkan *science* dasar industri elektronika dan telematika melalui penyiapan struktur industri komponen dengan alokasi anggaran satu setengah miliar jadi ini bisa 3 DIPA kegiatan yang bisa kita kolaborasikan **...(suara tidak jelas 01.06.58)** termasuk dengan fasilitas penyimpangan bersifat lainnya, kemudian juga fasilitas investasi dalam rangka penyimpangan semi konduktor, dan termasuk juga penyimpangan infrastruktur atau ekosistem digital untuk membuat industri elektronik dan komponen.

Kemudian kami lanjutkan, kegiatan juga yang menjadi prioritas kami adalah terkait dengan pengembangan industri kendaraan bermotor dalam rangka peningkatan design, guna meningkatkan design dan nilai tambah industri kendaraan bermotor dengan posisi anggaran sebesar 1 milyar.

Ruang lingkupnya terkait dengan fasilitasi pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam peningkatan ekspor kendaraan bermotor serta juga standarisasi sektor industri kendaraan berbasis motor. Saya kira Pak, itu beberapa kegiatan prioritas kami, nanti kami kembalikan ke Bapak Pimpinan dan mohon arahnya Pak, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Dirjen. Nah presentasi sudah selesai semua dari semua Dirjen yang pagi ini, kita pemaparan sudah disampaikan oleh jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak/Ibu Anggota Komisi VII untuk memberikan tanggapan, saya jujur kita *rolling* seperti di Komisi yah, dari Fraksi per Fraksi, silahkan dari Fraksi PDI Perjuangan ada yang mau bertanya? Pak Bambang DH silahkan Pak Bambang.

Siap Pak, saya mengikuti acuan tapi silahkan kalau tidak malu-maluin saya setuju, *monggo*. Sebentar tadi, setelah Pak Bambang DH yah, setelah Pak Bambang DH.



F-PDIP (BAMBANG DH):

Baik.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VII;
Yang saya hormati segenap jajaran Kementerian Perindustrian.

Saya hanya menyikapi satu saja, di inspektorat, anggaran inspektorat ini kan paling kecil yah, hanya 2% dari total anggaran kementerian, dari yang paling kecil pun ternyata untuk belanja pegawai cukup menyita banyak, sehingga untuk dukungan pengawasan itu hanya 1/3 sangat kecil.

Pertanyaannya, saya sudah sempat mengintip, apa, yang detail di belakang, cuma apa yang bisa menjamin kualitas pelayanan bisa kita pertahankan dengan kecilnya anggaran tadi Pak Irjen juga menyampaikan persoalan itu, tapi bisa dijelaskan sepintas saja Pak, tidak perlu detail, saya rasa masih bisa disisir supaya kita bisa optimal dengan keterbatasan anggaran itu. Terima kasih itu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Bambang DH, dilanjut sebelah sini silahkan Pak Nasril, Mas Gandung mau nanya Mas Gandung?

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih Pimpinan. Saya langsung ke Sekjen, Pak Sekjen, tambahan anggaran yang 267 itu, itu usulan dari Kementerian? Mohon dijawab Pak, sedikit interaktif.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Mengkombinasikan, memfasilitasi Komisi VII dan Kemenperin, khususnya untuk **...(suara tidak jelas 01.11.27).**

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Baik, saya minta klarifikasi kepada Pimpinan, terutama kepada Pimpinan yang paling agak konsentrasi kepada di Dirjen IPMA, Bapak Haryadi. Saya ikut foto-foto Rapat dengan Menteri terakhir ada pernyataan Menteri disitu, jika ada tambahan itu semuanya ke IPMA, nah itu yang mana itu, apakah yang ini apakah yang akan datang?



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Pak Nasir, mohon maaf bukan mendahului Pak Sekjen, jadi ini yang ada di nota keuangan, jadi penentuan angka-angka ini ada di Rapat Kabinet antara Bapenas dan kita, yang rencana penambahan kami sudah koordinasikan dengan Pimpinan Badan Anggaran, rencananya kita akan ajukan tapi entar sore dengan Dirjen IPMA, penambahan yang mau difokuskan untuk Dapil, bahkan kami tadi sempat berdiskusi dengan teman-teman, kami menyepakati mau diajukan tambahan 400 untuk full di IPMA, mungkin itu Bapak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terima kasih Pimpinan, selanjutnya saya usulan jika tambahan daripada Sekjen ini 85 Miliar, ini minta di *breakdown*, minta disisir Pak, termasuk ke Badan Standarisasi Kebijakan Jasa industri, ini ada BLU nya Pak? PNBPNya? Atau diambil dari Rupiah Murni atau darimana Pak Sekjen?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

PNBP.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Full PNBPNya semua?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Ada rupiah murni juga, kombinasi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Oh, berapa rupiah murninya ini Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Kalau PNBPNya sekitar 150,18.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Mungkin rupiah murninya sekitar lebih kurang 500 yah Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

BLU nya 112, SBN nya 158.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:



Iya, artinya rupiah murni cukup besar, ini dimana pada posisi badan standarisasi dan kebijakan jasa industri ini dalam hal keberpihakan kepada masyarakat terutama sosialiasi terhadap SNI dan yang lainnya, ini minta di *breakdown* Pak, artinya dari badan ini berapa sesungguhnya untuk persoalan kemasyarakatan, terutama di Daerah Pemilihan masing-masing Anggota Komisi VII. Dan yang selanjutnya di BPSDMA dari 994, ini total rupiah murni yah Pak, ini juga Pak, diminta di *breakdown* keberpihakannya kepada masyarakat terutama persoalan yang ada di Dapil.

Kesimpulan dari semua, saya Pimpinan mengusulkan ini anggaran tambahan 287 ini, kalau bisa dibagi 2, jadi 287 sekitar 143 ya ini masuk ke Dirjen IKMA.

Jadi bagaimana Kesekjenan melakukan *exercise* terhadap 287 ini, sehingga bisa menambah lebih kurang 500 *something* untuk di Majelis IPMA, itu usulan yang sedikit berpihak Pimpinan, kalau ada tambahan keberpihakan ya kami mendukungnya. Itu Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Bisa saya jawab Pak?

Dari anggaran yang total 2,917 yang nota keuangan tadi Bapak, tambahan 287 itu sudah *firm*, tapi perlu saya sampaikan dari Dirjen Industri Kecil Menengah yang 400 an, Bapak bisa lihat di *slide* 4, itu jelas 413 sesuai dengan komitmen kita pada saat terakhir konsinyering dimana IKMA 200 milyar untuk teman-teman Dapil, lalu pertanyaan lagi Bapak yang untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sesuai dengan komitmen kita 994, 200 milyar untuk teman-teman Dapil, jadi total sudah 400 milyar dan sesuai kesepakatan pada saat itu.

Terakhir Rapat kemarin Bapak Menteri sendiri menyampaikan apabila nanti ada tambahan sepenuhnya nanti masuk ke IKMA, dengan rincian kegiatan-kegiatan yang mendukung permintaan Ibu Andi Yuli, lalu Ibu Ratna Juwita, dan Bapak/Ibu semua.

Jadi total sudah 400 kami dedikasikan ke teman-teman untuk di Dapil. 200 di IPMA, 200 di BPSDM, jadi total 400 sesuai dengan kesepakatan Konsinyering waktu itu disepakati bersama Bapak Ketua, Ibu Ratna Juwita, dan Pak Maman.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin sedikit Pak, itu kan kesepakatan yang lalu Pak, ini kan usulan baru, kan boleh mengusulkan Pak, masa sekali 5 tahun nggak boleh mengusulkan? Jadi sekali 5 tahun pada posisi menghadapi 2024 ini kan boleh mengusulkan, jadi usulan saya kalau bisa dari 287 itu kita bagi 2 lagi, tambahkan ke IPMA, ini kan kalau bisa Pimpinan, kalau disepakati kita bersama pasti bisa. Saya pikir selesai Pimpinan, terima kasih.



SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Baik Bapak, nanti kita coba bahas.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Ketua intrupsi sedikit, kalau boleh program-program yang mau di gabung bisa dipaparkan Pak.



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Nanti dengan Dirjen IPMA yah Bapak-Bapak, nanti program kedua nanti kita siap lagi Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya supaya kita tahu di Kecamatan mana atau Kabupaten mana.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, Pagunya untuk kita taruh dimana gitu Pak yah, siap, yang penting Pekalongan Pak yah?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya sama Pemalang Kabupaten Pekalongan, banyak Pak Kyai Pak Ustadz semua.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Siap, oke terima kasih Pak. Oke dilanjut Ibu Andi Paris silakan, setelah ini Ibu Ratna Juwita, baru Kang Nasril.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua, semoga Pak Ketua sehat selalu, dan juga seluruh Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VII dan Bapak-Bapak Dirjen, tidak ada Ibu Dirjennya, dan Pak Sekjen juga.

Pak, saya pertama secara umum apa yang disampaikan oleh Pak Nasril tadi, ini Bapak kalau tadi **...(suara tidak jelas 01.19.37)** Bapak mau Jumpalitan kaya apa anggarannya tidak peduli lah, sekarang yang paling penting 2023 ini Bapak fokuskan untuk Dapil Anggota, kita tidak menerima *cash* kok, Bapak juga bikin kegiatan Ilmate saya juga bayar tiket sendiri juga ke Makassar, Dapil saya, bayar hotel saya sendiri juga.

Gini Pak, setelah saya baca ini Pak Dirjen yang di depan, saya minta di *list* dong Pak, Bapak bermitra dengan industri besar apa saja, misalnya logam, apa saja, mekanik apa, farmasi apa, setelah itu untuk mendalami Bapak mau bikin rekomendasi, mau bikin fasilitasi kita bikin FGD dengan mitra-mitra besar perusahaan besar Bapak.

Setuju tidak Pimpinan?



Setuju tidak teman-teman?

Setiap hari FGD, nggak *deng* tiap minggu saja, jadi tolong Pak, nanti Bapak bayangkan bentuk-bentuk pertanyaan saya industri apa nih, seperti logam, karena disini kan saya tadi mencatat misalnya contohnya nih Pak Ilmate, disini walaupun, saya tahu dana Bapak kecil 97, tapi Bapak bisa bermitra untuk mengadakan *Focus Group Discussions* dengan kami misalnya tadi, oh bukan, IKFT nih Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, cari industri farmasi yang besar baik dalam negeri maupun luar negeri, industri tekstil yang besar, bikin FGD dengan kita, karena kan disini Bapak ingin membuat rekomendasi kebijakan itu, cari industri besar, karena disini ada rekomendasi kebijakan terkait penerapan harga gas bumi tertentu untuk industri.

Nah kita bikin rekomendasinya dengan FGD, rekomendasi kebijakan fiskal dan non fiskal sektor industri bikin satu FGD, disini bisa 3 kali FGD untuk industri kimia, industri farmasi, industri tekstil, ini buat Bapak. Begitu juga untuk industri agro, cari perusahaan-perusahaan agro yang besar kita bikin FGD.

Kemudian Pak Dirjen apa Pak? IKFT tadi sudah, Bapak Ilmate juga, iya bukan hanya alkes obat-obatan besar yah, kemudian apalagi disini, karena saya sebenarnya kalau mendengar kata rekomendasi langsung duitnya berapa nih maen-maennya, saya sudah menjadi Anggota DPR dari 2004 Pak, jadi saya sudah tahu mainan yang kaya begini ini, maaf yah Pak yah.

Jadi saya tahu juga profit Bapak kecil, jadi Bapak gandenglah industri besar kita bikin FGD setiap minggu dengan Anggota Komisi VII, Bapak enak, kami juga mendapatkan ilmu dan memberikan masukan kepada Bapak untuk membuat suatu rekomendasi, sebagai narasumber.

Karena kadang-kadang lucu juga misalnya Bapak baru mau bikin neraca komoditas, memang selama ini di Indonesia nggak ada neraca komoditasnya gitu loh? Memangnya selama ini tidak ada rekomendasi peningkatan kinerja sektor industri, baru mau dibikin gitu loh. Jadi Bapak bikin FGD saja lah setiap minggu, panggil deh semua kimia, farmasi, tekstil, makanan, apalagi deh terserah, setuju tidak?

Nah itu mungkin catatan saya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Setuju saya usulannya Ibu Andi, itu namanya *trade off*.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Saya tidak harus Pekalongan saja Pak, saya ngurusin semua Dapilnya teman-teman.

Asosiasi Kompok Listrik, dengan industri senjata, dengan industri, terserah Bapak lah Bapak yang tahu dengan industri mobil, otomotif, semua



terserah, rokok juga boleh, tembakau, industri kimia, apalagi disini mau fasilitasi investor dalam rangka pengembangan **...(suara tidak jelas 01.23.52)**, Metanol di Kutai Timur, ini bukan hanya Kutai Timur saja, secara umum Bapak bisa bikin FGD, kira-kira ke Metanol gede loh pengembangan Metanol apakah secara ekonomis dan lain-lainnya.

Itu mungkin catatan saya, sebenarnya sih tadi banyak ke BPSDM. Tapi nanti siang yah Pak Sekjen, jadi tadi untuk Agro juga, untuk Ilmate juga. Cobalah mulai dipikirkan nanti kita kasih gambaran FGD nya berapa kali mau industri mana saja, terima kasih.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin Pimpinan, baik, terima kasih Pimpinan, *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon maaf ini Pak Mul, tadi kan saya sudah sampaikan, ini saya sudah daftar Pak tadi, dimasukin tadi daftarnya ini ada selanjutnya Ibu Ratna, jadi mohon izin Pak Mul, habis Ibu Ratna Pak Nasir kemudian nanti Pak Mul, silahkan Pak Mul yah, nanti setelah ini yah, oke silahkan Ibu Ratna.

F-PKB (Hj.RATNA JUWITA SARI, S.E, M.M.):

Mohon maaf Pak Doktor, terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Pimpinan, serta seluruh sahabat-sahabat Komisi VII;

Yang kami banggakan Pak Sekjen, para Dirjen, Pak Sesdirjen beserta seluruh jajaran Kemenperin.

Harusnya Pak, harusnya Rapat hari ini saya kira itu lebih bisa *smooth* gitu yah, karena ini cuman penegasan dari komitmen yang sudah kita laksanakan pada saat kita membicarakan pagu indikatif kemarin, tapi ternyata saya juga baru mengerti kalau ternyata ada dinamisasi, ada penambahan dan lain sebagainya yang itu belum kita bicarakan pada saat pagu indikatif kemarin, sehingga tolong Pak Sekjen, Pak Dirjen, serta seluruh ASN yang ada dari Kemenperin memahami, saya pinjam bahasanya Pak Maman, kondisi kebathinan kami para Anggota yang ada di Komisi VII ini.

Kami harus ngomong berulang-ulang padahal seharusnya nggak usah gitu loh Pak, Bapak minta tambahan anggaran *inshaa* Allah kita perjuangkan, tapi itu tadi Pak, kemarin waktu ada pengalokasian, pengurangan dari pihak Pak Dirjen untuk *men-support* ke WUB dan untuk kita menggunakan tambahan



di BPSDM itu saja sudah alot setengah mati Pak, sampai kita harus skors dulu kan, nah sekarang ada info baru tentang penambahan anggaran 287 ini.

Saya secara pribadi dan atas nama fraksi Pak, menyepakati apa yang disampaikan oleh Pak Nasril dan Ibu Andi, walaupun misalnya kita harus *fight* dipenambahan ini, bagi 2, hanya untuk di 2023, persis apa yang tadi Ibu Andi bilang, Bapak 2024 kami tutup mata Pak, kami nggak sempat membahas begini, kami ribut kampanye di Dapil, memperjuangkan kami sendiri, nasib kami ini loh, kami bisa tidak ketemu Bapak lagi seperti ini kaya gitu.

Jadi mohon Pak, untuk yang tahun 2023 ini tolong, kita bantu Bapak, kita bantu Ibu, Bapak/Ibu tolong bantu kita juga, dari semua sektor, bahkan Sekjen saja, coba kita *breakdown* apa nih kira-kira yang bisa kita bawa juga ke Dapil Pak, kalau perlu, apalagi Dirjen-Dirjen yang lain gitu loh, kalau Inspektur Jenderal kayanya sudah tidak mungkin yah Pak, karena untuk operasional saja sudah kurang-kurang begitu.

Tapi saya mohon untuk sektor-sektor yang lain Bapak/Bapak rekomendasi fasilitasi yang itu ada duitnya itu menggunakan APBN murni, *liquid* Pak, bisa lah Pak berarti itu diupayakan, dibentuk bagaimana caranya supaya bisa memberikan kontribusi untuk konstituen kami di Dapil Pak, digarisbawahi yah, mohon maaf, kami kalau nggak terpaksa juga tidak mungkin sepanjang ini.

Ini saking kebutuhan yang sangat amat mendesak, kita kan mitra Pak, kita memahami apa-apa saja garis-garis batas yang harus kita jaga bareng-bareng gitu loh Pak, Bapak dan Ibu pasti juga paham bahwa apa yang kami perjuangkan ini kan bukan untuk kami Pak, ini untuk konstituen yang ada di Dapil kami masing-masing, dari Sabang sampai Merauke Pak.

Dan kalau ini bisa terlaksana dengan baik, Bapak/Bapak, Ibu/Ibu sebagai birokrat yang ada di Kemenperin juga mendapatkan nama bahwa Kementerian Perindustrian telah bekerja, bisa menyentuh masyarakat, bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, begitu Bapak/Bapak.

Jadi kami mohon Pimpinan, walaupun ini nanti tidak bisa tercapai kesepakatan di forum, kita harus masuk di *cubicle* lagi, yaitu berarti harus kita laksanakan Pimpinan, sebelum ada kesepakatan bersama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Tharieq.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Waalaiikumsalam.



Terima kasih Ibu Ratna Juwita, jelas itu Pak, jadi memang beban kita ini hanya untuk tahun depan, 2024 kita sudah tidak tahu lagi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Saya interupsi saja Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Ini diputuskan kalau sudah jelas program-program di Dapil gitu saja, kalau nggak jangan diputuskan, terima kasih Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, jadi sekali lagi Pak Sekjen, kami mohon juga, ini kita *firm* untuk ke 2023 ini kira-kira apa, lebih focus kepada apa yang bisa nanti bawa ke Dapil. Ini saya lihat masih ada antri Pak Nasir sama Pak Mulyanto yang akan bertanya, setelah itu mungkin saya akan skors dulu yah, supaya ini *clear* apa yang kita apa, ini tidak usah banyak tanya yang penting 2023 kita aman ini, apa ini yang bisa kita bawa ke Dapil kurang lebih begitu yah, setuju yah, cocok yah.

Oke, setelah Pak Nasir, kemudian Pak Mulyanto, sehabis itu kita skors yah, terima kasih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII;
Teman-teman Anggota Komisi VII;
Pak Sekjen dan seluruh jajaran Dirjen yang hadir.

Mungkin saya ingin melakukan pendalaman saja untuk anggaran Pak Sekjen Pak, ini kan pagu anggarannya 308 miliar, tapi disini ada kegiatan prioritas nasional, coba ini bisa di *breakdown* tidak Pak, apa saja isinya, terus kegiatan non prioritas nasional itu apa 81.

Setahu saya kan begini, Sekjen ini kan tidak ngurusin urusan-urusan program gini gitu, tapi makanya kami mau tahu apa sih yang hampir 187 miliar



ini, kurang lebih lah. Nah terus ini *breakdownnya* mana? Kalau tadi belanja pegawai oke, belanja operasional okelah, belanja non operasional ini yang mau kami lihat apa sih isinya.

Setahu kami, kami ingin minta perincian ini dulu Pak Sekjen, yang menjadi kegiatan prioritas nasional ini apa gitu, ini apa seharusnya kan ada di Dirjen-Dirjen ini, tapi kok Pak Sekjen ngurusin program prioritas nasional ini mungkin minta tolong dijelaskan, izin Pimpinan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Izin Bapak Pimpinan.

Pak Nasril yang terhormat;
Bapak dan Ibu semua Anggota Komisi VII DPR RI.

Di Sekretariat Jenderal memang kalau di tempat lain mungkin *supporting*, tapi di kami ini ada 3 pusat yang menangani substansi, 1. Pusat pembinaan industri halal, 2. Pusat data industri, 3. Pusat pengembangan produk dalam negeri (P3DN). Yang satu Pusdatin lebih sepenuhnya *supporting* untuk Kementerian.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pusdatin ini eselon berapa Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Eselon II, Pusat industri halal Eselon II, Pusat Pusat pengembangan produk dalam negeri.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, aneh ini berarti Pak Sekjen, ini Bapak kurang kerjaan kalau menurut saya, iya Bapak ini kan harusnya mematuhi regulasi kementerian saja, kepegawaian, mindahin orang, naikin pangkat.

Setahu saya itu, tugas Sekjen di Kementerian manapun sama, nah teknisnya itu harusnya di Dirjen Pak, nah ini nanti pertanggung jawabannya kalau Bapak bentuk lagi, harusnya ini kan Eselon II ini sama kaya seperti Seditjen dong.

Nah ini pertanggungjawabannya ke Bapak nah fungsinya tabrakan menurut saya, yang Bapak kerjain ini ada di IPMA, ada di Dirjen-dirjen lain gitu lho, nanti pas ada izin yang harus Bapak keluarkan mereka belum sepakati, ini tekanan Bapak kuat ke mereka.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):



Izin Bapak, ini pertama garis lurus nya harus sampai ke Bapak Menteri, satu, kedua, kenapa ini ada disini?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sama Pak Sekjen, ini Dirjen semua tanggung jawabnya ke Menteri.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Tidak, ini jadi tidak langsung ...(suara tidak jelas 01.35.16), ini langsung Bapak Menteri saya hanya ...(suara tidak jelas 01.35.19) saja.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sudah cukup Pak, Pak Presiden itu bentuk umpamanya SKK, itu langsung ke Presiden, harusnya mereka Kepresidenan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Jadi saya jelasin sekali lagi Pak, jadi kedua ini karena lintas sektor, lintas sektor semua tematik, jadi kalau misalnya P3DN dia bisa melayani Ilmate, bisa melayani Agro, bisa melayani IKN, bisa melayani KSD?

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, tapi kan ini sudah ada di sistem mereka, di Dirjen lain, Apa intinya coba Bapak jelaskan ini.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Sertifikasi TPDN.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

...(suara tidak jelas 01.36.01) pembelanjaan untuk APBN.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Lintas sertifikasi kok Bapak minta anggaran, ngapain?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):



Karena ini untuk fasilitasi untuk, yang tadi Ibu Andi tanyakan untuk salah satunya adalah mendukung industri-industri kecil yang dilakukan dengan APBN saat.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Begini Pak Sekjen, Pak di Kementerian Perhubungan waktu saya di Badan Anggaran, kita memberikan ke Sekolah Curug itu, sekolah curug kita berikan pembiayaan, tapi gitu mereka mereka melatih dan menyekolahkan anak-anak yang baru jadi pilot, itu dibeli dengan negara-negara lain 1 orang 500 juta, satu anak yang ada di Curug itu dibayar dengan negara lain untuk dipakai menjadi pilot itu dibayar 500 juta Pak, Bapak keuntungannya apa kalau ini anggarannya Bapak minta lagi? Wong kita ngeluarin sertifikat kok kita ngeluarin anggaran, ini terbalik, tidak ada manfaatnya Pak gitu loh.

Saya tidak setuju ini Pimpinan, karena sudah ada programnya di Dirjen-Dirjen yang lain, ini tumpang tindih anggarannya Pak, tidak bener ini Pak Sekjen kalau gini.

Saya minta ini dibedah saja, kita minta rinciannya 180 sekian ini, saya minta ini tidak usah disetujui dulu, kita minta dulu perinciannya, ada nggak anggaran di Dirjen-Dirjen lain, ada nggak ini fungsinya di Dirjen-Dirjen lain, kalau ada Pak, kalau mereka yang harus mengeluarkan biar saja Dirjen yang ngeluarin, kan toh pemasukan negara.

Harusnya perusahaan-perusahaan yang minta sertifikat itu membayar kepada Kementerian, bukan kita yang ngeluarin anggarannya Pak.

Setahu saya kementerian ini memberikan perbaikan mesin-mesin kepada perusahaan-perusahaan, dulu anggarannya itu sampai kita pinjam dana *loan* itu Pak, 2024 itu dana *loan* dikeluarkan besar-besaran untuk memperbaiki semua industri di Indonesia, itu dananya dari perindustrian, bukan seperti ini, saya nanya ini uangnya kalau cuma Bapak bilang pembiayaan untuk pengeluaran sertifikat kita kasih.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Izin.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silahkan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):



Jadi sertifikat P3DN ini hanya untuk industri kecil, dan dilakukan oleh *Surveyor Independent*, sedangkan untuk industri besar itu *full* bayar masing-masing.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

...(suara tidak jelas 1.36.37)

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kalau cuma itu yang Bapak minta, tadi disampaikan Bu Zul sudah jelas, kita minta untuk FGD perusahaan besar, kita minta dari Dapil kita dididik oleh mereka, mereka mau, dengan ...(suara tidak jelas 1.38.55) ini Pak, ini bisa diberikan, apa gunanya kalau kita memberikan fasilitas kepada mereka, toh kita yang ngeluarin biayanya, apa manfaatnya gitu?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Kalau ke industri besar tidak ada difasilitasi sama kita Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh iya kita bisa memberikan masyarakat kita untuk dididik oleh perusahaan itu pun bisa Pak, seperti saya sekarang ...(suara tidak jelas 1.39.18) 100 orang masyarakat, dididik, oh iya Pak saya jadikan honor disitu siapa tahu kami terima sebagai pegawai, bisa, sertifikatnya dikeluarkan, uangnya uang mereka kok.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Ini untuk industri kecil sekali lagi Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sama saja Pak, industri kecil yang seperti apa, Bapak jelasin, uangnya darimana mereka untuk membangun industri kecil itu? Apa yang akan dibuat?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Sertifikasi Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kok sertifikasi, untuk apa sertifikasi-sertifikasi nggak jelas ini, ini 180 miliar Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Tidak 187 Pak, LP3DN hanya 40 miliar.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh iya untuk apa?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Untuk sertifikasi Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya untuk apa Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Untuk mensertifikasi kandungan lokal untuk industri kecil.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya apa yang Bapak contohkan, coba apa industrinya? Kita datangi satu per satu, mana industrinya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Contohnya yang 40 milyar itu sekarang ini untuk **...(suara tidak jelas 1.40.22)** seperti ini Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Apa yang Bapak mau berikan seperti itu? Tidak jelas ini sudah, tidak, untuk apa Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Sekarang belanja pemerintah APBN, APBD yang.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

...(suara tidak jelas 1.40.35) Bapak ini, masa industri harian pun pakai sertifikat, apa ini Pak?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Ada **...(suara tidak jelas 1.40.41)** Bapak, ini yang jadi nanti pada **...(suara tidak jelas 1.40.40)** Pemerintah kita sudah menyusun dengan BPKP sedang mengisi aturan sehingga industri kecil itu bisa mendapat fasilitas sertifikasi.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya Fraksi Demokrat tidak setuju dengan anggaran 180.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Karena ini sudah program.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya tidak setuju Pak, tidak jelas ini anggarannya, sudah itu saja, saya minta lebih bagus dialokasi melihat barang saja, apa yang mau dibelikan, itu saja Pimpinan.

Kalau begini konsepnya ini bohong-bohongan semua, tidak benar ini Pak Sekjen, apa ini 180 ini? **...(suara tidak jelas 1.41.19)** kita minta seperti yang diminta Ibu Andi tadi, kita panggil saja FGD semua perusahaan ini untuk mengeluarkan sertifikasi, apa saja makanan mereka, bisa, dan mereka punya keahlian, apalagi Bapak mau ngeluarin sertifikasi itu Pak, menghasilkan uang, bukan mengeluarkan uang, itu namanya sertifikasi.

Ini apa-apaan gitu loh, kok kita yang ngeluarin uang gitu loh, wong masyarakat bukan butuh ini kok, tidak benar gitu loh, kita tidak setuju ini anggarannya, kalau Bapak buat program jadi gini Pak, kita punya beberapa Kementerian di Komisi VII, tidak ada Sekjen ngurusin hal yang seperti ini, kemarin Sekjen di Kementerian ESDM itu mengurus lelang saja kita minta balikkan ke yang bersangkutan masing-masing, karena mereka yang bertanggung jawab atas anggaran masing-masing.

Ini apa Bapak urusannya Rumah Tangga kok, Bapak ngurus-ngurusin yang kaya gini? Tidak benar gitu lho, tidak bisa Pak Sekjen, regulasi apa Bapak bentuk lagi satuan kerja disitu, apa-apaan gitu lho, padahal satuan kerja itu ada di Direktur masing-masing juga, harusnya apa kepentingannya gitu loh?

Regulasi apa yang Bapak bentuk gitu loh, nomenklatur apa? Ini uang sampai 180, tidak jelas ini, belanja prioritas nasional, apa? Saya tanya isinya apa Pak Sekjen? Mana bisa Bapak buat-buat ini uang? Ini kan bukan uang Bapak pribadi, makanya Irjennya *slow-slow* terima setorannya saja mungkin duduk saja, yang penting orang ini lapor, coba Irjennya suruh jalan pasti jadi temuan semuanya, harusnya Pak Irjen ada temuan yang begini-begini, apa ini gitu loh, masa orang jual sertifikat ngeluarin biaya, saya baru belajar disini.

Kita Pak, ngasih anggaran waktu di BRIN itu **...(suara tidak jelas 1.43.47)** itu nanti akan dibayar sertifikat melalui perusahaan-perusahaan besar ratusan miliar, boleh, itu baru benar, anggaran yang dikeluarkan negara menghasilkan uang, ini kok Bapak ngeluarin uang, kebalik jadinya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):



Sekali lagi Bapak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Saya tidak setuju Pak, sudah itu saja, kita coret ini, kalau Bapak tidak bisa jelasin apa manfaatnya buat Dapil kita.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Oh sangat bisa Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Oh iya, Pak Sekjen

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Tunggu dulu Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sebentar saya masih bicara, anda tunggu saja, bukan anda yang ngatur saya disini. Pak, azas manfaat dari anggaran ini yang mau kita ambil, bukan Bapak gunakan anggaran ini sesuka hati Bapak, satuan kerja yang Bapak bentuk tadi, karena Ilmate itu mengawasi seluruh.

Izin, coba fungsimu apa coba jelasin. Ini juga Agro *enggak* ada manfaatnya, jadi fungsi dia diambil semua sama Pak Sekjen, Direktur Jenderal Industri Agro apa yang anda kerjakan coba, berapa anggaran yang anda kelola, buat apa coba.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih Pak Nasir, jadi kami di Agro itu mempunyai Tupoksi tugas dan fungsi yang pertama adalah terkait dengan penyusunan konsep kebijakan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Anda ngurusin Pemerintah atau ngurusin perusahaan mereka? Itu saja coba jelasin.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya, itu yang kenapa kebijakan ini penting karena bagaimana kita mengembangkan industri baik itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan industri yang berbasis Agro Pak.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Industri makanan ini ada tidak Bapak?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Kalau yang industri makanan ini, ini ke industri kecilnya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Siapa yang ngurusin?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ibu Dirjen Bu Reni, nanti sore nanti. Nah kalau kami lebih pada kebijakannya, yang kedua itu memfasilitasi, yang memfasilitasi memang itu adalah bagaimana kita mendampingi industri, membantu agar dia ada investasi seperti umpamanya...(suara tidak jelas 1.46.49) untuk furniture dan pengolahan kayu Pak, dan kita juga mengembangkan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Furniture saja?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Dan pengolahan kayu.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Furniture dan pengolahan kayu saja? Terus industri yang lain-lain tidak?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Semuanya kita yang atur.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Oh, berarti seluruh industri lah.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Untuk yang terkait dengan Agro.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus berapa anggaran negara yang Bapak gunakan?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):



Kalau kami mendapat alokasi itu 76,6 miliar Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus belanja modalnya Pak?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Belanja modalnya Pak, ini sekitar 14 miliar.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Buat?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Itu yang pertama untuk restrukturisasi permesinan untuk *furniture* itu 9 miliar.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus sisanya?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Jadi yang mau investasi mengerjakan mesinnya itu dikasih insentif untuk menanggulangi guna uangnya, sehingga dia mau berinvestasi memperbaiki permesinannya. Yang kedua adalah untuk beberapa tempat Pak, yang kita adakan pusat untuk bahan baku industri, kalau yang di *furniture* kita bantu untuk menyiapkan, jadi yang menggunakan, jadi pusat bahan baku ini akan menyiapkan bahan baku yang mudah diperlukan oleh industrinya, jadi tidak setiap pembelian peralatan yang sama untuk jenis potongan-potongan kayunya.

Dan juga kami itu yang itu namanya mengembangkan *Make Collective Away* Pak, jadi bagaimana mendigitalisasi tempat penyetoran susu, karena itu sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitasnya Pak, karena dengan program ini kita bisa menurunkan kontaminan dari.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini kan ada 27 miliar Pak, buat apa?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):



Iya, 27 miliar ini itu disana sudah kami bagi-bagi Pak, yang untuk yang di industri hasil hutan dan perkebunan itu ada untuk neraca komoditas, jadi ...(suara tidak jelas 1.49.22) terkait dengan pengusulan dan verifikasi perusahaan-perusahaan mana yang membutuhkan bahan baku kertas dari bahan kertas bekas, yang satunya adalah untuk pusat logistik *furniture* Pak, dan yang sebelahnya ini adalah untuk yang tadi kami bilang restrukturisasi industri. Yang di ...(suara tidak jelas 1.49.56) yaitu bawahnya di halaman 4 ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini neracanya kok dua kali Bapak buat?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ada yang di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, ada yang di Direktorat Makanan Hasil Laut dan Perikanan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Minta *breakdownnya* saja deh Pimpinan, biar *clear*.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Siap.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kita minta perinciannya terus daerahnya mana saja ini Pak.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Kalau itu sebenarnya di lampiran ada Pak, di lampiran ada lengkap itu apa yang disasar, lokasinya dimana saja, di lampiran Pak, itu kami sudah semua tambahkan disana dan apa yang rincian-rincian kegiatannya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Adanya di Provinsi mana saja?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Itu kalau umpamanya Pak, contohnya, untuk perbaikan untuk susu.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini dimana Jawa Tengah?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):



Halaman 10 nomor 1, itu ada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Malang. Itu yang halaman 10 Pak Nasir, kalau yang nomor 2 nya itu menyeluruh Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini kalau di Kabupaten saya ada peternakan sapi perah nggak bisa?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Bisa Pak, nanti kita coba diskusikan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya dimasukan lah.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Ini kemarin karena sistemnya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh iya kan Pak, Ultra itu kan adanya di Sumatera Utara benar kan?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Iya benar.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tapi Bapak nggak masukan disini, apa perbedaannya gitu lho?

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Nggak ada perbedaannya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ya masukan dong, di Riau itu ada, di Kabupaten Pelalawan, itu ada Pak, itu meningkatkan untuk gizi lagi, mengasih susunya setiap pagi ke anak-anak sekolah, jadi Bapak harus *clear* gitu lho, jangan ini saja. Ini mungkin saya setuju tadi Pimpinan, kita skors dulu supaya kita nanya nanti yang Pak Sekjen ini kita minta rinciannya mana, kalau nggak kita pindahkan anggarannya ke IKMA saja, daripada disana tidak ada manfaatnya nanti. Gitu Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Ijin. Pada saatnya mesti *win win solutions* Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Win winnya kalau jelas Pak.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Jelas ini jelas.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kalau Bapak tadi 180 itu kita bagi dua, oke setuju kita.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

187 bukan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Eh 287 bagi dua.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Itu tambahan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya harus gitu daripada Bapak mubazirkan dananya itu disitu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Kan dengan **...(suara tidak jelas 1.52.02)**... sebagian itu.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya sama saja, Bapak kasih saja 10 miliar cukup, selesai, nah ini kita kelola, itu saja.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Oke.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Sama dulu Kementerian Kehutanan beli helikopter, tapi kita lihat nggak mungkin gitu, nah kita drop pak **...(suara tidak jelas 1.53.16)**, nah ini kita belikan sepeda motorsampam untuk masyarakat, sama ini bagus kita beli, apa yang kita cocokan untuk disini gitu.



Mungkin 1 Anggota bisa bawa 1.000 masyarakat untuk dilatih, kan monggo biayanya berapa gitu, atau 2.000, yang ngomong ini 2.000 iya kan Pak? Nah gitu, iya, gitu Pimpinan, jadi kita bahas dulu yang 287 tadi, kita bedah, kalau nggak ada yang bermanfaat disitu kita pindahkan anggarannya ke tempat lain, itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke terima kasih Bang Nasir, intinya semua ini kalau dari tadi saya rangkum teman-teman ini juga pikir yang seperti saya sampaikan tadi, apa kira-kira yang bisa kita fokuskan untuk program-program kita di Dapil Pak, jadi tolong ini nanti di waktu yang kita skors nanti tolong dibikin betul-betul konkret apa yang ini, kalau kita tidak mungkin kita bicara masuk ke dalam satuan 3, kita tidak mungkin untuk bahas itu, cuma poinnya adalah program konkret untuk kebutuhan kita semua teman-teman di Dapil.

Terakhir Pak Mulya, silahkan Pak.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Baik Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Sekjen tolong dibuka halaman 5 Pak, ditayangkan teman-teman presentasi Pak Sekjen halaman 5. Apakah bisa ditampilkan? Terkait alokasi tambahan anggaran dalam pagu anggaran kementerian tahun 2023. Ini dia, Pimpinan, ini penawaran saya terhadap anggaran dan pembicaraan-pembicaraan kita dalam serial pembahasan, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan seterusnya sampai hari ini.

Jadi **...(suara tidak jelas 1.55.27)** yang pertama, sebelumnya kita bahas di ruangan ini juga yakni pagu indikatif sebesar 2,062 triliun, kita ngotot-ngototan, Pak Nasir juga ngotot-ngototan sama Pak Sekjen, Pak Sekjen ngeyel-ngeyel juga, seru yah, makanya saya usul sama Bapak Wakil Menteri yang ada disini, Pak Wakil Menteri tolong diganti saja ini Pak Sekjen **...(suara tidak jelas 1.55.57)**, ganti saja Pak, dulu saya juga mau jadi Sekjen, saya mau jadi Irjen.

Kalau dengan teman-teman DPR jangan ngeyel-ngeyel kaya gini lah yah, ada waktu yang bisa kita detailkan, didengarkan dengan baik aspirasinya, lalu nanti dirumuskan pada waktu yang tepat, jangan **...(suara tidak jelas 1.56.19)**, saya masih ingat Pak Bambang itu ngusir Pak Direktur Krakatau Stell waktu itu, **...(suara tidak jelas 1.56.17)** malah ngusir Dirut Freeport, masa saya PKS ingin ngusir Pak Sekjen? Gak enak PKS, PKS itu biasanya santun, santun-santun tapi bisa jadi tidak biasa melihat gayanya yang ngeyel kaya begini yah, ngeyel-ngeyel males saya **...(suara tidak jelas 1.56.45)**.



Saya juga pengalaman jadi Sekjen di Kemenristek, Irjen pengalaman saya Pertanian, tahu lah tipu-tipu begini yah, sudah sama-sama paham, cuma kalau perlu kita bicarakan kita ngurusin orang juga di kementerian kan, nggak usah lah kita pembahasan yang seperti itu, kita langsung saja yang kongkrit-kongkrit.

Pagu indikatif kita 2,067 triliun, kita sudah bahas kita dalam kemarin, kita rumuskan, di IKMA ...(suara tidak jelas 1.57.22) akan dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, satu, di DPR RI kita alokasikan 200 miliar untuk masyarakat, betul? Sekarang pertanyaannya dari 287 tambahan, tambahan kita bicara, harusnya nambah juga yang 400 tadi kan, 200-200 harusnya tambah lagi.

Nah dari 287 itu 108 miliar untuk mana Pak? 78 untuk pertumbuhan pengembangan desa baru IKMA kan, harusnya berarti 200 tambah 78 Pak Nasir, harusnya, nah nanti setelah *break* akan dialami, tidak usah heran nanti dialami ini pastinya, begitu juga dengan pendidikan RDF.

Yang berikutnya, logika berikutnya, ini angin segar yang dibawa oleh Bapak Pimpinan kita, *inshaa* Allah nanti siang akan dipastikan, akan ada tambahan ...(suara tidak jelas 1.58.45) 400 miliar diluar itu semua kan begitu.

Nah itulah bicara sama Ibu Andi, jadi mohon saya mengusulkan Pimpinan, di ruang yang terhormat ini kita bisa membahas lebih elegan, sementara yang sulit-sulit, yang rinci-rinci kita bisa dalam lah di forum yang tepat setelah *break* ini, *insha* Allah ada Pak Nasir dan Ibu Tanti yang sangat telaten terhadap hal itu.

Mudah-mudahan Bapak Wakil Menteri kita Pak Bambang hadir dan mendengarkan ini dan diusulkan kepada Pak Menteri suara saya. Demikian barangkali Pimpinan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi 1 menit Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Mul.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Intinya dari yang saya sampaikan tadi, nomenklatur yang Eselon II yang ada di Pak Sekjen tadi harus dihapus dan semua anggarannya diserahkan kepada Dirjen yang berfungsi, yang ada fungsinya disitu, jadi tidak ada Sekjen



itu membuat pengelolaan anggaran itu ngga ada selain urusan Rumah Tangganya.

Jadi kita sepakat disitu dulu, jadi nggak boleh Sekjen ini mengelola anggaran teknis, karena bukan itu tugasnya Sekjen, izin Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya terima kasih Pak Nasir sebagai masukan, mudah-mudahan juga dalam setelah skors nanti kita dapat *win win*, kita dapat jalan keluar untuk, intinya apa yang disampaikan teman-teman tadi adalah apa yang bisa kita kondisikan di 2023 ini untuk kondisi kita di Dapil masing-masing, itu poinnya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin Pimpinan, jadi untuk ini ada *...(suara tidak jelas 0.00.31)* kalau nggak salah, tolong lah Pak nanti di dalam mengalokasikan anggaran dalam tahun 2023 paling kurang ada 4 kali sosialisasi masing-masing Direktorat Jenderal di Dapil masing-masing Anggota, kan *...(suara tidak jelas 2.00.48)* kita juga ya Pak untuk konstituen dan mereka juga senang kalau ada *...(suara tidak jelas 2.00.53)* tentang industri pangan misalnya, di Dapil saya banyak ketika mereka bingung SNI nya bagaimana gitu kan mungkin kerjasama. Kemudian industri farmasi, tekstil, misalnya di Dapil saya ini Pak sekarang, tapi Bapak mungkin industri tekstil besar yah? Besar apa kecil juga?

Besar semua?

Apalagi itu bikin FGD tadi, nah ada 2 yang harus disosialisasi, jadi 1 tahun 4 kali sosialisasi di Ilmate, di logam, dialokasikan saja Pak, cuma betul-betul harus sering keluar, jangan main-main lah Pak, karena kan saya ngitungnya nanti sangat detail sekali, bahwa kita 4 kali sosialisasi berapa Bapak alokasikan masing-masing Anggota kunjungan. Ya Pimpinan terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Ibu Andi, oke, setuju yah ini kita akan skors, saat ini waktu Jam 12.35, kita kembali lagi kita skors 1 Jam sekalian makan siang Isoma, kembali lagi nanti jam 13.35, setuju yah Bapak/Bapak, waktu saya skors, Rapat saya skors dulu, terima kasih.

Wabillahitaufik Wahidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

.....(tidak terekam)

(SKORS RAPAT DICABUT PUKUL 14.25 WIB)

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

...dari industri maupun faktor ekonomi lainnya terkait dengan IKM penguatan struktur industri nasional, kemudian yang terakhir IKM mampu menciptakan kesempatan kerja yang luas, kemudian kami menerapkan ruang lingkup dalam ...(suara tidak jelas 00.20) tersebut ada 3, yaitu perumusan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Jadi program di IKMA terkait dengan peningkatan daya saing dan juga penumbuhan populasi tersebut lingkup kegiatan ataupun programnya ada di 3 tersebut.

Kemudian yang patut menjadi catatan juga untuk kita bahwa ada amanat peraturan lainnya yang harus diakomodir di dalam tiap kegiatan Ditjen IKMA.

Pertama ada Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional, kemudian ada juga Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Pada Kawasan Perbatasan, kemudian ada yang terakhir kami juga ...(suara tidak jelas 01.14) untuk Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dengan kegiatannya adalah penumbuhan wirausaha baru.

Terkait dengan pertumbuhan wirausaha baru, kami menerapkan program yang pertama basic programnya ini diperuntukkan bagi calon wirausaha yang memiliki jiwa kewirausahaan di sana ada wirausaha baru berbasis santripreuner.

Kemudian wirausaha baru daerah potensial, daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana juga kami ada kegiatan program wirausaha baru sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya.

Sementara kami juga menjalankan akselerasi program ini bagi wirausaha yang inovatif dan sudah mulai merintis usahanya, ini kami melakukan kegiatan yang sifatnya kompetisi ataupun *awarding*.

Untuk yang berbasis pangan, kami menjalankan kegiatan IFI (*Indonesia Food Inovation*) kemudian untuk yang berbasis *startup* kami juga menjalankan program *startup for industry*, kemudian ada juga dalam menjalankan program yang *sustainability* ada di balai kreatif industri center atau ...(suara tidak jelas 02.38).



Kemudian ada juga pendampingan bisnis teknologi alas kaki. Di sini kami juga menjelaskan terkait dengan program peningkatan daya saing IKM yang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di IKM terkait dengan, yang pertama bahan baku dan juga bahan penolong.

Terkait juga dengan teknologi sarana dan prasarana produksi, kemudian kualitas produk dan keahlian ~~...(suara tidak jelas 03.10)~~ sumber daya manusia ~~...(suara tidak jelas 03.13)~~ kemudian juga terkait dengan peningkatan akses pasar.

Di sini kami melakukan kegiatan yang pertama pasti perbaikan dalam fasilitas teknologi melalui kegiatan restrukturisasi mesin dan peralatan, termasuk didalamnya ada fasilitas ~~...(suara tidak jelas 03.32)~~, kemudian sampai dengan kami juga membangun basis data untuk IKM, kita kenal dengan ~~...(suara tidak jelas 03.39)~~.

Selanjutnya kita mengacu kepada program kegiatan, mengingat target di rencana strategis tahun 2023 terkait dengan industri kecil menengah dan aneka, kami mencoba di sini melihat ada beberapa programnya.

Yang pertama, ada beberapa target maksud kami. Yang pertama, laju pertumbuhan ~~...(suara tidak jelas 04.11)~~ IKM ditargetkan di tahun ini 6,6 %, kemudian penerapan ~~...(suara tidak jelas 04.21)~~ Indonesia 4.0 dimulai dari ~~...(suara tidak jelas 04.23)~~ ada target 3.000 IKM, kemudian terhadap IKM tersebut, kita ~~...(suara tidak jelas 04.31)~~ targetnya 800 IKM dan juga ada target beberapa IKM dalam hal ini 9 IKM yang sudah menerapkan teknologi 4.0 di lini produksinya.

Kemudian yang ketiga, kami mengacu ke target ~~...(suara tidak jelas 04.48)~~ untuk tumbuh dan berkembangnya IKM *startup* berbasis teknologi, ada 40 IKM. Kemudian WUB yang tumbuh ada 5.400 wirausaha baru, kemudian IKM yang melakukan kemitraan baik dengan industri besar, sedang dan sektor ekonomi lainnya sejumlah 40 IKM. Kemudian penguatan sentra di 40 sentra dan juga restrukturisasi mesin peralatan di 86 IKM.

Selanjutnya pengembangan dan sertifikasi produk untuk 1.300 IKM, kemudian promosi dan pameran 120 IKM, klinik HKI yang memanfaatkan 300 IKM, kemudian klinik kemasan yang kami fasilitasi juga 300 IKM.

Kemudian ada target untuk ~~...(suara tidak jelas 05.44)~~ industri aneka 35% di akhir tahun 2023. Kemudian ada target peningkatan restrukturisasi sektor industri aneka menjadi 71,89% dan juga nilai investasi serta industri aneka sejumlah Rp9,07 triliun.

Bapak/Ibu.

Mohon izin kami menyampaikan kegiatan prioritas nasional ataupun untuk ~~...(suara tidak jelas 06.13)~~ tahun 2023 berdasarkan Ditjen, pagu anggaran di Ditjen IKMA sejumlah 320,17 miliar.

Ini kami sampaikan yang pertama ada indikatif, jadi usulan kami untuk sentra Bapak dan Ibu bisa melihat di sana sentra IKM, tadi kami berbicara mengenai targetnya sesuai dengan **...(suara tidak jelas 06.43)**.

Kemudian kami mengusulkan, untuk indikatifnya 18,6 miliar dengan 40 sentra kemudian, disetujui 8,8 miliar ini, jadi kita *output* nya sebanyak 16 sentra, kemudian juga untuk yang wirausaha baru **...(suara tidak jelas 07.07)** usulan ataupun juga indikatifnya 42,7 miliar untuk menumbuhkan 1.940 wirausaha kemudian juga ada penyesuaian WUB ini menjadi 205,19 miliar, otomatis ini menambah *output* nya sebanyak **...(suara tidak jelas 07.28)**

Jadi Bapak dan Ibu bisa mengamati di sini dari usulan indikatif, kemudian juga menjadi pagu yang tetap adalah kami mengoptimalkan untuk **...(suara tidak jelas 07.44)** dari klinik kemasan untuk IKM kita.

Begitu juga untuk klinik HKI dan juga *startup* walaupun indikatifnya berupa pagunya lebih kecil dari usulan yang disampaikan tetapi *output*-nya tetap 40 *startup* yang ingin kami tumbuhkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan teknologi, baik itu di IKM ataupun di industri besar.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Coba disebutkan usulan awal **...(suara tidak jelas 08.22)** kesekjenan berapa.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau untuk yang WUB ya Pak ya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Usulan total ya Ditjen IKMA **...(suara tidak jelas 08.33)**

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau di sini Pak, kebetulan tidak kita sampaikan Pak, karena memang usulan pertama kita kalau nggak salah ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian waktu kita RDP pertama ada penambahan dari beberapa unit eselon I **...(suara tidak jelas 08.50)** kemudian ada penambahan itu juga kami melakukan optimalisasi internal jadi keluar angka 112 kalau nggak salah **...(suara tidak jelas 09.03)**

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Yang saya maksud tuh usulan anggaran Dirjen IKMA yang **...(suara tidak jelas 09.07)**

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):



Di *slide* 12 ini jadi yang saat ini setelah ada penambahan kemudian ada tambahan 78 miliar setelah Bappenas sejumlah 287 ya Pak, 278 kemudian 78-nya di inikan ke IKMA. Kemudian tambahan 32 atau 33, 33 ya, 33 kemudian juga ada tambahan 78 dari 278, 287 kemudian kami melakukan pergeseran ataupun bahasanya optimalisasi internal untuk mencapai angka 200 miliar terhadap program pertumbuhan wirausaha baru di daerah potensial, seperti itu Pak.

Jadi sekarang 401,413 miliar untuk pusat 337 miliar, kemudian

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Interupsi Pimpinan, Bu Dirjen kami ingin mendapatkan kepastian saja tambahan anggaran, DIPA pagu anggaran **...(suara tidak jelas 10.33)** hasil nota keuangan untuk IKMA itu 78. Nah itu apakah menjadi 200 ditambah 78 menjadi 278 untuk daerah potensial **...(suara tidak jelas 10.48)**

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Sebenarnya itu ada di ini tadi yang jelas Pak Mul. Iya itu ada di kesimpulan rapat tanggal 15 Pak Mul, di situ dibunyikan dari 337 itu untuk program ya di tadi mana itu kesimpulan rapat tanggal 15, itu di sini 112 ditambah 78 jadi 190, ditambah lagi di **...(suara tidak jelas 11.29)** dibuletin.

F-PKS (Dr. H. MULYANTO, M.Eng.):

Jadi 200 itu sudah final?

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Jadi pertanyaan Pak Mul ada di *slide* 14 Bapak-Ibu, jadi di *slide* 14 ini

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, Bu Dirjen yang perlu lampiran dari program ini langsung program-program di daerah-daerah untuk rakyat, daerah pemilihan. Ini kalau saya bedah ini banyak salah Bu, cuma kita nggak bedah lah yang penting langsung jelas saja lampirannya apalagi tadi anggaran Sekjen kalau saya mau bedah di lebih ini, sampai kuantitatif detail bisa saya bedah itu dari Pak Sekjen, lebih ini dari pada Pak Nasir. Cuma kita nggak, kalau saya sekarang kita yang penting ke rakyat itu langsung ya Pak Sekjen ya, jangan lupa kabupaten-kabupaten Pekalongan, itu disisain sedikit.

Jadi langsung itu aja Bu, langsung lampirannya langsung di paparkan disini, program Dapilnya Sulawesi Tengah 3 misalnya ini, ini, ini gitu aja sebagai lampiran supaya kita tinggal oke nantinya.

Terima kasih Pak Ketua.



ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Bu Dirjen mungkin mungkin lebih ditekankan yang 200 itu kegiatan apa saja karena yang untuk Dapil kan itu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Jadi tadi yang kita sudah bicara yang 200 ya Pak, 200 ini nanti ada penambahan 112 ditambah 78 itu emang 190, jadi 10-nya kami ada pergeseran internal di IKMA-nya, jadi angkanya 200 seperti itu Pak. Jadi dengan angka 200 miliar ini target kita tumbuh 9.090 wirausaha baru.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Pimpinan, ini besok Sekretariat duduk yang disana itu Anggota, yang kementerian di sini, ini terbalik, ini kita terbalik-balik kita jadinya Bu...*(suara tidak jelas 13.44)* jadi kita memandang Bapak-bapak ini dari tadi gitu Pimpinan.

Terima kasih

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Luar biasa Pak Nasir ini.

Dipersilakan Ibu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Adapun kegiatan penumbuhan wirausaha baru yang potensial ini kami membaginya menjadi ada bimbingan teknis di sana, kemudian ada fasilitasi mesin dan peralatan ini hibah melalui Dinas Perindustrian Kota ataupun Kabupaten kepada kelompok usaha bersama pesertanya.

Jadi tujuannya kami menggandeng teman-teman dinas adalah supaya keberlanjutan dari WUB yang kita tumbuhkan ini ke depannya supaya terus dilakukan pembinaan oleh Dinas Perindustrian Kota ataupun Kabupaten sesuai dengan daerah potensial yang ada.

Jadi terkait dengan dana 200 miliar tersebut kami bagi karena memang Ditjen IKMA ada 3 direktorat yang membidangi komoditi. Yang pertama, Direktorat IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan. Kemudian di Direktorat Industri Aneka dan IKM, Kimia, Sandang dan Kerajinan. Yang terakhir, Direktorat IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut. Jadi ini semua berbasis kebutuhan dan juga potensi yang ada di daerah potensial setempat.

Kemudian terkait dana tersebut di bagi 3, jadi ada pilihan kelompok komoditi untuk masing-masing direktorat tersebut. Ada olahan pangan untuk yang di IKM *...(suara tidak jelas 15.33)*.

Kemudian *furniture*, ada juga bahan bangunan. Kemudian untuk di IKM kimia, sandang, kerajinan ada aneka perhiasan, mainan anak, alat olahraga dan lain-lain. Kemudian untuk kimianya juga ada aroma terapi, kosmetik, kemudian kerajinan dan juga sandang. Sandang, baik itu batik maupun tenun atau konveksi lainnya yang ini bisa masuk di IKM sandang kerajinan.

Kemudian untuk pilihan kelompok komoditi logam, mesin, elektronika dan alat angkut kita cukup besar menyumbangkan jasa industri disana terkait dengan perbengkelan, pengelasan, kemudian juga komoditi berbasis elektronika, logam dan juga komponen otomotif.

Begitu Bapak dan Ibu, kami lanjut untuk target Ditjen IKMA. Jadi di sini ada warna-warnanya Bapak dan Ibu. Jadi kalau yang biru ini target di tahun 2022, kami ingin menyandingkan saja dengan tahun ini kemudian capaiannya di triwulan II tahun 2022 yang warna oranye.

Kemudian yang abu-abu target Renstra tahun 2023, kemudian juga kuning target anggarannya 2023. Jadi untuk yang pertama, laju pertumbuhan PDB industri kecil dan menengah di target tahun 2022, 6,2%, capaiannya untuk triwulan II baru 5,6% diharapkan target ini bisa terlampaui.

F-P.GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, interupsi sedikit lagi.

Bu Dirjen kita perlu data kuantitatif semua, berapa orang yang hadir setiap acara di Dapil? Misalnya 500 orang, amplopnya berapa buat transpotnya, ini yang penting karena *...(suara tidak jelas 17.44)* jadi langsung aja *...(suara tidak jelas 17.47)* kalau hanya 50, 50 ya 50 kali 10 cuma 500 orang, saya aja biaya sendiri *...(suara tidak jelas 17.56)*

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Tidak keseluruhan, tolong diulang lagi dijelaskan, tadi berapa kegiatan per kegiatan, nggak apa-apa

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu untuk rakyat kok, bukan untuk Anggota.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Untuk tahun ini karena memang keterbatasan anggaran, kebetulan kita juga baru perkenalan. Dalam arti memang kita ingin memberikan.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):



Yang dijelaskan yang tahun 2023 aja.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Tahun 2023 memang Pak, karena ini 200 miliar kemudian juga kita punya kelompok komoditi yang ingin ditumbuhkan **...(suara tidak jelas 18.35)** jadi per orang indeks-nya kalau bisa kami bilang Bimtek plus juga fasilitasi mesin dan peralatan untuk 1 kelompok usaha bersama yang terdiri minimal 5 IKM itu 22 juta per orang.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

22 juta per orang.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Rp22 juta per orang seperti itu.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Yang hadir berapa orang Bu, yang hadir aja sekarang, kita modalin 10 orang tahu-tahu dia **...(suara tidak jelas 19.08)**

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau biasanya Pak, pelatihan itu kan efektif untuk 20 orang Pak, nah jadi indeksnya seperti itu. Jadi bisa saja tidak melakukan Bimtek langsung ke fasilitasi peralatan atau kombinasi keduanya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bu saya potong sebentar, mungkin ini aja kalau per kegiatan itu 22 juta orangnya berapa, harinya berapa gitu, per orang jatuhnya berapa, jadi total 200 m itu untuk berapa kegiatan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Slide 15 ada jumlah ininya Pak, kami juga sudah menyusun. Slide 15, jadi ada target 9.090 WUB ini pesertanya seperti itu Pak kemudian ini juga ada.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua.

Bu Dirjen bisa nggak di *create* yang hadir misalnya 300 orang kali 15 kali, tiap apa yang mau dikasih peralatannya terserah lah jadi tidak perlu yang harus sangat mahal, jadi yang padat karya aja gitu seperti partainya sahabat saya partai golongan karya jadi padat karya aja, jadi jangan padat modal.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pak, interupsi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Kita evaluasi 2022 berjalan, boleh dong Bu, saya mau satuan 3 yang 2022. **...(suara tidak jelas 20.52)** 22 juta itu untuk apa aja karena begini tadi Ibu ngomong boleh per 5 orang dikasih alat, alat apa aja gitu, iya kan seperti itu. Kadang begini kalau perhitungan saya dengan pelatihan 5 hari dengan 22 juta, makan, uang saku **...(suara tidak jelas 21.19)** narasumber, pelatih, penginapan nggak..

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Engga dikasih penginapan kok.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nah maksud saya Ibu hitung supaya setiap 5 orang ini jelas ini memang jelas ada alatnya karena di tempat saya nggak ada alatnya Bu, engga bisa dong pilihan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau untuk tahun ini Bu memang indeksinya bukan 22 juta, sekitar 8-9 juta untuk yang tahun berjalan, tahun 2022, 8 sampai 9 juta jadi kalau nggak salah.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Oke, kalau 8 juta Bu dengan 9.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Iya kalau itu dengan tahun 2023 kami.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Sebentar 9.090 kali 8 juta berapa tuh.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Itu untuk 2023 kan 22 juta Bu.



F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nggak kan Ibu dapat uang 200 miliar di 2022 kan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

2023 Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Nggak yang 2022 Ibu dapat berapa.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

100 miliar Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

100 m oke, kalau 22 juta per Anggota berarti Ibu menghitung perincian 2023, Ibu berarti menghitung perinciannya ada alat di situ kan Bu, untuk per anggota atau per kelompok.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Per kelompok, minimal misalnya untuk pelatihan 20 ya kita berikan 4 alat. Jadi 4 kelompok kan Bu kalau 5 mungkin saja semuanya butuh alat seperti itu, dihitungnya indeks. Bimtek plus juga peralatannya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi pimpinan, Bu maksudnya Bu Andi per orang itu berapa biayanya 2022, yang ditanya 2022.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

8 - 9 juta.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

8-9 juta untuk 5 hari ya, bener gitu ya Bu, nah minta perincian aja sama nota-nota Ibu, untuk perinciannya Bu.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Saya garisbawahi ya bu, yang ditanya Pak Ramson itu sebenarnya karena tahun depan itu kita tahun politik, kita akan mengumpulkan massa ...(suara tidak jelas 24.05) Nah 9.090 WUB itu kira-kira itu berapa orang yang akan di...(suara tidak jelas 24.16) itu yang paling penting.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

9.090 jumlah.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan Pak Zul.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Ini semakin sore saya semakin pusing dengarnya Bu, apa namanya kita butuh singkat aja karena ini butuh langsung ke orangnya, ke masyarakatnya, 1 orang itu dapat uang saku berapa begitu. Jadi nggak usah bicara alat-alat apa, bicara gede 22 juta tapi yang kita sampaikan kepada masyarakat itu uang sakunya berapa dan berapa hari, 1 hari berapa dan berapa itu aja jawab Bu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau uang saku kita punya standarnya Pak, 150 ribu per hari dan juga pelatihan ini 5 hari maksimal. Kemudian juga disamping uang saku, juga teman-teman juga dapat uang transpor.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Berarti yang 22 juta itu 1 kelompok?

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Termasuk, itu per orang Pak hitungannya per orang.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Hitungannya per orang, termasuk peralatan yang pada saat pelatihan saja kan bukan peralatan dibawa pulang kan?

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Nanti ada hibah peralatan yang diperuntukkan untuk 5 kelompok, 5 orang misalnya Pak, per kelompok di situ kita kasih 1 alatnya, itu dihitung juga.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

22 juta itu tadi termasuk sertifikat yang 8 juta per orang?



DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Itu beda lagi Pak, itu **...(suara tidak jelas 25.44)** itu Diklat 3 in 1 yang 1 juta, itu beda lagi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Berarti 150 ribu selama 5 hari.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Per hari Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya, per hari 150 ribu kan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Tambah transpor sesuai dengan daerahnya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Saya interupsi lagi Pak Ketua ya.

Bu Dirjen saya pengalaman 4 bulan di Komisi IX, BPOM bikin acara di Dapil saya 10 kali 500 orang, uang sakunya 200 ribu yang penting edukasinya sama amplopnya, nggak usah 5 hari 1 orang supaya bagi-bagi, jadi makin banyak yang dapat makin banyak penggerak, periode kemarin ini Komisi VII hanya sisa 35%, kita maunya sekarang jangan sisa 35% semua balik lagi di Komisi VII, jadi programnya gitu terkecuali yang mau jadi komisaris utama.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini coba saya hitung ya, kalau target 9.090 dengan dana 200 miliar itu per orang per WUB itu 22 juta, 22 juta biaya untuk pelatihan 10 hari, 5 hari, jadi bersama alat, tapi katanya alatnya per kelompok 1, gimana? ini WUB-nya terlalu kecil Bu. Ini kita ini 55 orang kalau 9.090 dibagi 55 itu jatuhnya cuma 165 orang, tim saya aja berapa **...(suara tidak jelas 27.34)** Jadi saya pikir lebih baik coba cari jalan WUB-nya itu supaya lebih banyak bagaimana Bu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Kalau yang kemarin supaya lebih banyak apa yang kita lakukan di tahun ini, tahun inikan indeksnya hanya 8 sampai dengan 9 juta, itu banyak. Angka ini sebenarnya tidak mengunci ketika memang tidak perlu alat, hanya banyak Bimtek.

Ini angkanya akan menjadi lebih banyak lagi karena ini memang asumsinya, asumsinya 5 IKM ataupun 5 orang yang mengikuti pelatihan akan kita fasilitasi alat, tapi kalau hanya 10 orang dapat 1 alat ya ini akan menambah jumlah yang dilatih gitu Pak, inikan minimalis ketika memang banyak 70 persen adalah pembelian alat. Tapi kalau kita 50-50 mungkin ini akan menjadi 12 ribu seperti itu Pak.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Boleh usul Pak, itu Ibu **...(suara tidak jelas 28.44)** berdasarkan kuota dan lain-lain, transport, Ibu hitung kalkulasinya berapa, alat-alat berapa, supaya kita bisa bedakan. Mungkin ada teman-teman tidak perlu alat, atau dia mungkin perlu alat yang tidak terkait dengan pelatihan itu, bisa jadi, misalnya kan pelatihan itu apa nanti ada UKM lain yang perlu alat yang kita **tidak bantu** **...(suara tidak jelas 29.14)** makanya tolong mungkin menjadi kesimpulan rapat kita juga.

Ibu pisahkan antara komponen biaya **...(suara tidak jelas 29.21)** satuannya dengan alat. Ibu anggarkan misalnya alat berapa, alat paling mahal apa sih Bu, misalnya **...(suara tidak jelas 29.32)**

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Di atas 15 Bu....

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

15 juta jadi Ibu hitung **...(suara tidak jelas 29.54)** menunya gini loh Bu, industri dalam negeri ya terkait peralatan **...(suara tidak jelas 30.07)** apa saja alat-alat yang bisa **...(suara tidak jelas 30.09)** saya nggak ngomong Pekalongan, Pemalang **...(suara tidak jelas 30.15)** saya ngomong secara umum, prinsip-prinsip **...(suara tidak jelas 30.19)** aja.

Ibu hitung dulu atau Ibu list dulu apa saja teknologi, inovasi yang bisa disalurkan oleh Kementerian Perindustrian **...(suara tidak jelas 30.31)** termasuk jadi di situ **...(suara tidak jelas 30.35)** kalau dulu kan masih ada BPPT Bu, kami biasanya perlu ini yang harganya sekian, kalau begitu saya dia kasih penuh.

Anggota boleh minta paket 2 mesin atau 1 apa, dia sudah hitung harganya Bu satuannya, jadi kita **...(suara tidak jelas 30.55)** 2 mesin tambah 1 apa gitu **...(suara tidak jelas 31.00)**.

Jadi Ibu tolong pisahkan karena menurut saya ya Bu, 22 juta per orang itu mahal sekali Bu, kalau Ibu hanya tadi mengatakan peralatan **...(suara tidak jelas 31.12)** 15 juta untuk *packaging* seperti apa.

Jadi tolong Ibu kalau ini harus Ibu hitung karena kalau hanya 22 juta **...(suara tidak jelas 31.23)** 200 miliar cuma 9 ribu, berarti kan 1 Anggota kan sekitar 200 kalau kita ditambahkan anggarannya jadi 400 ya Bu, jadi 600.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Hitung dulu Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Oke, hitung tapi prinsipnya saya seperti itu Bu, supaya teman-teman ada mungkin yang mau peralatan, ada yang mau pelatihan, ada yang mau kombinasi jadi kita nggak memusingkan Ibu juga ...(suara tidak jelas 31.48) jadi belajar dari BBPT, BPPT punya angka kalau dia mau opsi 1 dia bisa mampu berapa kopi, berapa air, berapa ini.

Opsi 2 apa, tapi nilainya dia sudah hitung, jadi kita kan tahu juga saya kepengen ambil ini, ambil ini, ambil ini peralatan, itu saran saya Bu supaya Ibu juga nggak pusing, teman-teman juga udah bisa dapat gambaran.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Bu, jadi intinya yang Ibu harus tangkap bahwa tahun depan tahun politik Bu. Kita pasti banyak mengumpulkan orang makanya kita berusaha program ke depan bisa mengakomodir atau memfasilitasi kita mengumpulkan orang itu.

Misalnya WUB-nya bisa ratusan sekali ketemu bisa 200 kan, honorinya juga selayaknya lah 200 ribu lah per hari, itu yang targetnya Bu. Jadi bukan hanya target dari kelompok-kelompoknya aja karena kelompok ntar juga pasti meng*hire* tim-tim kita di bawah yang berasal dari masyarakat juga. Jadi jangan pernah takut Bu selama itu untuk masyarakat dan tidak kita gunakan pribadi itu nggak ada masalah.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Saya bisa mengerti memang WUB programnya ini adalah untuk *skill not only knowledge*, *skill* itu dia memang harus, saya agak ikutin Bu ya, saya agak ngerti lah jadi dia melatih. ...(suara tidak jelas 33.28) Jadi memang pendapat...(suara tidak jelas 33.32) waktu 5 hari itu sebenarnya untuk pembukaan biasanya gitu ya Bu ya, jadi pelatihan pengetahuannya yang kedua, hari ketiga, keempat, kelima praktek ya seperti itu.

Tapi makanya kenapa saya kasih Ibu opsi seperti itu mungkin teman-teman ada yang ingin pelatihan saja butuh 5 hari pun ada yang mungkin ...(suara tidak jelas 34.02) makanya Ibu kasih menunya kepada kami atau misalnya ada yang ingin pelatihan 2 hari saja, misalnya pelatihan kopi cukup

skill-nya meningkat 2 hari, pelatihan sablon misalnya berapa hari, pelatihan elektronik misalnya paket berapa hari. Ibu kasih paket menu kepada kami untuk teman-teman pilih.

Itu kira-kira pimpinan ya.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Izin Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan Pak Zul

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Pengalaman kemarin waktu pelatihan dengan Kemenperin, yang pertama saya diminta oleh EO yang ibu tunjuk dari Kemenperin itu untuk cari tempat yang murah, malah kita dikasih budget cuma 1 juta, tolong cari tempat yang sejuta itu dari EO-nya.

Yang kedua, syukur-syukur dapet yang gratis katanya, waduh, bener, syukur-syukur bisa dapet yang gratis. Yang pertama kalau bisa dapat yang murah, yang kedua syukur-syukur dapet yang gratis atau ada sekolahan yang sudah ada peralatannya. Atau sekolahan yang sudah ada peralatannya.

Tahun 2023 ini kita kan masuk ke tahun politik, kita bukan berbicara warnanya pelatihan tapi bagaimana *quantity*, jumlah pesertanya itu harus masif, itu yang penting, misalnya nggak perlu sampai 5 hari, 3 hari aja cukup tetapi efektif, entah pelatihan masalah bikin *packaging* botol yang murah bahannya atau apa.

Jadi yang 22 juta tadi per orang itu bisa dipecah, jadi contoh kalau 22 juta tadi pelatihan 5 hari, pulang ke rumah dia cuma bawa 150 ribu kali 5 hari, 750 ribu, anggarannya 22 juta, itu jomplang banget, bunyi anggarannya 22 juta tapi yang dibawa kepada ke rumah oleh masyarakat itu paling 750 ribu pimpinan.

Saya mengusulkan kalau bisa anggaran itu pecah saja, misalkan jadi menjadi 3...(suara tidak jelas 36.22) perwakilan saja dengan jumlah kuantiti saja dengan jumlah pelatihan peserta yang lebih banyak.

Itu usulan saya pimpinan, kalau nggak ini kita bukan bicara kualitasnya, kualitas buat apa kalau peralatan itu dia nggak dapet bawa pulang, dia nggak bawa pulang peralatan ...(suara tidak jelas 36.33) dia bisa bawa kemoceng, dilatih kopi dia nggak bawa mesin kopi, dia cuma bawa ilmunya doang itu juga bisa diliat di Youtube jaman sekarang, maaf-maaf aja kita jujur aja, yang dia butuhin uangnya bawa pulang kalau pelatihan di Youtube juga banyak, mereka



bisa lihat di Youtube, yang penting bagaimana kita penyebaran kita di Dapil merata Pimpinan, karena Dapil kita pasti luas-luas cakupan kecamatannya, itu aja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin bisa ditangkap ya Bu.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tambahan interupsi sedikit Pak Ketua, jadi Bu Dirjen pengalaman saya periode kemarin KLH jatah motor angkut sampah 25 tetapi ada biaya EO-nya 300 juta. Saya ngomong sama LH, saya nggak perlu acara EO diganti dengan 5 motor angkut sampah, 30 motor angkut sampah setiap penyerahan saya bikin acara, saya biaya sendiri.

Kalau saya ikutin mereka hanya 25 di satu tempat. Ini yang 300 juta ini diganti dengan 5 motor angkut sampah tapi setiap penyerahan satu-satu setiap **...(suara tidak jelas 37.41)** bikin acara terus. Jadi yang penting orangnya, kasih amplop senang hadir kita pidato, kita indoktrinasi gitu, kalau hanya Ibu ya nggak efektif.

Kemarin saya barusan saya telepon Dapil saya **...(suara tidak jelas 37.57)** katanya dikasih 1 **...(suara tidak jelas 37.58)** terus yang bikin **...(suara tidak jelas 38.01)** Jadi ini EO-EO ini, waduh ini yang penting kita itu kuantitatifnya **...(suara tidak jelas 38.09)** sahabat saya mengatakan seperti itu, jadi bisa banyak, jadi di banyak tempat.

Itu Bu Dirjen, tolong dibuat polanya diubah kalau anggarannya tetap sehingga lebih banyak orang yang hadir, banyak pengetahuan, tidak perlu sampai 5 hari karena kalau misalnya ada yang dapat 1 juta 5 hari, ada juga yang nggak kebagian cemburu yang tadinya **...(suara tidak jelas 38.35)** jadi kurang **...(suara tidak jelas 37.37)** 250 ribu, 250 ribu tapi lebih banyak gitu dan berkali-kali, jadi bisa dibanyak tempat karena nanti tahun 2023 kebanyakan setengah kehidupan kami udah di daerah-daerah Bu.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Satu lagi pimpinan, terakhir ini.

Pimpinan, kelamaan juga selama kemarin itu 5 hari maaf ya, itu honorinya dibayarnya di ujung. Nah mereka yang udah pelatihan 1 hari, 2 hari, 3 hari mereka nggak ikut pelatihan di ujung, nggak dapet. Ini saya catet dulu



nih, nggak dapet jadi mereka ini misalnya pelatihan 5 hari ini catet nih Bu ya, dari EO ini, nggak tahu permainan atau apa.

Mereka pelatihan 5 hari ini, 1 hari pelatihan, 2 hari pelatihan, hari ke-3 nggak masuk, hari ke-4 nggak masuk itu udah nggak dapet Bu. Kalau dia *full* selama 5 hari baru terima Bu, kalau nggak *full* nggak terima, daripada lama-lama mendingan 3 hari aja terima, jadi kelamaan juga jenuh, 2-3 hari itu udah cukup. Jadi akhirnya kan selama sampe 5 hari **...(suara tidak jelas 39.51)**

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi ada Pak Zul, ini yang nggak dikasih uangnya, diambil uangnya **...(suara tidak jelas 40.00)** tapi kan ada standar kan ya. Standar pelatihan misalnya 5 hari, yang dimaksud itu untuk ngejar kuantitas misalnya 22 juta kalau tadi disampaikan per hari, taruh ya 200 ribu atau 300, 150 ribu, berarti kan cuma 750 ribu Bu. Masa 750 ribu sisanya yang 21 juta 250 buat apa. Maksudnya itulah yang lebih di efisienkan Bu, itu diteliti ulang aja itu jumlahnya jadi lebih banyak, minimal 22 juta itu bisa untuk 5 orang gitu.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silakan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Maksudnya begini, yang 22 juta ini bener nggak angkanya segitu, nanti jangan anggaran ini nggak seperti itu Bu. Kalau bisa dibagi 2 **...(suara tidak jelas 40.58)** 1 orang biayanya 11 juta itu lebih baik, itu harinya juga dikurangi. Jadi bagus gitu daripada nanti 22 ini kalau 5 hari buat apa, nanti terakhir ini hanya permainan kongkalikong sama EO aja, misalnya tadi yang cuma datang 2 hari, 3 hari **...(suara tidak jelas 41.27)** terus biaya inikan harus dirinci, 22 juta ini apa saja Bu kan gede ini, maksud saya gitu biar *clear* ini.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan bisa.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan.



ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terima kasih pimpinan.

Saya punya usul saya nggak tau ini bisa diterima mungkin jalan tengah, supaya kita juga memahami seperti yang diungkapkan tadi bahwa 2023 itu tahun kita mendekati ke masyarakat.

Misalnya begini memang dalam konteks WUB memang agak sulit kalau kita laksanakan 1-2 hari mungkin agak cape, tapi kan itu memang pelatihannya jenisnya adalah *skill*, hari pertama itu baru *introduction* hari 2 itu baru **...(suara tidak jelas 42.26)** hari ke-3 baru aplikasi ke alat, sangat tidak mungkin kalau kemudian seperti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan misalnya di Kementerian Kesehatan dan sebagainya.

Usul konkret saya adalah Bu Dirjen **...(suara tidak jelas 42.43)** kita pecah 2, nanti dari sisi anggarannya kan kita bisa fleksibilitas Bu, kita pecah 2. Misalnya Bimtek dalam konteks WUB tapi nanti, tapi kemudian ada 1 jenis pelatihan yang sifatnya cuma 1 hari saja, yang sifatnya *general* seperti yang dibilang Pak Ramson tadi.

Iya makanya ini kita cari moderasi dulu ini, kita cari jalan tengahnya yang sifatnya ini mungkin nanti cukup 1 hari saja tapi kita bisa lakukan di berbagai daerah di Dapil kita yang sifatnya seperti yang dibilang Pak Zul tadi itu bisa masif gitu ya Pak Zul ya.

Ini dipecah, jadi nanti Kementerian Perindustrian itu tetap mendapatkan esensi daripada pelatihan itu yang konteksnya adalah konteks WUB tapi kemudian kita tambahkan 1 jenis pelatihan lagi dengan mengurangi porsi anggaran WUB-nya, nanti kita plot 1 jenis pelatihan yang sifatnya cuma butuh 1 hari.

Saya kira hal itu Bu Dirjen bisa lakukan, itu akan mengakomodasi usulan daripada teman-teman tanpa menghilangkan daripada esensi target WUB itu sendiri kalau dipecah 2 jenis pelatihannya. Itu yang pertama.

Yang kedua, buat kita semua saya kira kita nggak faham **...(suara tidak jelas 44.13)** atau apa, dalam konteks EO dan sebagainya sebaiknya itu adalah ranah kita. Jadi **...(suara tidak jelas 44.20)** jadi jangan sampai teman-teman di Kementerian Perindustrian juga kita **.....(suara tidak jelas 44.35)** hanya gara-gara EO itu adalah **...(suara tidak jelas 44.43)** yang menunjuk juga bukan mereka itu cukup TA kita berkoordinasi dengan EO bukan terserah Kementerian Perindustrian juga gitu.

Sehingga ini pengalaman saya kebetulan saya dulu dari Komisi VI juga ikut jadi sudah punya pengalaman dalam konteks EO itu. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau *sharing* soal bagaimana EO **...(suara tidak jelas 45.10)** gitu.

Terima kasih Pimpinan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Untuk program ini sebenarnya bekerja itu mempunyai standar kualifikasi jadi target kualifikasinya harus tercapai, jadi kalau pelatihan 1 hari itu namanya ...(suara tidak jelas 43.36) nilai, nggak mungkin peserta pelatihan seperti yang kita harapkan.

Saya mulai ...(suara tidak jelas 45.53) satu kali Pak, kemudian saya ikuti setelah pelatihan itu bagaimana dan saya minta setiap pelatihan itu dirangking hasilnya...(suara tidak jelas 46.22) prosesnya, bagi yang baik dan berhasil maka saya beri...(suara tidak jelas 46.31) ini hasilnya luar biasa.

Jadi boleh ...(suara tidak jelas 46.36) tidak pada konteks banyaknya peserta yang kita latih tapi dampak dari hasil pelatihan itu ke masyarakat, jadi ini harus kita jadi, tidak kejar tayang berapa, sejauhmana kita bisa bagi-bagi duit.

Jadi jangan sampai uang lima ratus ribu ...(suara tidak jelas 47.01) itu kita bagi berapa orang sudah dua ratus lima puluh ribu ...(suara tidak jelas 47.08) tapi hasilnya kurang baik secara *outcome* politiknya.

Maka dari itu saya kira boleh buat modifikasi tapi jangan sampai mengurangi kualifikasi yang ditetapkan sebab kualifikasi yang sudah kita tetapkan, itu memang ...(suara tidak jelas 47.35) sudah mulai pemikiran ...(suara tidak jelas 47.37) jadi itu.

Maka dari itu, kita sekali lagi Pimpinan, ...(suara tidak jelas 48.00) kalau 1 hari jangan...(suara tidak jelas 48.05) kalau wirausaha baru itu membangkitkan semangat, membangkitkan *skill*, membangkitkan percaya diri, itu kalau salah satu dari pelatihan kan gitu, akses...(suara tidak jelas 48.31)

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Ada *success story*, misalnya nanti pelatihan 1 hari itu Kementerian Perindustrian menjarikan orang-orang yang *success story* yang praktek dari nol dari pelaku IKM yang sukses, mungkin bisa juga ...(suara tidak jelas 48.50)



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Begitu ya Pak Gandung ya, jadfi intinya teman-teman Komisi VII sepakat ya dengan program ini, bahkan kalau perlu tadi ada usulan Pak Ramson, yang Pemalang dan Pekalongan lebih banyak.

Kita ini lagi lobi Badan Anggaran, kemarin sempet muncul inilah usulan dari teman-teman, kita tambahkan ke WUB ini 400 miliar Pak Ramson, biar Pekalongan dan Pemalang semakin merata sampai kecamatan dan desa-desa.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Baik Pak Ketua, interupsi sekaligus tapi soal ini bisa aja 400 miliar dengan 200 miliar efektivitasnya sama Bu Dirjen. Saya berikan contoh pelatihan jahe merah oleh Ristek di Dapil saya 200 orang sehari tapi dari 200 orang itu di tes 20 orang yang bertahan, 20 orang itu dilatih lagi di BPPT, di bukan Cibinong, di Serpong akhirnya yang jadi hanya 3 orang, bisa mengembangkan jahe merah sampai sekarang.

Jadi yang penting tapi kan, saya lakukan itu 8 kali pelatihan jahe merah di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, kabupaten, pokoknya daerah-daerah itu.

Itu semua kemarin 2019 pokoknya Pak Ramson katanya gitu, jadi itu, makanya ini padahal akhirnya saya kan minta lihat yang kira-kira cerdas dan berbakat, dibawa ke sana 20 orang, akhirnya yang jadi 3 orang.

Cuma yang memilih 200 kali 8 kali 8 mungkin lebih, gitu Bu hitung-hitungannya secara matematis. Jadi tolong dipikirkan kalau hanya satuan tiga, kan Direktorat Jenderal bisa merubah, kita aja sekarang *enggak* bisa merubah, kalau dulu bisa kita ubah semua satuan tiga nya sekarang kita *enggak* bisa. Jadi program tetap sama nggak berubah, jadi nggak masalah dengan pemikiran **...(suara tidak jelas 51.08)**

Itu saja Bu, terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Jadi untuk diketahui Ibu, Pak Ramson ini satu-satunya orang Batak yang dipilih orang Jawa, ini dari masyarakat Pekalongan dan Pemalang dan Batang, 3 daerah ini.

Jadi untuk program ini kita sepakat bahwa program ini akan dimaksimalkan di Dapil dan yang terkait teknis tadi kan, yang perdebatan teknis ntar kita harap teman-teman Bu Dirjen bisa koordinasi lah dengan yang punya Dapil.



Misalnya contoh tadi Pak Zul bilang sewa, EO-nya bisa misalnya Pak Zul punya hotel, sewa di hotelnya Pak Zul ntar gratis tapi dituker dengan mendatangkan anggota 200 orang gitu, jadi bisa seperti itu Pak Zul, makanya Pak Zul harus beli hotel dulu buat acara kegiatan.

Baik, selanjutnya karena ini ada 2 Eselon I yang memiliki program ke Dapil, kurang lebih pendalamannya harus cepat. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Kepala BPSDMI.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Terima kasih.

Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Kami langsung ke.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mungkin ini Pak, langsung ke program yang berkaitan dengan anggota di Dapilnya apa dipresentasikan. Sebentar, jadi dari jumlahnya Bapak itu 994,645 miliar itu berapa yang untuk Dapil terus kisarannya apa, program nya apa dijelaskan langsung, itu yang lebih penting bukan begitu Bu Mercy? Daripada kita panjang lebar bahas satu-satu yang untuk kepentingan teman-teman aja.

Silakan.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Terima kasih.

Kami mempunyai ruang lingkup 10 kompleks *...(suara tidak jelas 53.28)* dua akademi komunitas yang berhubungan, Sembilan SMK dan tujuh balai diklat pak *...(suara tidak jelas 53.40)* yang potensial yaitu yang balai diklat pak. kami sudah merinci bahwa pelatihan, lanjut yang ke, terus.

Ini ada 7 poin yang jenis dan sektornya pelatihan Pak. Kami sudah memiliki per unit sehingga totalnya 26 ribu orang yang akan dilatih dengan skema pelatihan 3 in 1, dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini jawa tengah mana ini pak? nanti Pak Ramson tanya lagi nih.



KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nanti ada Pak, ini yang selanjutnya potret dari 26 ribu tadi terbagi nanti pelatihannya di 3 *in 1* di BDI, Medan ada 2.500 yang mana Dapil Sumatera Utara 2, Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 3 dan Aceh 2.

Untuk BDI itu Jawa Barat 3, Jawa Barat 5, Jawa Barat 4, Jawa Barat 8, Banten 3, Jawa Barat 2, Banten 3 kemudian Jawa Barat 6 dan Jawa Barat 2.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Mohon izin interupsi sedikit Pak, ini kan ada teman-teman yang Dapilnya nyatu satu tempat misalnya Sumatera Utara itu mungkin ada Pak Nasril. Siapa lagi itu ada 3 orang. Jadi jangan sampai kuotanya numpuk di daerah mana karena *enggak* mungkin itu lompat kan harus proporsional kalau bisa, kalau nggak ntar ribut diantara kita Pak gitu. Tolong itu di **...(suara tidak jelas 56.10)**

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya, sudah ketemu TA nya Pak, kemudian selanjutnya sampai di BDI Padang, kemudian BDI Yogya sudah *termaping* kemudian BDI Surabaya, BDI Denpasar dan BDI Makassar.

Ini per unitnya 7.500.000 yang selama 20 hari. Itu kami perlu diskusikan untuk pelatihan 3 *in 1* itu dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja dan anggarannya 200 miliar.

Itu yang dapat kami sampaikan Pak, untuk menyingkat waktu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bisa dipaparkan juga 26 ribu orang itu dilatihnya berapa hari? **...(suara tidak jelas 57.23)** daripada ditanya lagi Pak, mendingan dijelaskan.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

20 hari, kemudian per orangnya 7 juta 500 nanti untuk rinciannya bisa disesuaikan Pak untuk **...(suara tidak jelas 57.49)**

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu tadi kan 20 hari untuk berapa 10 orang ya, *enggak* yang tadi 20 hari tapi kan disepakati 20 hari dibagi 2 kan jadi 10-10 ya, itu kelamaan Pak 20 hari **...(suara tidak jelas 58.12)**

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nanti kami sesuaikan dengan limit mengenai sertifikasi kompetensi Pak **...(suara tidak jelas 58.25)** untuk yang lain lagi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh ini fleksibel ya, Bu Andi, Pak Ramson ini untuk 20 hari ini biayanya 7,5 juta per orang tapi itu fleksibel bisa mau ditambahin dengan pesertanya dipersilakan dengan *budget* yang ada, pesertanya berapa orang.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interaktif, pesertanya buat berapa orang per 1 kegiatan di Dapil, per 1 kegiatan.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

500 orang Pak, itu kalau tadi 20 hari cuma kalau memang kelamaan nanti diatur.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu 20 hari 500 orang terus 20 hari, itu enggak bosan mereka itu Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Tapi ada usulan untuk dibagi dua **...(suara tidak jelas 59.34)**

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kalau dibagi 5, 1000 orang.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Bapak kami ada sertifikasi kompetensinya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Kompetensinya, kalau 10 hari bisa ya Pak, 10 hari itu nginap atau pulang-pergi?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ada yang menginap pak

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):



kalau transpornya tiap hari berapa.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Transportnya setiap hari tentang honor ...(suara tidak jelas 1.00.03) bisa 75.000 Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Peserta yang hadir, 75.000. Aaahh mereka gak ada yang mau pak

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nanti kan ditempatkan bekerja Pak.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Itu rata-rata itu yang tertarik kumpul dipanggil oleh politisi, saya ngomong apa adanya itu memang yang punya, sesungguhnya sudah punya semangat politik, jadi *enggak* bosan dia kalau 10 hari 10 hari gitu, mau nyarinya susah Pak, jujur aja karena memang begitu ...(suara tidak jelas 1.00.36) pokoknya menangkan Partai Gerindra misalnya ...(suara tidak jelas 1.00.42) menyesuaikan dengan anggarannya di ...(suara tidak jelas 1.00.56).

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Kami kendalanya hanya nanti sertifikasi yang bisa disertifikasi itu berapa hari itu Pak. ...(suara tidak jelas 1.01.13)

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit lagi Ketua, mungkin seperti yang Ristek di massal dulu sekian tempat sekian tempat dijaring nanti siapa yang sekian puluh hari itu yang bakal jadi, dijaring lagi, itulah dibuat anggarannya tersendiri, satu kelompok aja itu.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

...(suara tidak jelas 1.01.32)

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Gandung dulu, silakan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya hanya menegaskan saja jadi pelatihan ini ...(suara tidak jelas 1.01.44) lalu apa ...(suara tidak jelas 1.01.48) maukah pagu yang akan



...(suara tidak jelas 1.01.56) menerima calon yang dari kita ...(suara tidak jelas 1.01.58) ini penting kalau akhirnya tidak laku...(suara tidak jelas 1.02.04) ini penting bagi kita.

Standar umum itu kita tunggu ...(suara tidak jelas 1.02.18) jadi saya minta kita mempunyai kepentingan politik lah, wajar itu jadi kepentingan politik jadi memeras manfaat secara global. Jadi saya minta memegang teguh tupoksi tanpa mengurangi apa yang ...(suara tidak jelas 1.02.48).

Ini penting agar supaya program yang telah digariskan itu kan melalui kajian yang mendalam ...(suara tidak jelas 1.02.58), maka dari itu saya minta...(suara tidak jelas 1.03.04)

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih pimpinan. Izin.
Pak Dirjen itu per orang berapa biayanya.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

7.500.000.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Tapi memang persyaratannya harus 20 hari?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Untuk SKKN nya Pak, jadi dikompetensikan supaya bisa masuk kerja.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Itu kalau di Sumatera pendidikannya bagaimana Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Di Balai Diklat Medan.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

...(suara tidak jelas 1.03.40) (suara kurang jelas).



KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Di Padang.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terus biayanya ke Padang.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nanti kerjasama sama industrinya Pak untuk.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terus nanti kalau udah dapat sertifikat itu pasti dijamin 100% diterima.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya Pak karena kami dari awalnya.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Saya setuju yang 10 hari 1000 orang tadi, **...(suara tidak jelas 1.03.15)** ada jaminan kerja tadi, itu aja. Itu ada kerjasamanya ya Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Kami diawali dengan MOU pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Jadi setelah selesai pelatihan bisa langsung kerja.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Kalau 500, 500 KK loh, kalau 1 KK anaknya 6 orang, **...(suara tidak jelas 1.04.50)** Yang menjamin dia diterima kerja itu siapa.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Perusahaan, ada MOU diawal (**suara tidak jelas 1.05.13**)

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):



...(suara tidak jelas 1.05.14) Bapak dengan perusahaan, itu sudah pasti ya.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Pasti Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Coba saya minta daftar perusahaan di Riau, saya dari dulu udah janji bolak-balik, bahwa Kemenperin ntar bisa mempekerjakan anak-anak tim saya ini, tahun ini jalan enggak Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Jalan Pak, sudah koordinasi sama TA-nya Bapak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Bapak yang tahun 2022 yang punya saya mana kok nggak ini.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Sudah ketemu TA-nya Pak, tinggal pelaksanaannya Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Itu berapa orang 2022.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

2.000 untuk 52 orang.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Jadi 1 orang 50.000?

ANGGOTA:

Kalau dari 40 KK, kalau dia nggak punya anak...(suara tidak jelas 1.06.25)

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Nggak 1 Anggota dapat berapa itu, berapa tadi anggarannya 2022.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



2022, waktu itu kita kan lakukan pertama Pak belum ada penyesuaian sisanya 2.000 orang.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Iya anggarannya per orang berapa Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

5 juta Pak.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

...(suara tidak jelas 1.07.06) ini nggak bener ini berarti totalnya sekitar 50 miliar Pak, nggak sampai...(suara tidak jelas 1.07.14) berapa 9,2 miliar.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Jadi begini, izin Pimpinan.

Pak...(suara tidak jelas 1.07.27) Bapak di tahun ...(suara tidak jelas 1.03.36) Betul Pak, saya udah lihat daftarnya, TA saya, nanti Bu Andi pengolahan hasil rumput laut dan lucunya saya belum iya-iyakan tiba-tiba saya ditelp ada pelatuhnya sudah berkoordinasi dengan BDI ...(suara tidak jelas 1.08.05), tolong-tolong kami sudah berkoordinasi dengan BDI katanya, saya belum bilang iya.

Ini serius deh Pak, jadi Bapak kan, maaf Pak, ...(suara tidak jelas 1.03.19) pernah saya tegur, mitra kerja Bapak bukan Dinas Tenaga Kerja, karena Pak Kepala BPSDMI ini yang 23.000 dia wujudkan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja di kabupaten.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terus ini jangan-jangan ntar di *breakdown* lagi.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Kami sudah beberapa kali pertemuan dengan TA Bapak/Ibu semuanya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Misalnya biaya 26 ribu ini

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Udah ada 3 kali pertemuan Pak.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):



26 ribu ini kalau dia 20 hari itu, jadi ini sisa yang 2.000 tahun ini, itu 1 Anggota dapat sekitar 40 an, rumusnya Pimpinan berapa-berapa nggak tahu saya tapi sisa 2.000, itu kita pernah tegur Pak, Bapak Kepala BPSDM, karena beliau saya tanya kenapa Bapak nggak pernah kerjasama sama kita, kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, mitra kerja Bapak bukan Dinas Tenaga Kerja, ...(suara tidak jelas 1.09.21) sisa Bapak habiskan itu, padahal...(suara tidak jelas 1.09.36)

Jadi tolong Pak...(suara tidak jelas 1.09.47) jadi gini Pak, tolong yang 2.000, jadi yang 2 ribu ini...(suara tidak jelas 1.10.01) kalau misalnya kaya di Dapil saya itu hanya pengolahan rumput laut, saya juga nggak milih itu ya Pak tiba-tiba saya dikasih menunya, Dapil Bu Andi kata TA komisi, bukan TA pribadi loh.

TA komisi Bu Andi rumput laut, pengolahan ikan terus tiba-tiba barusan saya di wa, Bu saya...(suara tidak jelas 1.10.24) sudah berkoordinasi dnegan BDI, jadi bingung saya. BDI bisa-bisanya tunjuk trader, walaupun saya kenal itu trader-nya, binaan saya juga.

Cuma saya kaget gitu kan belum ada tanda sign dari saya, saya mau milih hanya pengolahan ikan atau pengolahan rumput laut kan, walaupun data saya pengolahan rumput laut.

Jadi Pak mohon maaf Pak ya, kalau saya, saya ngerti, yang Ibu tadi ngerti bahwa 5 hari skill...(suara tidak jelas 1.10.52)

knowledge tadi pagi juga saya sampaikan itu seluruh Direktorat Jenderal bikin sosialisasi, satu Direktorat Jenderal bikin 4 sosialisasi, logam, Ilmate, pangan, bikin sosialisasi 1 hari, *enggak* perlu ada *skill*, sesuai dengan keinginan teman-teman, *skill*.

Kalo ini Pak saya setuju dengan Bapak karena dia punya sertifikat karena kan kalau sertifikat harus memenuhi standar kurikulum sesuai dengan industri.

Oleh sebab itu Pak, kalau bisa misalnya apakah 10 hari sudah bisa memenuhi seperti keinginan teman-teman kalau misalnya saya kalau otomotif, logam dia perlu waktu lama, tapi kalau...(suara tidak jelas 1.11.39) seperti yang dipikirkan ke saya oleh pihak Bapak, saya diinformasikan oleh TA, pengolahan rumput laut, pengolahan pangan *enggak* perlu 20 hari itu Pak ya.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya nanti kami sesuaikan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):



Pesertanya lebih banyak Pak, jadi mungkin gini loh Pak, saya ngerti Bapak kan, saya juga ngerti kita membuat modul ada satuan-satuan waktu jadi Bapak misalnya buat teman-teman yang teknologi pangan mungkin dia modulnya bisa, tapi ada mungkin yang memang harus *skill*-nya full 20 hari untuk memenuhi standar industri. Jadi saya bantu Bapak nih.....*(suara tidak jelas 1.12.26)* buat teman-teman memilih untuk yang 2023.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Siap.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Luar biasa...*(suara tidak jelas 1.12.36)* siapa dulu ini, Bapak atau Ibu dulu nih, Pak Gandung dulu ya, Bu Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Pak Bambang yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak-Ibu dari jajaran Kementerian Perindustrian, teman-teman yang saya hormati.

Kita langsung saja halaman berapa ya, *enggak* ada halaman kegiatan prioritas nasional. Tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 in 1 26 ribu itu ...*(suara tidak jelas 1.13.20)* 200 miliar total anggaran, ...*(suara tidak jelas 1.13.27)* pagu dari BPSDMI ini itu Rp994.645.654.000, belanja operasional sendiri itu sudah 400, belanja aparatur sendiri sudah Rp452 miliar itu sangat besar sekali belanja pegawai saya enggak liat lagi ya, tapi di belanja operasional hampir 121 miliar bahkan ada tambahan yang baru sampai anggarannya sampai Rp452 miliar sendiri kalo ada yang tambahan, mungkin dikomentari dulu Pak untuk yang bagian ini.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini nggak ada tambahan Bu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Jadi yang regular aja.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Regular yang lingkupnya 10 politeknik, 2 komunitas, D2, kemudian 9 SMK dan 7 balai diklat yang berhubungan dengan nanti daerah potensial adalah 7 balai diklat ini yang total 200 miliar dengan secara umum ada 26.



F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pemilihan politeknik itu atas dasar apa ya Pak, politeknik SMK

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Punya kami.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Punya Kementerian Perindustrian sendiri.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Saya fikir politeknik yang tersebar di Indonesia.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Engga, Politekniknya itu **...(suara tidak jelas 1.15.14)** jadi separoh teori, separuh di perusahaan sehingga daya serapnya ke industri cukup bagus.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, yang berikut kita masuk di belanja operasional ya Pak. Ini ada 13 kegiatan Rp457.807.218.000, untuk yang pertama ini saya ingin bertanya. Untuk pembangunan Poltek Cilegon ini bangun baru 26 miliar ataukah repair saja pak, renovasi **...(suara tidak jelas 1.15.55)** aja Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Gedung baru.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Gedung baru, Pak Pimpinan jika ini bangunan yang baru itu mungkin bisa kita geser ke 2024 atau mungkin dibikin *multiyear*, setengah-setengah.

Jadi anggaran-anggaran yang sifatnya seperti ini, itu bisa kita manfaatkan untuk masuk 2023 per banyak untuk program-program berarti kepentingan masyarakat, entah diklat entah program-program yang lain, ini contoh kecil aja. Jadi kalau, maksudnya begini apakah itu begitu penting dan mendesak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



Ini Poltek baru Bu kami perkuliahannya masih di *workshop*.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya pertanyaannya ada kendala selama ini tidak?...(suara tidak jelas 1.16.51)

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Baru mulai semester ini Bu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Oke.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Semua mahasiswanya sudah diambil perusahaan nanti kalau lulus di tahun ketiga.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Baik, maksudnya inikan apa Namanya konsentrasi kita ya untuk coba kita lihat ulang lagi kebijakan politik anggaran dalam industri-industri anggaran yang 457 miliar itu sendiri Pak.

Kemudian pengadaan peralatan ada sekitar 3 miliar, kemudian pengadaan...(suara tidak jelas 1.17.31) 6 miliar, udah 30 miliar, kemudian renovasi bangunan SMK 2 unit 90 miliar, sudah 120 miliar sekian Pimpinan, ditambah dengan renovasi bangunan politeknik lagi ada tambahan 4 unit 2 miliar, jadi sekitar masing-masing politeknik 500 jutaan.

Implisit kita dukung penuh pak kalau yang sifatnya di infrastruktur, cuma kita mungkin bisa bedah sehingga ada prioritas anggaran mungkin bisa kita bicarakan ulang bahwa program ini mungkin tetap masuk tetapi tidak dengan anggaran sebesar gini.

Jadi 120 sekian miliar itu mungkin bisa kita otak-atik sehingga dia bisa memberi tambahan bagi program memasuki 2023...(suara tidak jelas 1.18.35) tahun politik kita ini tahun 2023, 2024 Bapak-bapak kasih kita ...(suara tidak jelas 1.18.42) nggak ada gunanya karena sudah selesai.

Jadi pertimbangan kami ini bisa dibicarakan lagi mungkin ini bisa, apa namanya kita diskusikan ulang sehingga tadi saya datang terlambat, saya baru dengar dari kawan-kawan ya ada sejumlah program yang jumlah pesertanya dipotong misalnya, tidak lagi seperti yang sekarang ini dari sisi jumlah kepesertaan, jumlah dan lain-lain.

Jadi saya serahkan catatan ini mungkin ke pimpinan, mungkin bisa dibicarakan lagi dengan Pak Dirjen dan jajarannya. Apa namanya Ini tidak kita bahas lagi, saya cuma kasih catatan saja didalamnya kalo masih ada ruang untuk ini dibicarakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Bu Mercy, untuk diketahui kita menarik ke belakang, ini per tanggal 15 Juli kemarin soalnya tadi juga sama ada perdebatan terkait program IKMA, ada yang bilang itu dulu 200 di kesimpulan 112. Nah ini sama persis Bu, jadi BPSDMI ini pagunya sama persis yang diajukan pada saat pagu indikatif sama, 994.645.664 dan programnya juga dibahas pada saat konsinyering pagu indikatif ya.

Jadi sebenarnya yang kita lagi kita perjuangkan Bu Mercy maaf tadi kita diskusi kita bertemu dengan Pimpinan Banggar pada hari **...(suara tidak jelas 1.20.34)** Bahwa kita ini 2023 **...(suara tidak jelas 1.20.37)** banyak keperluan untuk Dapil dan *alhamdulillah* Pak Ketua dan **...(suara tidak jelas 1.20.41)** dengan Bu Mercy **...(suara tidak jelas 1.20.45)** satu Kementerian Perindustrian, satu Kementerian ESDM. Saya bilang **...(suara tidak jelas 1.20.53)** koordinasi dengan Bu Mercy.

Nah kita itu Bu Mercy sepakat juga dengan Pak Menteri, Pak Agus kalau ada tambahan anggaran dari Badan Anggaran diserahkan *full* untuk kegiatan di Dapil dan akan diperuntukkan dan ditempatkan di Ditjen IKMA.

Itu dan rencana kita juga sudah teman-teman bersepakat bahwa usulan penambahan 400 untuk Ditjen IKMA untuk kegiatan WUB biar di Dapil Bu Mercy bisa mencapai sampai tingkatan RT dan syukur *alhamdulillah* sampai di kabupaten **...(suara tidak jelas 1.21.40)**.

Jadi itu Bu Mercy ya, jadi terkait yang ini karena ini sudah pernah dipaparkan waktu pagu indikatif dan tidak ada perubahan jadi saya pikir cukup. Untuk selanjutnya kami berikan karena jam 5 kita mau Raker dengan Menteri, inikan RDP setelah hasil RDP ini kita Rapat Kerja-kan dengan Menteri Perindustrian untuk selanjutnya kita kirim ke Badan Anggaran berapa pagu definitif yang disetujui Komisi VII.

Silakan Pak.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Bambang sebelum kita ke Pak Gandung, saya sebenarnya nggak ada masalah walaupun pada akhirnya ada tambahan anggaran juga dari Badan Anggaran **...(suara tidak jelas 1.22.28)** sebenarnya berdiskusi panjang juga.



Cuma ini jadi catatan aja Pak Ketua, kalau kebutuhan kita di Dapil begitu besar sementara anggaran ...(suara tidak jelas 1.22.42) hanya infrastruktur inikan nggak manfaat Ketua. Jadi ini jadi catatan aja untuk kita gitu...(suara tidak jelas 1.22.53) sepanjang tidak keluar dari dirjen ini, kan pagu indikatif kan untuk dirjen ini tidak kita kotak-katik lagi begitu saja Pak Ketua, tapi kalau Pak Ketua mengarahkan ...(suara tidak jelas 1.23.5)

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Untuk bukan Bu Diah kalau Bu Diah ...(suara tidak jelas 1.23.12)
Selanjutnya dengan Kepala BKSJI.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Gandung dulu.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya ...(suara tidak jelas 1.23.26) program 3 in 1 itu hasilnya betul-betul diterima oleh perusahaan-perusahaan ...(suara tidak jelas 1.23.43) prioritas hanya 10 hari, tapi 10 hari itu apakah sudah memenuhi permintaan dari perusahaan, ini penting misalnya otomotif dilatih 10 hari, kalau bisa apa seorang montir 10 hari ini supaya mempunyai kualifikasi diterima.

Ini penting bagi saya sebab kami tidak ingin menciptakan pengangguran melalui pelatihan, pelatihan itu hanya mampu menciptakan pengurangan pengangguran, jadi memang kami agak berbeda dengan yang lain, kalau kami ingin mempertahankan kualitas dan arti pentingnya pelatihan 3 in 1 itu ...(suara tidak jelas 1.24.44) masuk didalam kesimpulan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi di sini Pak Gandung sampaikan kuantitas boleh diutamakan tapi tidak mengurangi kualitas ya, jangan sampai pelatihan ini menjadi mubazir dan yang penting juga butuh jaminan.

Kita udah rekrut kita usulkan misalkan 50 orang, ini dari 50 KK ternyata nggak greget ini malah kita dimaki-maki orang. Jadi harus ada jaminan bahwa dia kerja, minimal dia bisa bercerita ke tetangganya ...(suara tidak jelas 1.25.23)

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):



Pimpinan, sedikit aja tambahan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silakan.

F-DEMOKRAT (ZULFIKAR HAMONANGAN, S.H.):

Terkait masalah program *3 in 1* ini, saya mungkin ingin menambahkan konsep *buy 1 get 1*. Artinya apa? Sampai sekarang ini saya belum melihat ada upaya dari Kemenperin, Kemenaker, ingat ya presiden ini melaksanakan program pemagangan.

Ada program pemagangan, ada program pemagangan, dimana sekarang hambatannya program pemagangan ini adalah persoalan daripada kewenangan. Kewenangan daripada Disnaker sekarang sudah tidak ada lagi kewenangan di tingkat kabupaten kota dalam proses suplai kepada masyarakat untuk melaksanakan pemagangan ke perusahaan-perusahaan industri.

Nah ini kaitannya di Kemenperin, bagaimana Kemenperin memecahkan ini pimpinan agar program pemagangan ini bisa menjadi *buy 1 get 1*. Jadi artinya menjadi sebuah proses kerjasama antara Kemenaker dengan Perindustrian, kenapa? Karena kalau dapat banyak macet setoran, macet.

Jadi proses suplai untuk program pemagangan di tingkat kabupaten kota untuk mereka bisa magang dipabrik karena jangkauannya luas di tingkat provinsi ini akhirnya proses untuk melaksanakan magang di perusahaan-perusahaan industri ini nggak merata.

Sementara kita bicara perindustrian adanya di Kemenperin, bicara masalah buruh adanya di Menaker. Nah bagaimana konsep daripada Kemenperin ke depan agar ada sebuah upaya *buy 1 get 1 itu* tadi seakan-akan dibawa satu oleh Kemenaker ke Kementerian Perindustrian, supaya ter-suplai masyarakat yang nganggur ini karena kita bicara dari angka 30 itu kecil, 30 orang kecil sementara kuotanya itu puluhan ribu di kabupaten kota yang seharusnya anggaran magang ini bisa masuk.

Sementara pemerintah tidak dibebankan sebetulnya terkait magang, ini hanya konsep, ini hanya konsep magang di mana diwajibkan bagi setiap perusahaan untuk dapat menerima tenaga kerja dalam proses magang dengan upah murah yang upahnya cuma 70% dari UMK.

Ini keputusan presiden terkait masalah proses pemagangan, nah ini yang saya sampai hari ini saya lihat Kementerian Perindustrian tidak menangkap ini padahal kita bicara *3 in 1*. Kita menanggapi apa yang disampaikan Pak Gandung tadi, orang yang sudah dilatih itu mau dikemanakan setelah itu, mereka kan butuh kalau sudah dilatih, mereka meningkatkan keterampilannya.

Nah kalau ada program pemagangan mereka yang sudah kita latih, dapat sertifikat, mahal-mahal sertifikatnya 8 juta, mereka bisa kerja di pabrik. Ini harus ada sinkronisasi dari Kemenperin dengan Kemenaker. Ini usulan aja Pimpinan, kalau memang itu memungkinkan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini usulannya bisa ditampung...(suara tidak jelas 1.28.46) dikonsepskan saja, kalau perlu didiskusikan dengan Pak Zul.

Selanjutnya Pak.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan, sebelum ...(suara tidak jelas 1.29.00).

Pak Ketua, Pak pimpinan, kami datang rapat hari ini kan bukan sekedar duduk, ribut kemudian enggak ada ...(suara tidak jelas 1.29.10), saya masih ingat Pak Jonan ketika kita rapat kemudian ada isu kebutuhan di Dapil dan itu semua langsung berubah semua.

Saya *enggak* tahu apakah kita mau merubahnya ini atau kita sekedar menyetujui apa yang bapak-bapak didepan ini sampaikan kalau mau begitu kita pulang iya kan, enggak usah, kita enggak mau jadi seperti lagunya Iwan Falls tukang *stemple*, nggak mau Pak, saya tanya satu-satu. Tadi kita sudah membantu untuk 3 in 1 ...(suara tidak jelas 1.29.54) tenaga kerja industri 4.0 600 orang ini mau di Dapil atau bukan Pak...(suara tidak jelas 1.30.01).

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini di pusat industri digital yang baru Bu, jadi tahapan adalah transformasi digital sistem.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini di pusat industri digital yang baru Bu, jadi tahapan adalah transformasi digital sistem.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Coba yang 600 ini di transformasi digital yah, berarti tidak ada Dapil?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



Yang dilatih itu industri-industri yang mau melanjutkan ke sistem digital sebagai solusi untuk efisiensi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Jadi, yang sudah bekerja di industri?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Oke, penyusunan RSKKNI ini 5 miliar 11 dokumen, ini penting kah? Kenapa saya tanya ini Pak, karena teman-teman di belakang tadi menanyakan saya kenapa ya Bu, seperti misalnya renovasi bangunan Politeknik, renovasi bangunan SMK, pembangunan Poltek Cilegon, mungkin di 2023 kita bisa *pending* dulu Pak, iya kan?

Karena ini seperti yang disampaikan oleh teman-teman, ini adalah tahun yang paling penting di 2023, sesudah itu Bapak mau bikin 1000 Politeknik terserah Pak, ini bisa menjadi kesimpulan apat kalau memang mau, kalau tidak mau kita jadi tukang stempel aja, saya pulang gitu loh. Iya kan?

Apakah kita ini renovasi bangunan Politeknik 4 unit, ini pun kadang-kadang yang tahun 2022 *tuh* nggak ada di Dapilnya Anggota Pak, ada 1 di *...(suara tidak jelas 1.31.32)* tapi itu saya tahu yah, karena saya tahu juga *...(suara tidak jelas 1.31.36)* Politekniknya.

Nah, seperti misalnya renovasi bangunan Politeknik, renovasi bangunan SMK, pembangunan Poltek Cilegon, kalau menurut saya Pak, kalau memang Bapak Pimpinan, kita *pending* dulu lah untuk 2023 ini, kita masukan semua tambahan untuk tenaga kerja industri ini, menjadi berapa puluh ribu gitu, 26.000 tambah berapa. Kalau memang masih mau tetap ya *enggak* usah kita diskusi saya pulang saja.

Pengadaan peralatan BDI, sepertinya kemarin kan kita tidak peka jadinya kalau hanya mau membangun infrastruktur, pengadaan peralatan BDI hanya 1 unit, BDI mana yang mau dikasih gitu Pak? Kalau sekalian mau kasih BDI ya GDI misalnya.

Kemudian saya mau tanya, SMK yang *Link And Match* 2.600 kesepakatan *...(suara tidak jelas 1.32.35)* kesepakatan, 2.600 kesepakatan, apakah ada pelatihan Badan SMK yang *Link And Match* atau kesepakatan yang Bapak membutuhkan 3 miliar, kemudian mahasiswa, Bapak untuk mahasiswa dari lulusan program D3 di tahun 2022 Bapak capaiannya saja baru 8% atau berapa persen itu kemarin waktu Pak Menteri rapat terakhir, capaiannya itu sedikit sekali.

Nah apakah ini bisa dilakukan di Dapil Pak, teman Anggota, saya *enggak* ngomong Dapil saya saja ya Pak, saya ngomong buat semua teman-teman di Komisi VII, Mahasiswa lulusan program D2, D3, D4 1.664 orang 76 miliar ini dilempar saja Pak ke Dapil Anggota.

Tunggu dulu Pak saya belum selesai.

Sertifikasi tenaga kerja industri 1.500 orang, siapa yang Bapak mau sertifikasi? Sekaligus kita mengawasi, *memonitoring*, kalau bisa di Dapil semua Anggota, tadi Pak Ketua Pak Bambang *...(suara tidak jelas 1.33.42)* “Ya kalau bisa ini nanti teman-teman yang ngasih sertifikat tenaga kerja industrinya di Dapilnya masing-masing” 1.500 orang.

Oke saya setuju Pak angkanya, yang saya tidak setuju untuk di 2023 adalah renovasi bangunan Politeknik, renovasi bangunan SMK, pembangunan Poltek Cilegon, ini *enggak* *...(suara tidak jelas 1.34.02)* terhadap 2023, dan memang kan kita lebih, kenapa Pak yah, Bapak tahu *enggak* kalau kita ngasih uang Pak pelatihan, *...(suara tidak jelas 1.34.14)* di tengah Pandemi Covid sekarang ini, kita harus punya *...(suara tidak jelas 1.34.20)* terhadap kondisi masyarakat saat ini Pak.

Jadi kalau menurut saya Pak Ketua, Pak Bambang, pembangunan Poltek, kemudian renovasi bangunan Poltek, renovasi bangunan SMK, 1 unit ini Rp45 miliar, ini dicoret dulu lah Pak, Pak Bambang ini menjadi kesepakatan kita gitu loh, kita naikan semua misalnya untuk tenaga industri kompeten *3 in 1* menjadi 35.000 orang atau 40.000 orang, kemudian sertifikasi tenaga kerja industri berapa orang, kita cari lah tenaga kerja industri yang kita mau sertifikasi, jadi kita berikan sertifikat di Dapilnya teman-teman ini.

Saya belain Bapak loh, saya belain Ibu, saya ngerti konsep 5 hari, saya ngerti konsep 10 hari, 20 hari, tapi ketika pembangunan-pembangunan ini tidak penting Pak, naikan saja Pak ke ini, untuk 96 miliar ini, 90 miliar ini nanti dulu lah Pak, apalagi 1 renovasi gedung SMK 45 miliar ini.

Kemudian SMK yang penyelenggaraan pendidikan SMK, ini apa Pak? Apakah penyelenggaraan Pendidikan, Bapak tahu tidak kadang-kadang SMK di Dapil saya itu saya bantu perlu peralatan ini, padahal pakai duit pribadi saya itu, “*Bu kami perlu peralatan ini Bu*”, saya bantu, padahal sebetulnya di tempat mitra kami itu ada peralatan SMK, kenapa *enggak* dipikirkan gitu loh Pak?

Jadi penyelenggaraan pendidikan SMK 7.811 orang, kenapa tidak dikasih? Saya *enggak* tahu ini modelnya apa, kenapa kita tidak kasih ke Dapil-Dapil Anggota? Saya tidak tahu modelnya apa Pak.

Terus kemudian mahasiswa *...(suara tidak jelas 1.36.27)* 10.624 orang 76 miliar, saya setuju ini, mahasiswa lulusan program D1 kerjasama industri 300 orang, bayangin Pak tiap hari di Dapil saya banyak orang minta kerjaan dari Dapil saya, “*Tolonglah saya lulusan ini enggak bisa kerja*”, “*Saya lulusan*

Politeknik ini tidak kerja, boleh tidak saya jadi apa saja?", tapi ketika ada program ini di mitra kerja kami Pak, program D1.

F-PDIP (BAMBANG DH):

Interupsi Pimpinan, boleh saya masuk Pimpinan?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya, iya, sebentar dulu, ini tolonglah Pak dibagi saja ke Dapilnya Anggota gitu loh, karena program ini, silahkan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin Pimpinan setelah Pak Bambang saya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.

F-PDIP (BAMBANG DH):

Boleh Pimpinan? Iya terima kasih, begini saya ini heran ini mohon maaf yah, jangan dibikin kayak dagelan tadi kan kita sudah panjang juga tadi kita lobi di belakang, waktu lobi kita tadi panjang sekali itu, bahkan itu malah pemahaman saya kami memberikan kesempatan kepada...(suara tidak jelas 1.37.31) bahas ini semua gitu loh, kalau misalnya *concern* nya masalah program Dapil, kalau *concern* nya masalah program Dapil.

Saya tadi sudah sampaikan loh tadi di forum itu, maksud saya begini, masing-masing kan juga punya kepentingannya masing-masing terkait mengenai mendorong kelancaran program di masing-masing ...(suara tidak jelas 1.37.56).

Nah tadi juga kita sudah sampaikan bahwa sudah ada kesepakatan antara Pimpinan Komisi VII dengan Banggar, bahwa ada alokasi anggaran yang akan dialokasikan *full* untuk Dapil, kurang lebih sebesar 400 miliar plus tambahan yang sudah ada 200 miliar itu, artinya kurang lebih ada 600 miliaran itu program yang untuk Dapil, itu satu yah.

Lalu yang kedua cuma memang harus dipahami bagian dari kompromi tersebut satu paket dengan Kementerian ESDM, yang juga nanti besok akan ada pembahasan penambahan kurang lebih 600 miliaran, dan itu sudah dibangun kesepakatan.

Nah artinya maksud saya, kalau memang kira-kira ada *concern* terhadap Dapil Monggo saja nanti dibahasnya itu di 400 miliar kurang lebih ada tambahan 200 jadi 600 miliar, dan saya mau tanya ini yang alokasi anggaran

ini sudah perubahan dari yang kemarin tidak? Artinya maksud saya apalagi yang kita bedah gitu loh.

Saya pikir kita jangan lagi mundur ke belakang gitu, kalau memang mau yang kita bedah ini mau kita alokasikan kemana yang 400 miliar tambahan nanti gitu loh. Saya pikir seperti itu yah, nah maksud saya gitu, jadi kalau misalnya tadi ada *concern* ya mendingan kita *skorsing* kita bahas lagi Bu, jadi biar tuntas, pasti tidak akan kelar kalau begini terus, nah ini juga maksud saya kalau kita bolak-balik kaya begini gitu, terima kasih.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ini interupsi saja.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, saya tadi sudah pesan. Saya setengah menit Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bapak kan nanti mau habis sesi Pak Maman.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Eggak, habis sesi Pak Maman saya setengah menit.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Bapak interupsi atau mau?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Apa saja saya mau ngomong pokoknya. Singkat saja saya, saya semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh Ibu Andi Yuliana Paris Pak. Beberapa waktu yang lalu kita sudah ada pelatihan, pelatihan untuk segala macam, 10 hari sebanyak 50 orang itu.

Eggak ngerti saya, setelah pelatihan malah yang jadi persoalan ini, mereka ini balik ke kita, "Pak sertifikatnya sudah ada ini", bahkan dia bilang saya yang dianggap salah satu yang terbaik lah untuk pelatihan program dan



apa segala macam, ada yang bikin dagang es kopi, ada yang tukang jahit, ada yang tukang las gitu.

Nah bagus sekali itu, berarti sertifikat kau itu bisa kau jadikan lampiran untuk melamar pekerjaan atau lampiran ke bank bisa dapat pinjaman, ketawa dia Pak, ini sertifikat tidak berlaku di bank, kita mau pinjam modal mau usaha, mau dagang tidak laku Pak, apapun keahlian kita kalau tidak punya modal buat usaha *enggak* ...(suara tidak jelas 1.41.29) sertifikat kita hanya kertas.

Jadi kalau memang ini konsisten kita mau gerakan mereka sebagai *entrepreneur* juga, uangnya kita kasih mereka buat modal, namanya sudah terdaftar, sertifikat sudah keluar, jenis pelatihannya sudah jelas juga, sudah kasih saja buat modal, berapa satu orang 25 juta bikin es kopi, satu orang 30 juta beli mesin las tukang las, atau ibu-ibu yang pandai jahit beli mesin jahit, banyak jalan, jadi ngurusin ...(suara tidak jelas 1.42.10) *enggak* usah kita capek-capek.

Sudah kita bangun sumber daya manusianya, sudah kita latih, terus habis ke depannya kita tinggal ...(suara tidak jelas 1.42.19). Kita yang jadi di Dapil ini kalau mereka datang ya ke kita nanya, iya kan? Pelatihan sudah, sudah dapat sertifikat tapi *enggak* ada modal, nah ini kendalanya Pak.

Jadi kalau yang dibicarakan oleh Ibu Andi Yuliani Paris tadi itu sangat betul-betul terjadi di lapangan, bahkan uang partai sendiri, berapa untuk mesin jahit? “Yah lumayan lah Pak variatif, ada yang 5 juta, ada yang juta, ada yang 10 juta”.

Kalau uang itu kita alokasikan saya pikir selesai urusannya Pak, kita melangkah berikutnya lagi, jangan sampai sudah kita latih, sudah kita didik, terus sudah ada sertifikat, terus selesainya kita tinggal. Itu menurut saya perlu kajian lagi lah. Ya terima kasih Pimpinan, itu saja.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak tepat 1 menit setengah.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silahkan Pak Gandung.



F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Saya minta pertanggung jawaban Pimpinan, tadi rapat kita agak beralot-alot, kemudian di skors, setelah skors mengambil kesimpulan, saya minta pertanggung jawaban dari Pimpinan, bagaimana kesimpulan setelah skorsing tadi? Jangan sampai ini jadi budaya baru, kita sudah *skorsing* beradu argumentasi sana sini, dengan awal, mentah lagi, dulu selama saya jadi Anggota DPR kalau ada yang alot disini kita *skorsing*, dan di *skorsing* itu diterima usul-usulnya, semua fraksi semuanya ikut, *skorsing* **...(suara tidak jelas 1.44.27)**.

Jadi gunanya kita jangan sampai karena tidak ikut rapat disini, rapat lobi, kemudian suara nya tidak masuk, kemudian dimentahkan kembali. Kalau begitu ini **...(suara tidak jelas 1.44.49)**. Ini penting agar supaya kita tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit.

Kami mengharapkan diantara kita harus aku tau yang kau mau tapi ini saling, kita pun harus tahu yang kamu mau. Saya pikir saran saya seperti itu Pimpinan, sehingga masing-masing kita bisa mengembangkan suatu permasalahan yang sangat proporsional, terima kasih.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin sedikit.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya silahkan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih. Mungkin meneruskan saja hasil skors tadi, tadi memang kita diskors itu ada membicarakan beberapa program yang dijabatani Pak Maman, Pak Bambang, tapi disitu memang membicarakan soal program yang nilainya tadi ini 200 miliar, 26.000 tadi, yah Pak Maman yah? 26.000 tadi kan kita bahas yah?

Iya, satu Anggota dapat 500 yah Pak. Sekarang kami ini Pak, berdebar-debar, Bapak bilang kan saya nanya tadi, 500 nanti yang dikasih sertifikat ini Bapak menjamin dikasih kerja *enggak?*

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Selama pengalaman Pak, kami.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):



Enggak, bukan pengalaman, ini kita dilemparin di Dapil kalau ini tidak *clear*, ini *clear* tidak?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Clear Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bapak buat pernyataan.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Nah gitu saja, kalau ada pernyataannya kita mau, kita jadikan tadi per 10 hari berarti satu Anggota dapat 1.000, Bapak buat pernyataan mana tempat kerja mereka. Iya 1.000 per Anggota Bu, tenanglah dulu Bu, ini biar *clear* sama *clear* ini, kalau tidak ada pernyataan dari Bapak, saya Fraksi Demokrat menolak anggaran Badan pengembangan ini, Fraksi Demokrat.

Sebentar Pimpinan, tadi tidak dijelaskan renovasi-renovasi ini Pak Maman, mungkin itu yang ditanya teman-teman, kalau *enggak* penting ya boleh juga di *drop*, ada yang lebih penting untuk kepentingan 2023.

Monggo, itu kesempatan kita memang merubah disini, kalau ini ditambahkan umpamanya di 200 tadi supaya kuantiti-nya lebih banyak, Pimpinan dan Anggota semua setuju ya *monggo* tidak ada masalah, itu saja kan kesepakatan bersama. Maksudnya gitu kalau umpamanya mau diskors kita skors dulu, itu saja, biar *clear*, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Pak Nasir, intinya kami yakin 55 Anggota Komisi VII sepakat bahwa yang dilatih itu harus ada jaminan Pak, kalau tidak kita bisa menjadi bumerang, kita merekrut anak orang tiba-tiba habis itu kita janjiin kerja tidak kerja, yang tadinya rutin.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, saya juga minta pernyataan dari Pak Menteri, dari Pak Dirjen ini, baru kami menyetujui itu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Bisa-bisa yang tadinya milih jadi *enggak* milih. Terus yang kedua, ada benarnya apa yang disampaikan senior saya Pak Gandung, kita harus konsisten terhadap apa yang pernah kita putuskan kita lakukan, karena marwah kita disitu juga, jangan sampai entar kita sudah sampai di depan balik lagi kebelakang, makanya tadi saya nanya pertama kali ke Pak Sekjen, Pak Kepala, apakah anggaran ini persis waktu pagu indikatif?

Apakah anggaran, rincian ini persis waktu dipaparkan di Hotel Sheraton?

Apakah waktu itu pernah ada penolakan dari teman-teman?

Jadi saya pikir kita ini yah Bu, mohon maaf ini Bu Andi ini senior saya juga kan, tapi maksud saya kalau ada yang kurang pas kita buat catatan saja, karena kita sudah pernah menyetujui waktu pembahasan pagu indikatif di tanggal 15 Juli, dan ini anggarannya sama persis, kecuali ada perbedaan, ada pergeseran itu boleh mengkoreksi ulang, tapi masa kita koreksi keputusan yang pernah kita putuskan.

Silahkan Bu.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Kita kan *enggak* memutuskan sedetail itu, kita memutuskan pagu indikatif itu kan gelondongannya, ya Bu Mercy yah? Kalau memang Pak, hanya kita tidak membicarakan itu sekarang ya *enggak* masalah, ya tidak perlu kita, kita hanya putusin 400 miliar tambah 200 miliar.

Sudah mereka tidak perlu, kita hanya meresmikan, bukan saya *enggak* mau mundur ke belakang, ini kita nyatakan bahwa mana sekarang yang lebih *urgent*, waktu pagu indikatif kan kita tidak membahas seperti itu.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, mohon maaf karena waktu pembahasan Pak Maman yang pimpin, kan ini tanda tangan, saya *enggak* ikut soalnya.

Kembali saya tanya waktu itu dipaparkan tidak begini Pak?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Persis seperti ini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Oh iya oke, baik mungkin.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, sedikit Pimpinan.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya silahkan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jadi pembahasan anggaran pada konsinyering yang sebelumnya seperti yang disampaikan oleh Pimpinan, bahwa kita juga sudah menyisir tentang anggaran ini, kemudian kita membahas anggaran itu sekarang tidak bisa parsial, artinya kompromi kita waktu itu adalah bahwa kita mengusahakan ada penambahan dana yang akan direncanakan untuk program ke daerah pemilihan.

Nah, inilah yang dikelola dengan baik oleh Pimpinan dan teman-teman semua, akhirnya ada kemungkinan besar bahwa kita akan menambah anggaran sekitar 1 t, 600 untuk ESDM dan 400 untuk Perindustrian, tapi 400 itu murni *full* untuk kegiatan untuk daerah potensial kita, ini kan bagian daripada kompromi kita secara kolektif tentang pembahasan anggaran semua Dirjen yang terkait yang ada di Kementerian Perindustrian, jadi kita tidak membahasnya parsial-parsial kemarin waktu kita konsinyering yang sebelumnya, jadi kita ini kan tidak boleh lepas dari apa yang sudah kita putuskan kemarin dan bagian daripada kompromi kita dan upaya kita untuk menambah program Dapil.

Maksimal kita dapat 400 itulah yang akan diserahkan sepenuhnya untuk program Dapil kita, ini bagian daripada kompromi kita dengan Kementerian Perindustrian kan gitu. Jadi saya kira ini tidak bisa kita, yang kemarin kita tidak nyambung sampai ke hari ini, ini bagian dari utuh keseluruhan dari pembahasan anggaran Perindustrian, konsinyering pertama pagu indikatif dan ini konsinyering yang kedua untuk pagu definitifnya.

Jadi saya kira ini harus kita pahami bersama-sama, toh sudah ada juga untuk program Dapil kita yang 400 m itu yang seluruhnya, sepenuhnya oleh Pak Menteri adalah untuk kegiatan pengembangan Dapil kita, dan itu adalah yang paling memungkinkan dasar elektoralnya lebih baik karena di IKM, bahkan kita bilang ini IKM, karena memang kalau di BPSDM ini kan ada kurikulum, ada silabus, ada lembaga lain yang harus diberikan sertifikat dan



semacamnya, dan ini tidak semudah kita untuk merubah silabusnya, kurikulumnya, karena ini sudah ada prinsipnya juga Industri, dan *Link Swap* juga Industri, dan *Link Swap* juga dengan Menteri Keuangan, Bapenas segala macam.

Jadi saya kira ini harus kita pahami bersama bahwa pembuatan anggaran ini tidak sesederhana yang seperti kita “Ah ubah saja ini, ganti saja nomenklaturnya”, saya kira tidak seperti itu yah, saya pernah di birokrat juga jadi saya paham bagaimana mengelola sebuah anggaran.

Saya kira itulah yang harus kita pahami bersama-sama, kita okelah kita ada program Dapil **...(suara tidak jelas 1.53.48)**. Kira-kira ini yang perlu saya sampaikan agar tidak parsial membahas anggaran ini, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, ini kayanya Pak Nasir mau meluruskan, menengahi silahkan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, konsenyering ini, inilah fungsi pengawasan dan legislasi Anggota DPR RI, disinilah kita memang harus melihat apa dari fungsi anggaran itu, untuk apa anggaran ini, jadi enggak ada yang bisa dirubah hari ini, mana yang mau dirubah ya dirubah hari ini bisa, karena kesepakatan semua para Anggota, jadi enggak ada yang enggak bisa dirubah, usulannya itu masing-masing, usulan pertama, usulan lainnya, inilah finalisasinya.

Nah kalau disini disetujui ya sudah jalanlah Kementerian, jadi maksud kita bahasanya kalau disetujui ya disetujui, tapi dengan catatan begini-begini, kalau *enggak* disetujui ya skors lagi, skors ini gimana, yang ini gimana, apa ini *enggak* usah dijalani dulu renovasi tadi, itu kesepakatan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Atau begini Pak Nasir, sebagai catatan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Bukan, tunggu dulu Pimpinan, ini kan meluruskan, supaya tadi kaya Bu Zul, Pak Gunhar, Kementerian ini kan baru sama kita Pak, kalau Kementerian ESDM itu sudah tahu kita bermainnya, ini kan tidak paham kita, yang dia sekarang kita setuju saja ini belum jalan di Dapil saya.

Iya tadi program pendidikan ini saya belum tahu hasilnya, makanya mau saya keluarin tadi Pak Gunhar, cuma kasihan tidak enak juga gitu loh, posisinya kita kan belum tahu programnya Kementerian Perindustrian ini, nah tadi Bapak



ini nawari lagi ada program yang bisa dibawa ke Dapil, 1 Anggota 500 dengan pendidikan 20 hari, kita bilang 20 hari mereka enggak mungkin nungguin **di** satu pendidikan nah kita minta 10 hari, jadinya 1.000 per Anggota, betul yah Pak? Ini kalau salah tolong diluruskan kalimat saya.

Nah tadi rundingan itu sampai batas itu, nah tiba-tiba Anggotanya yang nanya masalah renovasi gini-gini, ya kalau memang *enggak* perlu dulu Pak, mesti ada yang lebih perlu untuk kepentingan Anggota Komisi VII yang bisa dibawa ke Dapil ya kita dahuluiin itu saja dulu, yang 90 miliar tadi Pak kita *drop* dulu, kalau Bapak tadi bilang masih bisa dihanggar di Pendidikan ya dihanggar saja, ini kita **...(suara tidak jelas 1.56.47)** dulu kesitu, karena lebih penting kita memberikan pertumbuhan ekonomi buat masyarakat daripada lakukan pembangunan ini, bangun gedung, mungkin Bapak dapat komisi gedung itu, tapi kami tidak dapat.

Bisa jadi, karena Bapak yang mengelola anggarannya, jadi kami minta kalau misalnya permintaan teman-teman tadi di *drop* dulu, tapi kalau *enggak* apa yang harus dibicarakan dengan teman-teman Komisi VII, itu minta waktu Pimpinan, itu skors dulu sedikit, ini kan tidak ada yang dipaksa-paksa, ini kan Pimpinan sudah paham lah kita, yang satu Wakil Menteri tapi **...(suara tidak jelas 1.57.37)**.

Jadi mohon izin Pimpinan, supaya rapat ini bisa terselenggara dengan baik lah, jadi jangan, semua disini punya kepentingan buat 2023, kalau memang tidak penting yang tadi Pak, kalau tidak begini, kita minta Bapak rincikan dulu dong apa sih manfaatnya gedung ini, bisa juga, apalagi Bapak bilang renovasi ngapain dulu gitu, berarti kan gedungnya masih ada, ini kan renovasi namanya.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya saya tengah Pak Nasir, karena tadi Pak Nasir sudah sangat bijak ini, jadi beliau sebenarnya menyetujui asal Bapak jelaskan, beliau tadi bilang ini bisa disetujui tapi Bapak jelaskan urgensi dari renovasi dan pembangunan di Kominfo.

Jadi saya pikir Bapak bisa jelaskan, mudah-mudahan bisa menyepakati semua.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan, ini renovasi yah Pak?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Itu yang renovasi ada beberapa korteks termasuk korteks medan itu Pak, itu sudah apa perlunya renovasi Pak.



F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya maksud saya kan ini renovasi, kan bukan bangunan baru, terus terlantar gitu kan enggak, kan ini bunyinya renovasi Pak, kalau kita renovasinya tahun depan kan bisa.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini yang 2 miliar Pak yah, yang 90 itu merupakan kegiatan pembangunan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh ini bunyinya renovasi kok.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Pembangunan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya poin 10 Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

SBSN Pak, dan renovasi lanjutan tahun ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya kan renovasi pembangunan SMK.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Lanjutan Pak, jadi SMK.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tahun kemarin ini ada anggarannya?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ada Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Berapa? Kan beli tanah Bapak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



Jadi tahun ini 75, tahun depan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, ini yang direnovasi berapa gedung?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini bukan renovasi Pak, bangunan saja.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh ini bacaannya renovasi Pak, renovasi pembangunan SMK, malah yang di poin 11 pembangunan Poltek.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Yang 11 pembangunan Poltek Pak, karena kalau di ini menerima.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, pembangunan Poltek yang poin 11 Pak, yang poin 10 itu renovasi yang 90 miliar.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ini salah Pak renovasinya, pembangunan saja cukup.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh ini tapi Bapak buatnya renovasi, Bapak, saya saja udah diluar kepala, apalagi Bapak coba.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Tahun ini saja Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Coba tahun kemarin mana anggarannya?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

75, *multi years* tahun ini.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Jadi bukan renovasi yah?



KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Bukan Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terus yang renovasi mana?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Yang renovasi itu yang nomor 9 Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Loh ini renovasi *...(suara tidak jelas 02.01.17)* disana.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Yang renovasi berapa Pak, yang bangunan baru berapa Pak, itu harus dijelaskan Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya, yang renovasi itu untuk 4 Poltek itu 2,4. Yang pembangunan yang *multi years* tahun ini 75.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini kan renovasi pembangunan SMK 2 unit, ini 2 unit Pak, ini lokasinya dimana?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Di Bogor Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

2-2?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Di Bogor Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Eenggak 2-2, ini 2 unit Pak.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



SMK saja Pak, Bogor sama ...(suara tidak jelas 02.02.06) Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Kan 2 unit berarti.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tidak, maksud saya kita harus terbuka ini pembangunannya dari awal atau bagaimana gitu loh.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Dari awal Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Baru mau dibangun kapan?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Yang renovasinya ini salah.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya, baru dibangunnya kapan ini?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Tahun ini, kemudian tahun 2023 dan selesainya tahun 2024.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Berarti Maret baru mulai tahun ini?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Iya kita *cancel* saja dulu.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:



Sudah dikerjakan Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh *multi years*, yang mana ini yang *multi years*?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Yang nomor 9 Pak, eh 10 Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

10 yah, yang nomor 9?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nomor 9 itu renovasi beberapa gedung yang, kami kan punya 9.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Yang *multi years* itu bangunan baru atau yang renovasi Pak?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Bangunan baru.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Nah bangunan baru yang nomor berapa Pak?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

10.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya nomor 10 jangan nomor 9 Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Multiyear yang terikat dengan kontrak Pak.



ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Nah itu oke, makanya Pak dijelaskan Pak, kalau baru dianggap tidak *urgent*, kalau *multi yeara* kita punya tanggungan kepada kontraktor-kontraktor.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Ini yang nomor 11 Bapak kan membangun baru ini?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Nomor 11 membangun baru karena semester ini perkuliahannya masih di *workshop* Pak, punya pembangunan *workshop* perkuliahan Pak, dan ini mahasiswanya sudah langsung diterima.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi ini di pembahasannya awal anggarannya waktu di Komisi VI yah masih yah? persetujuannya, tidak karena ini *multiyear*, berarti sekarang hanya melanjutkan.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Izin Pimpinan meluruskan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oh iya, iya.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

2022 mereka kan sudah dapat anggaran dari Komisi VII, belum? Tambah bingung lagi kan, bingung kan? Saya pun bingung Pak, Kementerian ini masuk di Komisi VII tahun berapa? Berarti tahun 2022 Bapak dapat anggaran kan, buat apa Pak?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Berarti waktu ini Pak Nasir, berarti kita dulu ikut menyetujui dong?

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):



Pembahasan pada saat itu masih di Komisi VI tapi pada saat finalisasi baru di Komisi VII, yang tambahan 250 miliar itu hanya 150 miliar digunakan untuk IKMA IKM, yang 100 miliar lagi dibagi ke beberapa Direktorat yang lain, tapi seingat saya itu tidak termasuk BPD SNI yang tambahan, jadi benar yah? saya ...(suara tidak jelas 02.05.13) dari Pak Dirjen ini, Pak Kepala ini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sekarang sudah yah, *clear*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Lamhot, yang nomor 10 mungkin sudah *clear*, pertama karena dulu pernah sudah menjadi bagian persetujuan pagu definitif 2022, berarti seluruh Kementerian setuju memahami dan menyetujui, ini yang nomor 10, karena yang sekarang ini kan ini, yang sekarang ini posisinya adalah lanjutan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Gini, gini, saya coba tengahi dulu yah.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya silahkan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Intinya kan gini, dari awal tadi kita bicara bahwa menyongsong 2023 ...(suara tidak jelas 02.05.58) perpanjang, pertanyaannya khusus BPD SNI, dari semua *breakdown* ini masih adakah mungkin, kan yang lebih tahu kan Bapak itu, nah saran saya kepada kita semua kita bicarakan setengah kamar saja, kan tidak mungkin juga secara terbuka kita bicarakan.

Nanti hal-hal apa saja yang bisa kita sisir lah paling tidak begitu Pak Nasir yah, kok ketawa ini kadang-kadang Pak Nasir ini, daripada kita panjang-panjang kali disini tidak selesai, toh juga kita nanti *enggak* bisa maksimal iya toh? Esensinya kita sudah paham lah, ini kebetulan Pak Aruf ini agak sedikit kurang bisa, ketakutan ke Bang Nasril Pak Arufnya, ya begitu Pak Aruf yah?

Jadi ...(suara tidak jelas 02.06.56) (02.06.56) nanti kalau saran saya ...(suara tidak jelas 02.06.58) apa saja yang bisa kita dimodifikasi lah kira-kira begitu, dibicarakan setengah kamar saja, dipimpin Pimpinan nantinya, kalau saran saya begitu saja daripada kita panjang-panjang kali permainan ini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):



Baik, iya silahkan Ibu Dyah.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.)

Iya terima kasih Pimpinan, saya dari tadi betul-betul tidak mau ikut campur bicara sebetulnya karena sudah sangat banyak, tapi memang menggelitik ini tentang poin nomor 10 itu Pak, apakah karena pembangunan itu *multiyears* maka nomenklturnya jadi renovasi? Kalau ini salah ketik ini luar biasa salah ketiknya, kata pembangunan dengan renovasi, kalau renovasi jadi renovati, jadi renovadi itu salah ketik Pak, tapi kalau dari pembangunan jadi renovasi itu bukan salah ketik itu.

Eggak maksud saya, saya ini betul-betul kenapa menggelitik Pak, ini dokumen, dan ini masuk nomenklatur anggaran, nanti kalau misalnya juga, nanti salah taruh nol gitu yah, jumlah nol dan lain-lain, selisih. Ini betul yah kayanya sepele yah, kayanya sepele, tapi nomenklatur, sekali lagi karena kita sedang berbicara anggaran, kita bicara nomenklatur, dan saya yakin kesalahan menempatkan nomenklatur pada rekening, pada APBN itu punya dampak yang luas, beda banget renovasi dengan pembangunan.

Jadi kalau memang ini salah, saya juga jadi nanya ini yang ngetik ini siapa? Bapak *enggak* tahu ini ada yang ngetik disini renovasi gitu yah?

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Coba dijelaskan Pak, Ibu Dyah ini luar biasa.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya, Ibu mohon maaf ini salah ketik di satuan B nya 3 miliar ini pembangunan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Kok 3 miliar sih? Yang 90 miliar Pak.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebenarnya untuk diketahui teman-teman kita itu sebenarnya dilarang melihat atau membahas satuan 3, itu putusan MK loh jelas, tapi ini diberikan yah. Mana nomenklturnya Pak, coba yang mana nomor berapa?

Oh yang pembangunan gedung pendidikan?

Kok dibawahnya ada lagi renovasi gedung?



KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Outputnya Pak.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

*Output atau pembangunan dan renovasi itu sama yah Pak? Atau beda? Jadi yang *multiyears* yang mana, renovasinya juga *multiyears*?*

Jadi begini yah Bapak/Ibu, buat saya ini catatan berat sebetulnya, menyebutkan nomenklatur, ini nomenklatur, jadi saya enggak ngomongin tentang anggarannya mau dipakai apa dan lain-lain, ini banyak urusan nomenklatur saja, kalau memang misalnya berbeda tulis berbeda ada pembangunan dan ada renovasi, kalau dijadikan satu semuanya judulnya renovasi padahal di dalamnya ada pembangunan yang *multiyears* itu menyalahi banget ini.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Ada 2 paket Bu, yang satu SMK *...(suara tidak jelas 02.10.58)*.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Iya betul ada 2 *output* Pak, tapi apakah dengan untuk 2 *output* yang berbeda satu pembangunan, satu renovasi, *input* nya harus kata renovasi, kenapa tidak dibagi dua poin saja dari awal? Ada pembangunan dan ada renovasi, saya terus terang tidak mengerti yah soal anggaran, tapi kalau saya disini membaca begini saja, asumsi saya memang benar-benar renovasi ini 90 miliar, dan neraca begini tidak bisa ditafsirkan menjadi pembangunan, ini yang menurut saya kalau kita mau curiga jadi jangan-jangan di tempat lain ada kesalahan lain juga, nyebutnya apa sebenarnya apa yang dikerjakan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Jadi judul programnya bangunan gedung pendidikan, betul Pak yah? Tapi *outputnya* ada 2 itu yang dipertanyakan Bu Dyah kan?

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pak Ketua, interupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Lamhot.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):



Ini Ibu Dyah sudah selesai?

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Iya, sebelumnya ini catatan berat ini mencampuradukan nomenklatur dan ini bahaya ini di dalam anggarannya nanti itu.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Saya sepakat itu Bu Dyah, jadi pertama kalau tingkat program kita bisa merubah, memang hak budget ada di DPR RI, bisa diubah. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ibu kandidat Doktor Bu Dyah itu benar yang disebutkan tadi, sudah mau SKM, jadi bahwa disini programnya sudah dulu dilihat, tapi ini BPSDM ini membuat di satuan 3 biarpun kami tidak bisa merombak satuan 3, hanya bisa merombak tingkat program, tapi disini di programnya itu di satuan 3 ini untuk birokrasi kan?

Seharusnya **...(suara tidak jelas 02.13.24)** satu-satuan juga, tidak bisa dua lokasi menjadi satu satuan 3, karena saya juga dulu punya pengalaman membahas sampai tingkat satuan 3.

Jadi ini langsung dibuat pembangunan gedung pendidikan SMK Bogor sama di Aceh, jadi masing-masing itu satuan 3, satuan 3 di Bogor, satuan 3 di Aceh, tapi di programnya sama, dari sisi penganggarannya begitu Pak, jadi apa yang dikritisi itu benar, artinya penempatannya itu kalau programnya ini bisa diubah.

Terus yang kedua yang mau saya tanyakan dari tadi yang di halaman berapa ini, seperti yang ada pembinaan-pembinaan itu misalnya BDI Jogjakarta alas kaki, *furniture*, industri berbasis tekstil itu yang *trainingnya* berapa lama tadi?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Yang 20 hari.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

20 hari, tapi jamin bisa kerja yah, tapi itu dilakukan di lokasi-lokasi yang ada 1, 2, 3, 7 lokasi ini yah, antara lain disitu yah?

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Antara lain.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Jadi itu dibiayai dan bisa diambil kerja?



KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

Iya.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Nah jatah per Dapil berapa itu Pak maksimum? Per orang, bukan jutanya, dibuka saja lah.

KEPALA BPSDMI KEMENPERIN RI:

500 orang Pak.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

500 orang dengan mereka dikasih pengendoran, dikasih transpor, per hari 150 ribu. Jadi itu bukan model si apa, LO-LO itu bukan yah? kalau itu sih saya sudah tahu cara kerja mereka kemarin disana juga yang disuruh *training* juga dikasih apa itu, cuma saya sampaikan ke tim saya ya sudahlah yang penting banyak orang hadir dan **...(suara tidak jelas 02.15.34)** perindustrian.

Dan lagi baru pertama dengan Perindustrian, makanya itu pelajaran tadi buat Ibu Irjen IKPA, kebetulan yang memotong rambut saya namanya IPMA juga, cuma belum jadi-jadi dipotong karena langganan. **...(suara tidak jelas 02.16.05)**

Jadi itu, maksud saya kalau LO itu kan dia untung, cari untung, jadi bagaimana meminimalisir vendor untuk tetap jadi yang ke masyarakat itu nyampai gitu, jadi baik dari semangat, transpor mereka maupun literasinya, edukasinya begitu, itu saja.

Tapi kalau yang tadi yang BPSDM ini kalau memang Ibu bisa, mereka bisa melakukan pekerjaannya, saya akan daftar 500 orang yah? jadi saya akan cari di Dapil saya, itu minimal lulusan SMK yah? bisa SMU, bisa SMK, pelatihan 20 hari dan bisa disalurkan bekerja, ada sertifikat.

Jadi itu saja, kalau soal **...(suara tidak jelas 02.16.59)** jadi saya akan terus, teman-teman Dirjen **...(suara tidak jelas 02.17.07)** bisa, itu sesuai konstitusi, itu yang paling dasar untuk konstitusi, tetapi kan inilah namanya ada sinergi, makanya bukan kolaborasi tadi Pak siapa itu, tapi sinergi. Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Nasir, 1 menit Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):



Izin Pimpinan, ini kan renovasi tadi Bapak nulisnya ada tender 3 unit, tidak mungkin renovasi, tidak mungkin lanjutan begitu loh, ini Bapak sendiri yang nulis ini, tender 3 unit, ini datanya ini yang poin 20 Bapak tunjukan tadi.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Di satuan 3 nya Pak.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Jadi gini Pak, jangan bohong-bohong disini, ini satu Anggota sudah keluar, kemarin dia melaporkan Ibu Ipna ini sampai diperiksa KPK 3 orang orang Perindustrian, jadi keterbukaan saja, memang haknya DPR itulah hak *budgeting*, anggaran, disitu, jadi kalau satu Anggota sudah kaya gini kan sudah repot ini.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Bu Haji Solat.

**F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):
ANGGOTA (NASIR):**

Tidak, dia keluar tadi, sudah dibawa kan semua barang-barang?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya sudah bilang tadi mau salat.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Tidak, maksud saya Pimpinan, ini harus *clear* begitu, supaya semua teman-teman yang memberikan masukan ini bisa diskusinya enak begitu, menurut saya Pimpinan lah yang ambil alih karena sebagai Pimpinan, tapi menurut saya harus ada keputusan yang memang betul-betul bisa mengakomodir semua teman-teman.

Kalau ini bisa jadi pertanyaan ya menurut saya didiskusikan dulu, dan harus lihat dari Kementerian juga harus menjelaskan, nanti Rapat dengan Menteri dipertanyakan lagi kan repot begitu. Mungkin itu Pimpinan, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Aruf, itu sebagai catatan yah, kita terima tadi masukannya salah satunya adalah pertama memprioritaskan program-program untuk Dapil dan juga tadi terkait nomenklatur mungkin nanti diperbaiki, karena ada perbedaan antara makna antara renovasi dan proyek lanjutan.

Nah untuk mempersingkat waktu karena sudah sore tadi, kita persilahkan coba Kepala BKSJI yah, singkat yah Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Bukan, maksudnya apa ini Ketua? Diskors dulu atau **...(suara tidak jelas 02.20.05)**.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kalau saya boleh usul begini Pak Ketua, lebih bagus semua Direktorat presentasi dulu, supaya nanti pembicaraan **...(suara tidak jelas 02.20.14)**.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Betul Pak, tidak ini season 2 ini akan Maghrib juga, kita persilahkan 2 Eselon I ini.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Yang dua ini presentasi dulu nanti baru kita skors.

KEPALA BSKJI:

Terima kasih Bapak.

Bismillahirrahmanirahim.

Yang saya hormati Pimpinan Sidang Bapak Bambang Haryadi;
Juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bapak Maman Abdurahman;
Yang saya hormati Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang berbahagia.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.



Pada kesempatan sore ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan penjelasan pada Rapat Dengar Pendapat terkait rencana kerja dan anggaran BSKJI tahun 2023.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Beberapa hal yang akan dibahas seperti terlihat pada daftar isi adalah struktur anggaran BSKJI tahun 2023, kemudian kegiatan prioritas nasional tahun anggaran 2023 dan layanan jasa kemudian inisiatif baru, tapi ini sudah lewat yang inisiatif barunya.

Izinkan saya langsung menuju kepada struktur anggaran BSKJI tahun 2023 dimana pagu BSKJI ini terdiri dari sumber dana rupiah murni sebesar 497 miliar, dimana disini ada gaji dan operasional sebesar 357,30 miliar, kemudian untuk operasional, non operasional pelaksanaan tugas fungsi sebesar 139,70 miliar, dimana ini terdiri dari *slugger* harga Syariah negara sebesar 68,8 Miliar, kemudian program prioritas nasional sebesar 35,8 Miliar, dan tugas fungsi kegiatan pusat disini ada sekretariat dan pusat-pusat ada 5 di Jakarta dan kemudian ada 24 satker, ini senilai 35,1 Miliar. Sisanya didapat dari PNPB dan BLU. Kemudian Next Slide.

Untuk belanja operasional dimana ada belanja gaji dan operasional senilai 357,3 miliar ini terdiri dari belanja keperluan perkantoran 36,93 miliar, belanja pemeliharaan sebesar 18,27 miliar, kemudian langganan listrik, telepon, air, dan sewa ini sebesar 13,26 miliar, kemudian belanja jasa senilai 10,81 miliar, dan belanja perjalanan operasional senilai 10,29 miliar.

Adapun belanja gajinya sebesar 267,75 miliar Rupiah. Kemudian untuk belanja non operasional dari rupiah murni senilai 139,70 miliar ini terdiri dari program nilai tambah dan daya saing industri serta program dukungan manajemen, dimana program nilai tambah dan daya saing industri terdiri dari pengadaan peralatan fasilitas produksi **...(suara tidak jelas 02.24.12)**.

Ini juga dengan Surat Berharga Syariah Negara sebesar 68,76 miliar, kemudian program prioritas nasional tadi 35,83 miliar, kemudian peningkatan sarana dan prasarana Rp5,54 miliar, kemudian untuk penyusunan regulasi teknis sebesar Rp5,12 miliar dan fasilitasi dan pembinaan industri sebesar 3,3 miliar.

Adapun program dukungan manajemen terdiri dari layanan internal sebesar 19,59 miliar dan dukungan kegiatan layanan publik sebesar Rp1,56 miliar. *Next Slide, next lagi.*

Nah ini struktur anggaran di Balai Besar di Tahun Anggaran 2023 dimana ada 11 Balai Besar yang ada di daerah Pak, ini Balai Besar Kimia Farmasi dan Kemasan, ini belanja gajinya 14,5 miliar, belanja operasional 7 koma, dan belanja non operasionalnya hanya Rp388 juta.

Kemudian untuk Balai Besar Agro, ini ada belanja gaji sebesar 9,2 miliar, belanja operasional 21,1 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp470 juta. Kemudian logam dan mesin ini belanja gajinya 18,5 miliar, belanja operasional 6 miliar, belanja non operasional sebesar Rp1 miliar.

Kemudian ...(suara tidak jelas 02.25.56) tekstil ini belanja gajinya 12,80 miliar, belanja operasionalnya 5,3 miliar, belanja non operasinonal tidak ada. Kemudian bahan dan barang teknik, ini belanja gajinya 8,5 miliar, belanja operasionalnya 25 miliar, belanja non operasionalnya ini ada Rp285 juta.

Lainnya untuk ...(suara tidak jelas 02.26.25) ini juga sama, belanja operasionalnya hanya sekitar Rp927 juta, saya persingkat saja untuk keramik dan mineral logam ini belanja non operasionalnya tidak ada, untuk Balai Kerajinan dan Batik Jogjakarta ini ada belanja non operasional Rp1 miliar.

Kemudian Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik di Jogja ini belanja non operasionalnya juga tidak ada, kemudian ada Balai Besar Pencegahan Pencemaran Industri di Semarang, ini belanja non operasional hanya Rp365 juta, kemudian ada lagi Balai Besar hasil perkebunan Maritim, Mineral, Logam, ini belanja non operasionalnya tidak ada.

Jadi rata-rata rupiah murni pada belanja non operasional di 11 unit Balai Besar adalah Rp412,8 juta, disini terdapat kegiatan SBSN sebesar Rp68,76 miliar di Balai Besar Kimia Farmasi dan kemasan.

Kemudian struktur anggaran Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri ini ...(suara tidak jelas 02.27.43) yang ada di 13 daerah, ini Banda Aceh belanja non operasionalnya Rp0, Medan ada belanja non operasionalnya Rp386 juta, Palembang ada Rp774 juta, Padang ada 1,3 miliar.

Kemudian Pekanbaru ada 2,25 miliar, Bandar Lampung tidak ada, Surabaya tidak ada belanja non operasional, Samarinda juga tidak ada, kemudian Banjar Baru ada belanja non operasional sebesar Rp774 juta, Pontianak belanja non operasional sebesar Rp137 juta, kemudian Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Jakarta tidak ada belanja non operasionalnya Rp0, Manado sebesar Rp658,8 juta, dan Ambon Rp787,3 juta. Jadi rata-rata rupiah murni pada belanja non operasional di 13 unit BSKJI ini adalah Rp549,15 juta.

Sebaran paling besar ini Bapak/Ibu sekalian, ini seperti terlihat di gambar ada 24 Satker untuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, kami melayani kurang lebih 22.583 perusahaan industri, kemudian ini jenis layanan jasa kami, *next slide*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2021 ada pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis, Inspeksi teknis, sertifikasi, konsultasi teknis dan optimalisasi teknologi. Kemudian layanan jasa potensialnya ada produsen bahan acuan, ada Lembaga ...(suara tidak jelas 02.30.03) verifikasi PKDN dan uji profesiensi, beberapa upaya peningkatan ada disini.



Terkait program prioritas nasional BSKJI tahun 2023, *next slide*, ini ada pagu prioritas nasional BSKJI, ada perumusan SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara sebesar Rp5,76 miliar, ini targetnya untuk 40 rancangan SNI, kemudian pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian sebesar Rp2,2 miliar, ini targetnya ada 119 Lembaga.

Kemudian ada pengawasan produk SNI wajib senilai Rp3 miliar, ini targetnya untuk 37 produk SNI wajib, kemudian pengadaan peralatan fasilitas produksi *...(suara tidak jelas 02.31.02)* ini tahun depan ada senilai Rp68,76 miliar targetnya untuk 1 paket 195 alat, tujuannya adalah untuk mendukung substitusi impor dan percepatan pertumbuhan industri PT *...(suara tidak jelas 02.31.20)* sebagai salah satu prioritas nasional melalui legalisasi produk, inkubasi industri obat tradisional dan *...(suara tidak jelas 02.31.29)* menuju kemandirian obat nasional.

Kemudian yang kelima adalah pengadaan peralatan fasilitas dan uji untuk menunjang SNI wajib senilai Rp4,2 miliar, ini di seluruh satuan kerja kami yang 24 tadi Pak, targetnya hanya 5 unit.

Kemudian program berikutnya fasilitasi pemanfaatan teknologi dan jasa industri senilai Rp11,75 miliar, ini targetnya 45 perusahaan industri, kemudian ada lagi kebijakan industri hijau dan sirkular ekonomi senilai Rp900 juta, ini ada 2 rekomendasi kebijakan, kemudian ada lagi penyusunan dan perumusan rancangan sertifikasi industri hijau senilai Rp1 miliar targetnya ada 3 rancangan sertifikat industri hijau, kemudian ada fasilitasi dan pembinaan industri hijau senilai Rp7 miliar targetnya 75 perusahaan industri.

Jadi itu program-program yang kami siapkan untuk 2023 Pak, demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih, mohon arahan selanjutnya, terima kasih Pak.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Terima kasih Pak, saya mohon izin walaupun saya menggantikan sementara Pak Bambang, karena beliau mendadak ada tamu jadi *...(suara tidak jelas 02.33.01)*. Iya, terima kasih Pak dari BSKJI, selanjutnya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sebentar saja interupsi sedikit, sebenarnya gini saja Pak Ketua, kita skors tapi masing-masing, kan ini ada laptop, ada tim staf mengetik setiap Direktorat itu apa saja yang bisa program di daerah pemilihan.

Itu nanti disampaikan, sebenarnya itu saja, karena saya lihat seperti yang terakhir ini kebanyakan gaji sama operasional kantor, jadi yang harian juga ada jadi lebih singkat, kita juga mendukung kebijakan Pak Menteri Perindustrian, tetapi kan sudah ada kesepakatan juga, artinya bahwa Pak



Menteri juga memahami perlu pengembangan di daerah-daerah yang sudah diawasi oleh Anggota-Anggota DPR RI Komisi VII, itu intinya, jadi memang kan beliau tahu ada hak *budget* DPR RI, tapi sinergi, nah itu diketik dulu nanti jadi sudah tahu program ini, program ini misalnya IKMA ini, ini, ini, nah ini seperti tadi misalnya yang *traniing-training* itu 500 orang nah itu berapa puluh orang sekali *traning*, jadi ada semua seperti itu saja Pak Ketua, jadi singkat kita tinggal ketuk saja nanti, kalau kira-kira *match* gitu, demikian Pak Ketua terima kasih.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pak Ketua **...(suara tidak jelas 02.34.32).**

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Gini, gini, boleh tidak biar diselesaikan dulu satu lagi baru nanti ini, sebetulnya begini Pak Ramson tapi ini untuk merespon Pak Ramson, makanya tadi itu di awal saya bilang kita ini ngapain mundur lagi? yang detail-detail tadi program-program itu sebetulnya kita sudah amanahkan, tadi Ibu Ratna minta, Ibu Andi Yuliani Paris, dan biasanya ada Mba Mercy tapi karena tadi Mba Mercy agak telat jadi akhirnya cuma beliau berdua, tapi ternyata masih panjang lagi permainan kan begitu. Tapi tidak apa-apa.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua interupsi, memang Bapak-Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen ini agak nambah, jangan nambah lagi, kita **...(suara tidak jelas 02.35.12)** ya sudah, detail saja, adat kita itu memang biasa politisi kita ini kan retorikal biasa tetapi sebagai Komisi VII yang kita memang energi, yang memang luar biasa dukungannya sampai detail kita juga bisa masuk ke dalam.

Nah jadi ini langsung saja **...(suara tidak jelas 02.35.30)**, singkat saja ini, ini bisa, oh jadi Anggota melihat kan oh ini, ini, nah sudah nanti bisa **...(suara tidak jelas 02.35.37)** itu saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, tidak apa-apa, selanjutnya Pak **...(suara tidak jelas 02.35.42)**, terima kasih Pak Ramson masukannya. Dari Hubungan Luar Negeri tadi, pokoknya urusan-urusan luar negeri lah yah, silahkan Pak.

DIRJEN KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL:

Terima kasih Bapak Pimpinan, seizin Pimpinan dan rekan-rekan **...(suara tidak jelas 02.36.00).**

Bismillahirrahmanirrahim.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya.

Mohon izin Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk menjelaskan rencana kerja Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional tahun 2023 sebagaimana telah diusulkan sebelumnya, dan saat ini telah mendapatkan alokasi pagu anggaran.

Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas tambahan anggaran yang telah diberikan oleh Komisi VII kepada kami dari kebutuhan anggaran sebesar 169 miliar yang kami butuhkan untuk penyelenggaraan ...(suara tidak jelas 02.36.56), kami mendapat tambahan sejumlah 109 miliar.

Next slide, pada bagian pertama ini kami jelaskan perihal pagu anggaran Direktorat Jendral KPAI dan peruntukannya guna mencapai rencana kinerja tahun 2024. Tahun ini kami mendapatkan pagu sebesar 216,9 miliar yang terdiri dari 2 program yaitu program dukungan manajemen sebesar 40,78 miliar dan program nilai tambah dan daya saing industri sebesar 176,15 miliar, dari 176,15 miliar ini sebesar 140 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan ...(suara tidak jelas 02.37.48) dimana Indonesia menjadi ...(suara tidak jelas 02.37.49).

Sedangkan untuk masing-masing Direktorat ini memang rata-rata antara 3-4 miliar anggarannya, kecuali di Direktorat Perwilayahan Industri yang 18 miliar tetapi sejumlah 14 miliar itu digunakan lagi untuk renovasi kawasan industri Palu atau KEK Palu yang sudah 4 tahun terbakar akibat gempa.

Mohon izin kami sampaikan berikutnya, dari anggaran Direktorat Jenderal KPAI ini rata-rata kami mendapat anggaran antara 3,4% sampai dengan 5% setiap tahun.

Halaman berikutnya, tahun ini anggaran kami presentasinya cukup tinggi karena memang ada kementerian turun jadi sekitar 7,4%, namun dari 216 miliar tersebut 140 miliar memang didedikasikan untuk ...(suara tidak jelas 02.38.48) jadi mohon izin kami adalah Direktorat Jendral yang ketiga yang ditugasi untuk penyelenggaraan ...(suara tidak jelas 02.38.56) dan baru tahun depan memang direncanakan secara fisik setelah tahun 2020 dibatalkan.

Nah ini dengan demikian memang sepertinya terlihat dikit namun sebenarnya presentase anggaran kami untuk pelaksanaan tugas kami menurun.

Selanjutnya terkait dengan target kinerja tahun 2023 ada 9 hal, yang pertama meningkatnya penguasaan pasar industri, ini ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan perundingan-perundingan internasional dan untuk tugas kami dalam rangka industrial dan market ...(suara tidak jelas 02.02.56).



Juga untuk promosi internasional dan pedampingan untuk promosi industri di luar negeri. Yang kedua adalah meningkatnya persebaran industri, yaitu kawasan-kawasan industri prioritas terutama diluar Pulau Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi, kemudian pengembangan kawasan-kawasan industri dan penataan zona-zona industri termasuk juga penambahan kawasan-kawasan industri dengan tematik tertentu.

Berikutnya adalah meningkatnya daya saing dan kemandirian industri terutama untuk peningkatan nilai investasi sektor industri pengolahan. Halaman berikutnya yang keempat, meningkatnya pemanfaatan industri barang dan jasa dalam negeri, ini kami punya tugas untuk bagaimana penggunaan produk dalam negeri bisa lebih meningkat terkait dalam hal pengadaan barang dan jasa, karena ini berkaitan dengan peningkatan iklim usaha industri.

Berikutnya adalah tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif dengan penyusunan-penyusunan regulasi yang lebih efektif dengan model *Smart Regulations* sehingga bisa efektif kita gunakan.

Berikutnya adalah terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja Dirjen *...(suara tidak jelas 02.40.50)*, tata kelola yang efektif dan efisien dan meningkatnya kinerja ASN dan efektifitas organisasi.

Mungkin bisa kami lanjutkan ke halaman berikutnya, terkait dengan kegiatan bulanan tahun 2023 ada 3, yang pertama partisipasi Indonesia sebagai *...(suara tidak jelas 02.41.07)* yang kami selenggarakan secara fisik di Hanouwer dengan anggaran sebesar 140 miliar.

Yang kedua adalah fasilitasi penerbitan izin usaha kawasan industri di luar Jawa yang sekarang lebih tematik untuk pengolahan Sumber Daya Alam, dan yang ketiga adalah *...(suara tidak jelas 02.41.26)* kawasan industri Palu yang juga sebagai KEK Palu yang sudah 4 Tahun berjalan. Itu adalah ketiga kegiatan unggulan.

...(suara tidak jelas 02.41.36) perlu didetailkan satu per satu mohon izin Pimpinan, atau cukup sampai disini karena sebenarnya hanya sampai disini saja yang terkait dengan kegiatan-kegiatan *...(suara tidak jelas 02.41.47)*. Demikian, terima kasih atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang terhormat, dan kami mohon arahan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, terima kasih Pak Riko, intinya program yang besar itu kan yang Hanouwer Maese, persiapannya *...(suara tidak jelas 02.42.05)* ulan apa Pak kegiatannya itu Pak?

PEMERINTAH (DIRJEN KETAHANAN PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL):



Hanouver Maese ini kami sudah mendapat jadwal akan diselenggarakan antara tanggal 17-21 April, tapi 2 minggu yang lalu kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan ...(suara tidak jelas 02.42.19) sebagai penyelenggara, dapat dimundurkan 1 minggu Pimpinan, bahkan tanggal 21-22 sesuai kalender kita adalah Hari Raya Idul Fitri, sehingga akan lebih efektif apabila diselenggarakan setelah ...(suara tidak jelas 02.42.31) dan butuh kehadiran Bapak Presiden di Hanouver.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, terima kasih atas pemaparan semuanya Pak dari Eselon I Kementerian Perindustrian, selanjutnya silahkan Mba Mercy ada?

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Izin interupsi Pimpinan ...(suara tidak jelas 02.42.52).

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Saya itu senang kalau lihat Mba Mercy sudah senyum-senyum, senang saya. Iya silahkan ini calon pengantin Mba Roro, *monggo* Mba Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Terima kasih Ketua, saya hanya ingin menanyakan tadi yang dari paparan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, yang sebelum yang barusan, tapi orangnya *enggak* ada yah?

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

BSKJI (Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri).

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI, WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Apa kita tunggu saja Ketua?

Oh ya sudah, intinya sebetulnya lebih ke substansi sih, pertanyaan saya itu lebih terhadap tadi kan di *slide* nomor 12 membahas mengenai kebijakan industri hijau dan juga sektor ekonomi ada juga fasilitasi dan juga pembinaan industri hijau.

Nah pertanyaan saya sebetulnya adalah disebut disini ada 75 perusahaan industri, saya ingin mengetahui itu industri apa saja, ataupun perusahaannya itu apa saja agar kami di Komisi VII itu juga lebih paham



mengenai bagaimana sih sebetulnya penerapan daripada *Secure Economy* tersebut, karena pasti mekanisme ataupun mekanisme yang diterapkan di setiap perusahaan ataupun industri mungkin berbeda-beda gitu, jadi saya ingin mengetahui sebetulnya yang menjadi prioritas itu seperti apa?

Lalu kemudian nanti kalau misalnya kita mendapatkan tadi yah, rincian 75 perusahaan industri itu bisa kita jadwalkan juga misalnya kunjungan ke salah satu perusahaan untuk melihat secara *real* gitu penerapannya seperti apa, karena ini lumayan ini, kan ada yang, karena untuk fasilitasi dan juga pembinaan industri hijau saja sudah 7 miliar sendiri gitu alokasi anggarannya. Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, **...(suara tidak jelas 02.44.58)** mentang-mentang tadi Mba Roro bahas hijau-hijau, pakai baju hijau ini juga, silahkan Mba Juwi.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E, M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya nyambung sama Jeng Roro untuk pertanyaan BSPJI, owh ini tulisannya BSPJI, meskipun Pak Kepala *enggak* ada tapi jajarannya ada yah, nanti tolong disampaikan.

Saya tertarik dengan sumber pendanaan dari BSKJI, di halaman 3 disampaikan kalau yang 93 miliar itu dari PNBPN, yang 96 miliar dari BLU. Ini sekaligus menjadi *stressing* kita Pimpinan, karena memang Komisi VII ini bagian untuk nyari duit dalam tanda petik, kemarin kami di Banggar sudah memanggil 6 kementerian dan lembaga penyumbang PNBPN terbesar yang ada di Indonesia dan mereka kita minta untuk bisa meningkatkan pendapatan PNBPN ke depan.

Saya khawatir kalau misalnya BSKJI ini tidak bisa mempresentasikan dengan baik program-program prioritas yang ditugaskan ke Lembaga tersebut, lalu bagaimana seandainya PNBPN dan BLU ini tidak bisa diperoleh? Apakah otomatis program-program tersebut *didrop* atau bagaimana?

Yang berikutnya saya tertarik juga dengan halaman 8, halaman 8 ini disampaikan kalau BSKJI Pekanbaru belum mendapatkan persetujuan penggunaan PNBPN untuk kegiatan non operasional sebanyak 2,2 miliar sekian, padahal tadi disampaikan kalau se Indonesia itu sudah ada 22.583 industri yang jadi pelanggan, saya tidak ngerti jumlah persisnya berapa yang ada di Pekanbaru, nah artinya kalau ini juga tidak mendapatkan kejelasan terkait anggaran lalu bagaimana nasib industri yang telah menjadi pelanggan yang ada di Pekanbaru ini? Itu juga saya ingin mendapat kejelasan.



Yang terakhir, untuk yang hijau-hijau tadi sudah disampaikan Bu Roro Pimpinan, sehingga saya menyoroti yang di halaman 10 saja, bisa ditampilkan yang di halaman 10, *sorry* halaman 11 ternyata, ada perumusan rencana SNI yang akan menghasilkan 40, total anggaran yang dibutuhkan adalah 5,76 miliar, ya kalau misalnya saya hitung berarti ada sekitar 144 juta per rencana SNI tersebut.

Yang ingin saya tanyakan apa bentuk dari rencana SNI yang dihasilkan oleh BSKJI ini, dan seberapa besar manfaat untuk industri-industri yang diberikan ini, sehingga nilai keekonomian yang dikeluarkan negara dalam rangka mengeluarkan rencana ini itu bisa *worth it* dengan *Outputnya*.

Yang terakhir Pimpinan, saya ingin menyampaikan ke Dirjen KPAI ini, kita tahu bagaimana besar *passions* Pak Menteri terkait pameran yang ada di Hannover Maese, dan kita juga tahu yah Pak, bahwa ini kesempatan yang besar juga untuk kita untuk bisa menarik investasi di bidang industri sebanyak-banyaknya yang ada di Indonesia.

Cuma saya ingin nitip Pak, kita ngeluarin *budget* lumayan, total sekitar 200 miliar kemarin kalau yang disampaikan oleh Pak Menteri yah. Tolong dihitung Pak, antara besaran *cost* yang kita keluarkan itu dengan nilai investasi yang akhirnya bisa kita tarik ke Indonesia di bidang industri, jadi spesifik gitu Pimpinan, sehingga kemarin juga ada beberapa sentilan-sentilan yang kurang menyenangkan gitu Pimpinan, karena Expo kita yang di Dubai yang menghabiskan dana begitu banyak, tapi untungnya bukan dari Kementerian Perindustrian, itu hasilnya tidak sesuai seperti apa yang diharapkan begitu.

Jadi saya berharap mitra kita di Kemenperin ini benar-benar bisa professional dalam menjalankan penugasan yang sangat istimewa ini. Begitu Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya, terima kasih Mba Juwi, selanjutnya terakhir Pak Nasir habis itu respon dan kalau memang itu kita langsung masuk ke kesimpulan yah, silahkan Pak Nasir *monggo*.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Oh langsung masuk kesimpulan yah?

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**



Tidak maksudnya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Tidak maksudnya setelah Pak Nasir.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kalau memang tidak ada langsung balik kesini ya.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Langsung kesimpulan? Tidak ada lagi percakapan lain-lain?

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tidak, kecuali kalau misalkan ada tanggapan dari teman-teman.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kalau gitu kita usul konkret juga Pak, biar tuntas gitu.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Ya sudah silakan Mba Mercy, silakan, silahkan Mba Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, tadi dikatakan cukup panjang yah mulai dari Dirjen **...(suara tidak jelas 02.51.37)** yang lain saya tidak hadir yah, **...(suara tidak jelas 02.51.40)** dan 2 Dirjen yang lain, saya usul konkrit saja supaya ada azas keadilan **...(suara tidak jelas 02.51.50)** semuanya di kolom itu soalnya kita tidak ada yang disini juga gitu, ini untuk kepentingan rakyat saja gitu.

Jadi yang paling pertama Pak Ketua, kalau saya boleh mengusulkan dari Dirjen BPSDMI untuk kegiatan prioritas nasional yang 457 miliar tadi ada opsi Pak Ketua, opsinya untuk yang 26.000 untuk 200 miliar, dari 20 hari kurang lebih sekitar 500 orang peserta Diklat per anggota ditambah dengan sertifikat itu bisa menjadi 10 hari sertifikat 1.000 orang, ini masih dari yang 200 Miliar.

Saya usul karena supaya kita tidak ribut panjang lebar, kalau tidak mau diotak-atik untuk urusan yang pembangunan-pembangunan ini kita minta konfirmasi saja, mungkin dari yang urusan pembangunan, ada satu bagian saja



yang coba kita bijaki Pak Ketua, kalau diizinkan oleh *floor* ini Pimpinan dan pihak Pemerintah Pak Dirjen, khusus untuk yang poin 10 renovasi bangunan SMK mungkin kita tarik sekitar 50 miliar naik ke poin 1 yaitu tenaga kerja industri kompeten urusan Diklat.

Jadi per setiap anggota kalau dengan format 10 hari sertifikat dan 1000 ditambah dengan 50 miliar ini menjadi hanya 1.250 orang per anggota 10 hari, dengan catatan untuk renovasi bangunan SMK, karena 50, yang lain kita tidak kotak-katik, bagian ini saja yang kita coba alihkan ke poin 1, toh ini kan dikerjakan di dalam di Dirjen ini, tidak dialihkan ke Dirjen-Dirjen yang lain. 50 yang tersisa ini, ini yang kita perjuangkan dari 400 miliar yang akan kita upayakan di Banggar, jadi kita optimalisasi dari yang ada dulu Pak Ketua, di Banggar ini kita sementara **...(suara tidak jelas 02.54.08)**.

Pak Ketua, jadi supaya kita yang ada disini juga tenang dari dana optimalisasi yang ada, dari pertarungan kita misalnya di Badan Anggaran ada 400 lagi, ya mungkin ini menjadi komitmen-komitmen kita bersama gitu loh, tapi dari APBN murni ini terlihat keberpihakan kita rapat dari tadi, soalnya benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak gitu loh.

Saya tidak bahas yang optimalisasi plus tambahan 400 miliar nanti di Badan Anggaran, jadi itu usul kongkrit yang pertama.

Usul kongkrit yang kedua, yang berkaitan dengan urusan IKMA, tadi saya tidak hadir yah tapi karena ini semua mau kesimpulan besar, semuanya jadi, total itu 9.090 kepesertaan atau peserta Diklat dengan peralatan, kemudian 165 peserta per setiap Dapil, berarti seperti itu per setiap anggota yah.

Dari yang lama tanpa perawatan itu sebesar 240 peserta. Untuk 2023 ini kalau kami boleh usulkan mungkin yang 165 ini tinggal dikali 2, dapat **...(suara tidak jelas 02.55.38)** darimana? Karena ini harus dikali 2 yah, 165 dikali 2 menjadi 350 peserta dengan peralatan dan lain-lain.

Tadi ada sejumlah opsi, ada sejumlah opsi jumlah hari dan yang lain-lain tinggal diatur ke dalam Pak Ketua, jadi memperlihatkan ini kita ada naik kelas Pak, dari fase anggaran tahun ini dibandingkan dengan tahun yang akan datang, kalau angkanya sama persis antara tahun ini dengan tahun yang akan datang ngapain kita bela-belain Rapat panjang lebar seperti ini.

Dan bahwa kita tidak sangat ekstrim yah dibandingkan rapat tahun-tahun kemarin, kita bisa pindahkan anggaran dalam jumlah alokasi yang sangat besar dialihkan ke Dirjen mana bisa, tapi ini tidak **...(suara tidak jelas 02.56.32)** kita sangat menghargai Kemenperin dibawah komandannya Pak Maman, mungkin kita hanya minta kebijaksanaannya saja sehingga urusan yang berkaitan dengan 2 program **...(suara tidak jelas 02.56.47)** itu yang diatur sedemikian rupa usulan tadi dengan opsi-opsi lah yang ditawarkan. Saya kira mungkin itu saja Pak Ketua.



F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Intrupsi Pak Ketua, sedikit saja.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Jadi tadi kita sudah sepakat, kita skors, waktu kita skors mitra kita Dirjen-Dirjen dan Badan membuat rincian program yang bisa direalisasikan di Dapil, itu saja jadi kita jangan retorika lagi, terlalu banyak retorika, kita lihat nanti itu sebagai lampiran bisa terangkum dalam ini bisa tidak, tetapi suatu informasi ke kita, sesudah oke nanti baru oke kesimpulan, jadi skors dulu saja, dikerjakan 1-2 jam kan bisa, kan banyak staf ahlinya.

...(suara tidak jelas 02.57.38) banyak yang pintar-pintar di Kementerian Perindustrian, apalagi ...(suara tidak jelas 02.57.41) Eselon IV dan III. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, terima kasih Pak Ramson, tapi begini, saya ini orangnya sesuai dengan komitmen, kita skors tapi saya mau selesai, jangan lagi nanti ada yang datang lagi telat, mohon maaf yah ini berlaku untuk semuanya, bukan berarti saya dianggap otoriter atau *enggak*, kita bicara komitmen saja dan lancarnya alur rapat ini, walaupun kalau dibilang Pimpinan rapat itu berhak mengizinkan siapapun yang bicara.

Artinya begitu loh maksud saya, biar dia jelas gitu daripada kita berdebat kusir, kita ini kan bukan anak kemarin sore semuanya, sudah paham sama paham gitu, apa maunya ini ada maunya gitu loh, supaya ini berjalan sesuai dengan.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Sekali lagi interupsi Pak Ketua, supaya dibuat terperinci jelas, sudah itu aja.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya setuju, setuju.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):



Habis itu kita lihat ada yang *enggak* cocok kita perbaiki, cocok sudah putus.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Begini, setuju saya, tapi tidak mungkin Pak Ramson semuanya, di rapat ini kita putuskan, dari tadi kan saya sudah bilang, tadi itu kenapa saya agak bereaksi, nah ini saya harus menyampaikan dulu, tadi kan ada Ibu Juwita, ada Ibu Andi yang memang kita tugaskan untuk membuat secara rinci hak veto sepenuhnya kita serahkan, tapi kan ternyata masuk rapat diperdebatkan lagi, lalu tadi mau Rapat di belakang itu ngapain gitu loh maksud saya, jadi saya maunya kita komitmen dulu, jadi kita skors, kita tugaskan, oke sekarang kita konkret saja dalam forum ini, Ibu Juwita, Ibu Mercy *monggo* silakan, terus Pak Ramson, dari Golkar mungkin Pak Gandung yah.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, beliau-beliau saja yang membuat programnya langsung ditujukan disana, habis itu kesimpulan sudah itu saja, saya pikir sudah dicerna yah yang tadi apa yang kita bahas.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar-sebentar, paham saya, jadi gitu yah, kita konkret saja habis ini kita skors tapi nanti kita tugaskan saja, *monggo* nanti didiskusikan secara detail programnya, karena begini kalau tatap muka panjang lagi Pak, jadi maksud saya kita percayakan saja kepada teman kita yang ada disini itu diskusi dengan kementerian detail, apa programnya, misalnya ada 10 program, kan begitu maksud Pak Ramson kan, apa-apa saja A, B, dan C, saya pikir seperti itu yah. Jadi setuju yah.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Tadi ikut itu notulen rapat tadi itu yah, supaya kalau berkembang tadi di sarikan, itu yang disistematikan.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, baik, konkret Pak yah.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Gitu saja, supaya programnya konkret dan detail sesuai dengan tadi.



**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silahkan Pak Nasir.

F-DEMOKRAT (MUHAMMAD NASIR):

Terima kasih, tadi memang rapat pertama jumlah pesertanya juga dari Kementerian baru separuh, memang ditambahin Dirjen ILMATE, yang lain tidak ada yah? ILMATE Pak Kepala Badan yah, terus Bapak tidak *enggak* ada yah? Tapi kan Bapak tidak ada berbicara, nah mungkin tadi yang disampaikan Pak Ramson itu benar, Bapak harus menjelaskan per programnya apa, takutnya anggaran yang Bapak pakai dengan anggaran yang dipakai beliau ada tumpang tindih gitu, jadi harus *clear* Pak, nah supaya nanti kalau disitu ada berarti programnya untuk Anggota apa, kalau saya terus terang Fraksi Demokrat, tadi saya **...(suara tidak jelas 03.01.26)**

Cobalah Bang sampaikan sama Pak Sekjen, kami dari Fraksi Demokrat akan menolak anggaran yang dikelola Pak Sekjen, karena kami tidak mau ada nomenklatur yang dikelola Pak Sekjen ini yang menurut kami Pak Sekjen tidak wajib untuk mengelola nomenklatur itu, karena harusnya Bapak berdua ini bisa dikelola, nah gitu.

Jadi kami nanti Fraksi Demokrat akan membuat catatan untuk Pak Sekjen, silahkan dijalankan tapi kami akan buat catatan untuk menolak anggaran tersebut.

Jadi *clear*, bahwa untuk yang lain mungkin kita minta penjelasan biar *clear*, karena memang tadi saya di rapat kecil pun di bawah Pak Maman saya mempertanyakan itu terus, sampai saya konsultasi dengan Pak Tifatul apa bisa Sekjen mengelola anggaran teknis begitu. Mungkin itu Pak.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Yang penting kan *clear* yah dari Demokrat begitu yah posisinya, ya silahkan Pak Gandung.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Terima kasih.

Saya hanya ingin **...(suara tidak jelas 03.02.50)** dari Sekretaris Irjen, ini bagaimana nasibnya? Tadi masih ngambang, bisa dipertanggung jawabkan, bisa memutuskan kebijakan yang kita ambil dan bagaimana kontak dengan Dirjen yang sekarang di luar kota?



Rapat ini sebuah kompromi jadwal antara eksekutif dan legislatif, lalu saya tanya mohon disampaikan, acara diluar kota itu sesudah atau sebelum rapat ini, ini namanya pelecehan eksekutif, pelecehan legislatif, ini penting Pak karena sudah dua kali, karena sudah dua kali ketiga kalinya sudah betul-betul perlu surat peringatan ini.

Kemudian dari hasil ini Saudara Sekretaris bisa *enggak* mewakili, tidak sekedar membacakan pemaparan, bertanggung jawab atas isi dan keputusannya, ini penting...(suara tidak jelas 03.04.14) dan ini Pak Sekjen juga bertanggung jawab, dulu kita ...(suara tidak jelas 03.04.22) itu Dirjennya tidak ada yang bertanggung jawab Sekjennya.

Kemudian yang kedua, hasil tadi pertemuan lobi tadi jangan dirubah dan tidak bisa dirubah, jadi apabila ingin lobi lagi ya hal-hal yang belum terputuskan disini kita lobbykan, nanti kita ada lagi lobby ketiga atau karena di *anu* tidak akan berkesudahan nanti, jadi puas hati tidak puas hati, dilobi, diterima dan disini harus diterima, tidak membuat ...(suara tidak jelas 03.05.16) yang diluar ...(suara tidak jelas 03.05.22).

Dan saya minta Pimpinan yang pertama juga bertanggung jawab hasil waktu itu karena yang memegang lobi adalah Pimpinan pertama masa tidak kelihatan terus tidak tahu, anak buahnya disini kan, ini malah Pimpinan yang kedua ...(suara tidak jelas 03.05.48) jadi ini penting untuk kita karena yang namanya lobi itu juga disamping keputusan setiap Anggota dengan juga kebijakan fraksi, kepanjangan fraksi, jadi misalnya fraksi sudah tidak ada masalah seharusnya semua Anggota tidak ada masalah, terima kasih.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, bagaimana Pak ...(suara tidak jelas 03.06.19)? Tadi saya minta yah, sekali lagi saya tegaskan kita skors masuk ke istirahat sekaligus forum lobi, jam 6 kita mulai masuk lagi, kita *clear* enggak ada lagi dusta diantara kita.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, tunggu Pak Ketua Rapat, jadi sebenarnya bukan forum lobi lagi, mitra sudah tinggal menginventarisasi saja nanti diumumkan itu saja, *enggak* perlu forum lobi lagi, itu kan sudah tahu langsung diketik saja.

KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Demi Mr.Bond kita kasih betul-betul biar tuntas setuntas-tuntasnya, jadi biar makin. Oke, terima kasih yah jadi rapat kita skors sampai Pukul 18.30 masuk kita langsung kesimpulan, jam 7 kita langsung masuk.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):



19.30 saja Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (DONY MARYADI OEKON/F-PDI PERJUANGAN/WAKIL
KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oh kemalaman Pak. Jadi kita skors 18.30, terima kasih.

RAPAT DISKORS

**F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN,
S.T.):**

Beberapa saat yang lalu kita sudah melakukan rapat lobi di belakang dan hadir disini teman-teman fraksi dan sebagian masih di ruang makan, kita mendapatkan satu kesepakatan di dalam rapat forum lobi, memang tadi sempat ada beberapa wacana terkait mengenai alokasi anggaran, namun *Alhamdulillah* terbangun sebuah kesepakatan bahwa pengusuran anggaran yang sudah dimasukkan di dalam nota keuangan tahunan kurang lebih sekitar berapa tadi Pak? 2,87 triliun Pak, betul kan angkanya total?

Iya total itu berdasarkan ada tambahan anggaran kurang lebih sekitar **...(suara tidak jelas 00.01.10)**. Dari total 2,97 m, 2,97 dimana ada tambahan kurang lebih 287 miliar berdasarkan nota keuangan yang masuk di rapat sidang terakhir, itu pada prinsipnya kami Komisi VII menyetujui dan kita juga menyepakati bahwa kita bersepakat untuk memberikan tambahan anggaran kurang lebih sekitar 400 miliar, dengan catatan ingin diperuntukan semuanya untuk program pemberdayaan industri kecil menengah dan di daerah-daerah potensial, itu catatannya yah.

Jadi harus dipahami juga Kemenperin harus tahu bahwa 400 miliar tambahan nanti itu tidak ada masuk ke tempat-tempat lain, tapi hanya masuk ke, kebetulan Dirjennya ada di Dirjen IKMA yang kebetulan juga makanya kalau Bapak mau tetap tambahan ya berubahlah jadi wanita iya kan, ini satu-satunya wanita di Eselon I ya beliau, jadi beliau yang dapat, memang yang paling ngotot Ibu-Ibunya juga Pak di Komisi VII ini, jadi *Girl Power*, jadi Bapak harus paham ini, kalau kita itu kalau urusan begini ya Ibu-Ibunya saja.

Jadi saya pikir itu, ada komentar dari yang lain? Cukup yah, saya mohon izin yah kita bisa masuk ke kesimpulan yah setuju yah, silahkan. Kesimpulan hanya 2 saja sementara yang dibuat oleh sekretariat tapi kalau misalnya nanti ada tambahan *monggo* saja, saya bacakan.

Draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kemenperin Sekjen, Dirjen, Agro, dan bla, bla, bla sampai ke

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, Senin 5 September 2022:

1. Komisi VII DPR RI bersepakat dengan jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian RI terkait Pagu anggaran Kementerian Perindustrian sebesar 3,317 triliun bla, bla, bla dengan rincian sebagai berikut : Kesekjenan 308 miliar, Dirjen Agro 76 miliar, Dirjen IKFT 88 miliar, Dirjen Ilmate 97 miliar, Dirjen IKMA yang awalnya 401 miliar bertambah menjadi tambahan 400 miliar jadi kurang lebih sekitar 800 miliar, dimana sebelumnya sudah ada sekitar 200 miliar jadi artinya ada 600 miliar anggaran yang akan dialokasikan untuk pemberdayaan daerah-daerah potensial, lalu yang keenam Irjen 43 miliar, BSKJI 687 miliar yang dimana itu tidak diambil hanya dari yang lebih yah, jadi ada beberapa anggaran dana dari BLU juga itu yah terus satu lagi PNBPN, itu jadi biar patut dipahami oleh semuanya, Dirjen KPAll 216 miliar yang tadi juga ada program besar kita yaitu Hannover Masea yang juga mungkin menjadi target program, target Pak Presiden juga akan hadir di acara ini, nah ini ada catatan ini Pak,

Mohon nanti teman-teman Komisi VII keterlibatannya untuk diundang juga untuk bisa turut serta di acara sana, tadi ada wacana kalau dari anggaran yang ada itu bisa berapa tadi itu, 9, saya pikir Bapak harus buat itu bisa minimal setengah yang nanti bisalah dalam proses perjalanan Pak, kita bisa tanda tangan perubahan anggaran saja nanti yang mungkin bisa masuk.

Saya pikir itu Pak, supaya teman-teman Komisi VII juga bisa berangkat lagi, kita berharap ini bisa menjadi program rutin Komisi VII. Lalu yang terakhir BPSDM industri 994 miliar. Jadi total dari yang awalnya 2,917 bertambah kurang lebih sekitar 3,317 triliun.

Setuju?

Setuju yah?

(RAPAT : SETUJU)

Iya, turun lagi ke bawah.

2. Komisi VII DPR RI menyetujui tambahan anggaran untuk Dirjen Industri Kecil Menengah IKMA sebesar 400 miliar untuk keperluan program di daerah-daerah yang memiliki kemanfaatan langsung kepada masyarakat, khususnya peningkatan program Wirausaha Baru.

Ada tambahan redaksional? Mba Mercy ini biasanya. Naikin dikit.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):



Jadi, daerah-daerah yang memiliki kemanfaatan langsung ke masyarakat khususnya peningkatan program Wirausaha Baru koma, dengan menambah jumlah volume, supaya dicocokkan sama saja dengan yang ESDM, dengan menambah jumlah volume dan penerima manfaat, volume penerima manfaat dan, *sorry* karena kita ada kesepakatan untuk tambahan peralatan.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Iya, dan mungkin dengan menambah jumlah penerima manfaat beserta dengan peralatan-peralatan penunjang peningkatan kewirausahaan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, volume kan juga bertambah Pak Ketua, jadi menambah jumlah penerima.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Peralatan penunjang peningkatan kewirausahaan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya, jumlah penerima manfaat beserta dengan peralatan penunjang kewirausahaan.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Iya, peningkatan kewirausahaan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Volume tidak perlu lagi yah?

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Iya kayanya volume *enggak* perlu kali Mba.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Iya karena volume itu kemarin.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Menambah jumlah penerimaan, cocok?



F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Cocok.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Cocok yah, ada lagi?

Ini kalau Bapak interupsi bisa berubah ini Pak.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak Ketua, itu...(suara tidak jelas 09.00) jadi perhatian saja.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Potensi membangun tidak Bu?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Eenggak, maksudnya untuk memastikan saja, kan kemarin itu kan ada sejumlah opsi waktu itu habis dibahas untuk yang program yang sekarang ini, ternyata akhirnya kan kita ...(suara tidak jelas 09.15), nah sementara peralatan yang mau dibagi katanya untuk 20 orang 1 jenis peralatan atau 5 orang 1 jenis peralatan.

Nah saya minta apakah ini masuk akal tidak Pak Ketua, untuk per orang dia dapat peralatannya, jadi dia bisa pisahkan gitu. Hanya untuk kepastian saja.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Monggo Bu, silahkan Bu.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Kalau gabung-gabung rentengan kaya begitu itu selamat tinggal sudah.

PEMERINTAH:

Kalau untuk teknisnya memang sudah kami susun jadi memungkinkan saja 1 orang bisa mendapatkan 1 peralatan sepanjang memang memenuhi paket yang kita tetapkan, jadi misalnya dengan simulasi per paket dapat 49 juta misalnya, nah ketika keperluan alatnya hanya seharga 10 juta mungkin bisa dapat 4, tapi kalau alatnya harganya 2 juta mungkin bisa dapat tiap anggota,

tapi memang sesuai dengan arahan Pak Menteri untuk ke depannya kita mengutamakan alat produksi dalam negeri.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Oke, prinsipnya begini Bu, jangan sampai mengurangi atau menghilangkan penambahan jumlah penerima, itu dulu satu, namun terkait mengenai penambahan peralatan dan lain sebagainya tentunya dengan ada penambahan anggaran sangat masuk akal itu bisa jadi ada penambahan, betul tidak?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Pak ketua, kan tadi hitungan awal 240 orang 12 X 20, nah ini sekarang sudah dipotong hanya 165 orang dengan peralatan, kan mestinya kan kalau dihitung-hitung operasional supaya biarlah 1 orang dengan peralatannya kita tidak bisa lagi hitung dengan pendekatan normatif yang kemarin, jadi **...(suara tidak jelas 11.29)**, kita setuju tapi per orang.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Oke, artinya dengan catatan setiap orang mendapatkan tunjangan peralatan untuk peningkatan kewirausahaannya, setuju yah?

RAPAT SETUJU

Sudah, selanjutnya yang ketiga ada lagi?

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Maka formulasinya ditulis Pak Ketua, diketuk tapi formulasinya ditulis penerima peralatan per orang, peralatan penunjang peningkatan kewirausahaan per orang atau per penerima manfaat, terima kasih.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Pimpinan, coba saya dijelaskan peralatan orang semua peserta itu nanti bentuknya seperti apa, dan apa begitu, jangan sampai *panjenengan* sanggup tapi tidak bisa terlaksana, sebab tidak muat peralatan untuk produksi itu, coba saya dijelaskan, kalau per orang atau per kelompok saya masih bisa memaklumi.

PEMERINTAH:

Iya, jadi formulasi per peserta 2j1uta memang ini untuk yang dana 200 miliar Pak, jadi dengan adanya penambahan 400 miliar kan pasti juga volumenya akan bertambah dari sisi kepesertaan kemudian juga kemungkinan dia untuk mendapatkan peralatannya per peserta.



Jadi memungkinkan saja kondisi seperti itu Pak, karena memang tergantung dengan ...(suara tidak jelas 13.09), bisa saja juga kita tidak melalui Bimteknya Pak, karena kita mengasumsikan Bimtek sudah tahun ini berjalan, kemudian untuk mewujudkan usahanya pasti dia butuh alat, itu juga bisa kita formulasikan seperti itu Pak. Terima kasih.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kalau kemarin kan itu per kelompok.

PEMERINTAH:

Iya kalau tahun ini.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Kalau sekarang per orangan itu lalu bentuk simulasinya seperti apa dan alatnya seperti apa, jangan sampai alat yang dibeli itu dibawah kualitas, itu malah jadi bumerang bagi kita.

PEMERINTAH:

Iya Pak, itu kebetulan teknis yah Pak Ketua.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Bu, biar paham jadi begini Bu, yang dimaksud oleh Pak Gandung itu tentunya saya mungkin sudah jelasin tambahan, tentunya berdasarkan usulan ataupun jenis pelatihan itu misalnya pelatihan *barbershop* ada 2 pelatih potong rambut, tentunya alatnya bukan alat cukur pohon bunga tanaman kan begitu, nah artinya disesuaikan dengan jenis pelatihan yang ada di daerah masing-masing yang diusulkan oleh Pak Gandung misalnya mengusulkan tadi, terus pelatihan membuat Kue Klepon tentunya alat-alat yang menunjang untuk membuat Kue Klepon, bukan untuk membuat dodol duren kan begitu, saya pikir begitu yah.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya, jadi begini, misalnya ada komunitas, kan 40 orang itu 4 komunitas, atau setiap pelatihan ada berapa orang jumlahnya?

PEMERINTAH:

21.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):



Nah 20, andai kata itu harus satu jenis?

PEMERINTAH:

Iya kalau yang 20, kami juga sudah buat formulasinya Pak, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Lamhot tadi memang kita untuk menambah jumlah pesertanya mungkin di awal kita juga melakukan seperti pelatihan.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Iya, saya berarti tidak kalau menurut jumlah pesertanya, kan kualitas yang diberikan per orang itu bentuknya seperti apa?

PEMERINTAH:

Iya Pak, jadi kalau dari sisi investasi Pak, memang yang skala kecil menengah itu ketika peralatannya lebih kecil dari 15 miliar Pak, bahkan kalau untuk yang.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

15 miliar itu per?

PEMERINTAH:

Per jenis usaha, itu untuk yang kategori menengah Pak, tapi kalau untuk industri kecil lebih dari 1 miliar.

F-GOLKAR (DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.):

Sebentar Bu, kalau 15 miliar itu nanti dibagikan per peserta anggota berapa duit itu?

PEMERINTAH:

Nah jadi sekali lagi Pak, ini kan berangkat dari pelatihan apa yang diberikan atau kalau kita bilang kebutuhan apa yang diperlukan daerah itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya, bisa juga berbasis jasa-jasa perbengkelan disana Pak.

Nah jadi disana misalnya jasa *service* elektronika, alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kegiatan itu menjadi operasional, seperti itu Pak, contoh saja Pak, belum lagi kalau kita bicara yang berbasis pangan, misalnya tadi ada mesin pembuat kopi seperti itu yah Pak, terus juga ada kalau berbasis *bakery* ada oven, ada untuk pembuatan roti, belum juga untuk konveksi.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Bu, yang dimaksud Pak Gandung itu adalah penambah kepastian kualitas dari produk dan barang itu dasarnya itu, *clear* disitu yah jadi saya pikir itu sudah harus menjadi catatan kita bersama dan harus **...(suara tidak jelas 17.08** dan saya rasa Kemenperin harus siap untuk memastikan kualitas dari produk barang yang akan didistribusikan.

Saya pikir cukup yah, sekali lagi saya poin nomor 2 saya bacakan, Komisi VII DPR RI menyetujui tambahan 400 miliar untuk keperluan program di daerah yang memiliki kemanfaatan langsung ke masyarakat, khususnya peningkatan program WUB dengan menambah jumlah penerima manfaat beserta dengan peralatan-peralatan penunjang peningkatan kewirausahaan per penerima manfaat, setuju yah?

(RAPAT : SETUJU)

Oke, terima kasih, selanjutnya poin nomor 3 habis dan saya atas nama Pimpinan dan teman-teman Komisi VII mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya dari semua Kementerian Eselon I sampai ke bawah, selanjutnya kita berikan *closing statement*, oh iya silahkan Bang Dony Oekon DMO (*Domestic Market Obligations*)

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Sesuai dengan yang tadi pagi yang saya buka Rapat tadi menjelaskan bahwasanya kita terfokuskan kepada program-program kita di Dapil, jadi sekali lagi saya minta apa yang kita putuskan hari ini betul-betul *firm*, karena tidak ada waktu lagi kami untuk bergerak, tidak ada ruang lagi kami untuk berdebat, karena ke depan ini kami kalau dilihat 2023 sudah memanfaatkan itu untuk perjuangan kita ke bawah dengan masyarakat.

Jadi mohon izin ini kita sama-sama mengerti satu sama lain, karena kita juga disini menambahkan anggarannya, izin Pak, tidak seperti yang sudah-sudah kita memindahkan anggaran dari Departemen satu ke Departemen lain, ke Dirjen satu ke Dirjen lainnya, ini tidak kita lakukan.

Hari ini kita fokus betul-betul, tolong ini betul-betul terlaksana apa program yang bisa kita manfaatkan demi kepentingan masyarakat luas. Setuju mungkin teman-teman semua yah, iya terima kasih Bapak-Bapak, silahkan *closing statement* dari Pak Menteri atau? Nanti sesi berikutnya Pak, dari Bapak dulu.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Silahkan Pak Sekjen.



SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (DODY WIDODO):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam Bapak-Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR dari Bapak Ketua dan Anggota yang lainnya. *Alhamdulillah* terima kasih banyak hari tadi saya cukup stress tegang, tapi *Alhamdulillah* diketuknya akhirnya dengan ketuk senang, terima kasih banyak atas dukungan Bapak dan Ibu semua, dengan penambahan 400 miliar ini benar-benar buat kami ini penambahan yang tentunya diharapkan bisa memberikan manfaat dan tentunya juga kepentingan Kementerian Perindustrian bisa tercapai.

Terima kasih sekali lagi Bapak/Bapak, Pak Dony Oekon, Pak Maman, Pak Ketua, dan Anggota Bapak/Ibu yang lainnya, sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-GOLKAR/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Oleh karena itu rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Perindustrian resmi saya tutup.

RAPAT DITUTUP PKI.19.30 WIB

a.n. Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002



A small, handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive-like mark.